

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI PROVINSI PAPUA BARAT



Jo - Pasar Tradisional

Penyusun :

*Totok Mei Untarto, Emalia Talaubun, Rosa Rantetoding
Feri Hurulean, Rully Wurarah, Siti Aisyah Bauw, Maria Goreti,
Billy Tanati, Ezrom Batorinding*

Penyunting :

*Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut.,M.Si
Ir. Max J Tokede, Ms.*

Cover

(Salah Satu Sudut Pasar Tradisional di Papua Barat dan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong)

Desain Cover:

Ari Koesmiadi

Diterbitkan dan Dicetak Oleh:

**Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Papua Barat**

**Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Papua Barat**

Gedung Kantor Gubernur Sayap 1 Lt. 2 dan 3.
Jl. Brigjen (Purn) Abraham O Atururi Arfai Manokwari Papua Barat
98312

Dicetak dengan Pembiayaan Anggaran

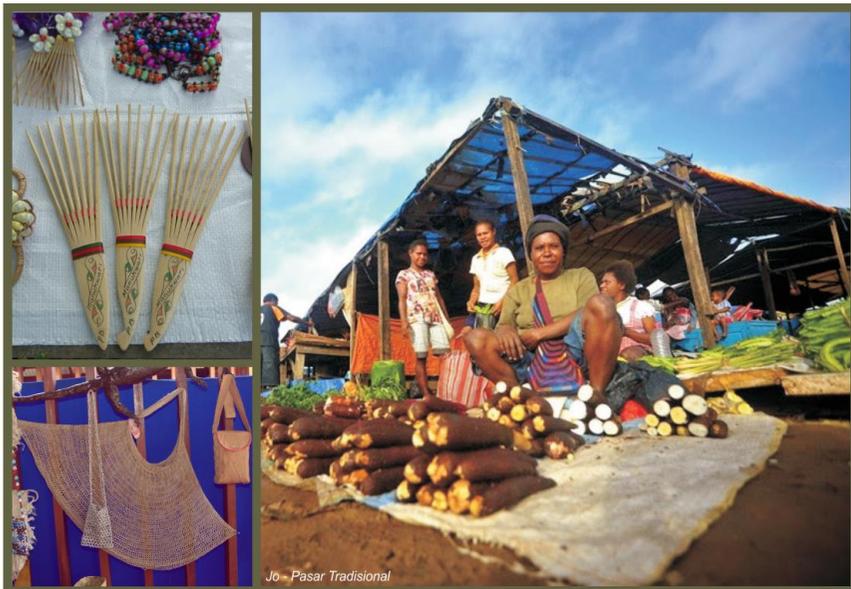
**Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA)
Provinsi Papua Barat**

Tahun 2018

Dilarang mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat.

(sesuai UU No.19 Tahun 2002, Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 49 ayat 1)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI PROVINSI PAPUA BARAT



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI
PROVINSI PAPUA BARAT**

Terbit Tahun 2019
ISBN 978-623-90302-0-9

Penyusun :

Totok Mei Untarto
Emalia Talaubun
Rosa Rantetoding
Feri Hurulean
Rully Wurarah
Siti Aisyah Bauw
Maria Goreti
Billy Tanati
Ezrom Batorinding

Penyunting:

**Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut.,M.Si, FLS
Ir. Max J Tokede, MS.**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan kasih dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Provinsi Papua Barat dapat menerbitkan buku berjudul *Implementasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Papua Barat*.

Buku ini merupakan hasil kerja sama penelitian antar Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat dengan peneliti dari Fakultas Ekonomi Universitas Papua, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat dan Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat pada tahun 2017.

Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat membutuhkan data dan informasi serta merasa perlu mempublikasikan kebijakan-kebijakan strategis yang mampu memberikan percepatan pembangunan ekonomi di Papua Barat. Strategi kebijakan pembangunan ekonomi pada setiap daerah dilakukan dengan mengembangkan potensi-potensi ekonomi lokal yang mampu menggerakkan perekonomian daerah. Strategi kebijakan ini ditempuh melalui perencanaan pembangunan ekonomi yang rasional (efisien dan efektif) berdasarkan karakteristik daerah dan sektor unggulan serta mengarah pada visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah. Secara makro kebijakan pembangunan ekonomi daerah diarahkan untuk mengembangkan satu sektor ekonomi yang memerlukan input/ masukan dari sektor lain. Untuk maksud

tersebut, diperlukan pemilihan model ekonomi regional sebagai alat analisis yang tepat yang mampu mendeteksi sektor-sektor ekonomi unggulan. Secara rasional model ekonomi regional dibangun dalam bentuk sistem output-input dimana output dari suatu program pembangunan dapat menjadi input bagi program pembangunan yang lain.

Penerbitan buku ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pembangunan ekonomi dan memberikan gambaran perkembangan ekonomi di Provinsi Papua Barat. Kami berharap buku ini menjadi dokumentasi tertulis data dan informasi yang dapat digunakan untuk proses perencanaan pembangunan ekonomi daerah dan sekaligus menjadi media sosialisasi tentang hasil implementasi kebijakan pembangunan ekonomi di Provinsi Papua Barat.

Semoga dengan diterbitkannya buku *Implementasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Papua Barat*, dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan para pembaca mengenai fakta empirik tentang perkembangan perekonomian di Provinsi Papua Barat.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan dari pembaca sangat dibutuhkan untuk penyempurnaannya.

Manokwari, 10 Agustus 2018

Tim Penulis

SAMBUTAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

*Salam Sejahtera bagi kita sekalian,
Assalamualaikum, Wr, Wb*

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat merupakan perangkat daerah yang dibentuk pemerintah provinsi berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, untuk mendukung pembangunan daerah melalui peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.



Sebagai lembaga yang memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah yang kita cintai ini, maka saya mengharapkan keberadaan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mampu memberikan saran-saran dan rekomendasi taktis kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan melalui hasil-hasil penelitian yang berkualitas dan bermanfaat.

Penerbitan buku ***“Implementasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Papua Barat”*** merupakan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat pada tahun 2017. Kami berharap buku ini dapat berfungsi

sebagai sumber data dan informasi terkait kebijakan-kebijakan strategis yang mampu memberikan percepatan pembangunan ekonomi yang sangat dibutuhkan di Provinsi Papua Barat. Dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan pembangunan ekonomi pada setiap daerah dituntut untuk mengembangkan potensi-potensi ekonomi yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui perencanaan pembangunan ekonomi yang rasional (efisien dan efektif) berdasarkan karakteristik daerah dan sektor unggulan serta mengarah pada visi dan misi pembangunan di daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah.

Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada para penulis dan semua yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini akan bermanfaat bagi para pembaca dan merupakan perintis dan kontribusi peran Balitbangda dalam menunjang pembangunan daerah yang berkelanjutan di Provinsi Papua Barat.

Manokwari, Agustus 2018
Kepala BALITBANGDA

Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut., M.Si., FLS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
SAMBUTAN KEPALA BALITBANGDA PROVINSI PAPUA BARAT	5
DAFTAR ISI	7
BAB I PENDAHULUAN	11
Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah	11
Peranan Pemerintah Dalam Perekonomian	12
Isu Strategis Pembangunan Ekonomi Daerah	16
BAB II KONSEP MAKRO EKONOMI REGIONAL	17
Teori Perkembangan Pengeluaran Pemerintah	17
<i>Model Pengeluaran Pemerintah</i>	17
<i>Teori Mengenai Perkembangan Pengeluaran Pemerintah</i>	18
<i>Perkembangan Pengeluaran Pemerintah</i>	20
Hubungan Kausalitas Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Bruto	24
<i>Pengeluaran Pemerintah</i>	24
<i>Produk Domestik Bruto</i>	27
Pertumbuhan Wilayah dan Pengembangan Sektor Unggulan	29
Keterkaitan Antar Sektor di Dalam Perekonomian	32
Pengelolaan Keuangan Daerah	34
<i>Konsep dan Pengertian Efisiensi</i>	36
<i>Konsep dan Pengertian Efektifitas</i>	37
BAB III ANALISIS EKONOMI REGIONAL	38
Indikator Makro Ekonomi Fundamental	38

<i>Struktur PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi</i>	
<i>Menurut Lapangan Usaha</i>	40
Struktur dan Pertumbuhan PDRB Menurut	
Pengeluaran	45
Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita	49
Inflasi	51
Indikator Pembangunan	57
<i>Indeks Pembangunan Manusia</i>	57
<i>Ketenagakerjaan</i>	62
<i>Mengurangi Tingkat Pengangguran</i>	62
<i>Menciptakan Tenaga Kerja Yang Berkualitas</i>	66
Ketimpangan (<i>Gini Ratio</i>)	74
Kesejahteraan (<i>Kemiskinan dan Nilai Tukar Petani</i>) ...	78
BAB IV ANALISIS KEUANGAN DAERAH	89
Analisis Pelaksanaan APBN	89
<i>APBN Tingkat Provinsi</i>	89
Penerimaan Perpajakan Provinsi Papua Barat	90
Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	91
Belanja Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi	92
Analisis Pelaksanaan APBD	104
<i>Jenis Pendapatan Dalam APBD</i>	106
<i>Jenis Belanja Dalam APBD</i>	113
Silpa dan Pembiayaan Daerah	121
Perkembangan Surplus/Defisit APBD Provinsi	
Papua Barat	122
Analisis Belanja Dalam APBD	126
<i>Analisis Vertikal dan Horizontal</i>	127
<i>Analisis Kapasitas Fiskal Daerah (Ruang Fiskal/</i>	
<i>Fiskal Space)</i>	132
<i>Analisis Pengelolaan Keuangan</i>	133
Perencanaan	133

	Pelaksanaan	134
	Pengawasan	134
BAB V	ANALISIS KEUANGAN DAN POTENSI SEKTOR STRATEGIS	
		138
	Sektor Unggulan	138
	Indikator Sektor Terpilih	153
	<i>Jasa Pendidikan</i>	155
	<i>Jasa Kesehatan</i>	157
	<i>Sektor Pertanian</i>	161
	<i>Sektor Transportasi</i>	164
	<i>Konstruksi</i>	166
	Sektor Strategis Papua Barat	169
	<i>Kelautan dan Perikanan</i>	170
	<i>Kehutanan</i>	173
	<i>Peternakan</i>	174
BAB VI	ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS BELANJA	176
	Efisiensi Belanja Daerah	176
	Efektifitas Belanja Daerah	190
	Pengembangan Indikator Makro Daerah	197
BAB VII	PENUTUP	201
	DAFTAR PUSTAKA	204



PENDAHULUAN

Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah

Kebijakan pembangunan ekonomi pada setiap daerah dibangun berdasarkan potensi-potensi ekonomi yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui perencanaan pembangunan ekonomi yang rasional (efisien dan efektif) berdasarkan karakteristik daerah dan sektor unggulan serta mengarah kepada visi dan misi pembangunan di daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah. Kebijakan ini ditempuh melalui proses pembangunan sektor-sektor ekonomi yang memiliki keterkaitan antara satu sektor dengan sektor lainnya. Secara makro, kebijakan pembangunan ekonomi daerah harus dilakukan dengan pendekatan sistem. Untuk mengembangkan satu sektor ekonomi, memerlukan input/masukan dari sektor lain yang terkait. Untuk maksud tersebut perlu dibangun suatu model ekonomi regional sebagai alat analisis yang tepat yang mampu mendeteksi secara dini sektor-sektor ekonomi unggulan, tingkat penyerapan tenaga kerja sektoral dan tingkat pendapatan. Secara rasional model ini dibangun berdasarkan sistem output-input dimana output dari suatu program pembangunan dapat menjadi input bagi program pembangunan yang lain.

Secara makro hubungan antara kegiatan ekonomi memperlihatkan keterkaitan yang semakin kuat dan dinamis, bahkan jenis-jenis kegiatan baru bermunculan untuk mengisi kekosongan dalam mata rantai kegiatan yang semakin

panjang dan kait-mengkait bersifat kausatif. Berbagai kegiatan ekonomi terkait (*inter-industry relationship*) yang demikian selanjutnya dapat direkam dalam suatu instrumen statistik dengan analisis yang lebih komprehensif.

Kebijakan penggunaan model makroekonomi regional dalam mekanisme perencanaan pembangunan ekonomi berawal dari analisis untuk mengetahui potensi ekonomi dan karakteristik sektoral, diharapkan para perencana di daerah dapat mengetahui secara lebih mendalam mengenai sektor-sektor ekonomi unggulan yang dapat dikembangkan dan mampu memberikan nilai keuntungan baik ditinjau dari segi pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja maupun kontribusinya terhadap pendapatan daerah. Kebijakan ekonomi daerah melalui pendekatan makroekonomi regional yang mengintegrasikan sektor-sektor ekonomi unggulan dalam suatu kerangka sistem menjadi penting untuk diimplementasikan dalam pembangunan daerah sehingga efektivitas dan efisiensi dapat ditingkatkan.

Peranan Pemerintah Dalam Perekonomian

Adam Smith dalam Pressman (2002) menjelaskan bahwa aktivitas pemerintah yaitu melaksanakan kegiatan untuk mencegah monopoli, memberikan pertahanan dari ancaman luar negeri, memberikan ketertiban keamanan internal dan ketentuan pemerintah atas barang publik. Dalam perekonomian modern, Mangkusubroto (2008) menyatakan bahwa peran pemerintah dapat digolongkan menjadi peran alokasi, distribusi dan stabilisasi, sebab menurut Stiglitz (1986) terjadinya kegagalan pasar dapat menimbulkan

intervensi pemerintah melalui berbagai program kegiatan. Selanjutnya dikatakan bahwa terjadinya kegagalan tersebut karena : a. pemerintah tidak dapat mengantisipasi akibat kebijaksanaan yang diambilnya; b. pemerintah terbatas di dalam mengendalikan akibat kebijaksanaan; c. pemerintah di dalam membuat kebijaksanaan sering tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakannya; d. pemerintah memberikan pelayanan pada kelompok tertentu atau kepentingan tertentu.

Salah satu konsep dari Keynes menekankan bahwa tingkat kegiatan dalam perekonomian ditentukan oleh perbelanjaan agregat, yang dalam suatu periode tertentu pada umumnya kurang diperlukan untuk mencapai tingkat full employment. Salah satu penyebab kondisi tersebut karena investasi yang dilakukan para pengusaha biasanya lebih rendah dari tabungan yang akan dilakukan dalam perekonomian full employment. Selanjutnya menurut Keynes bahwa sistem pasar bebas tidak akan dapat membuat penyesuaian-penyesuaian yang akan menciptakan full employment, oleh sebab itu diperlukan kebijakan pemerintah berupa kebijakan fiskal, moneter dan pengawasan langsung.

Kebijakan fiskal dapat dilakukan melalui pengaturan anggaran pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Pada kondisi terjadi inflasi biasanya kebijakan fiskal akan berbentuk mengurangi pengeluaran pemerintah dan meningkatkan pajak. Sebaliknya apabila pengangguran serius maka pemerintah berusaha menambah pengeluaran dan berusaha mengurangi pajak. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan mempengaruhi jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga. Sedangkan pada pengawasan langsung

dapat dilakukan dengan membuat peraturan-peraturan.

Dalam perekonomian suatu daerah, Peranan pemerintah dalam perekonomian dibutuhkan dalam rangka menyediakan legal system atau peraturan-peraturan yang tidak dapat disediakan oleh sektor privat dan untuk mengantisipasi bila terjadi kegagalan pasar. Terjadinya kegagalan pasar disebabkan oleh kompetisi yang tidak sempurna, publik goods, eksternalitas dan kegagalan informasi. Pada kondisi kompetisi tidak sempurna menunjukkan bahwa di dalam pasar tidak sempurna dan cenderung monopoli, dicirikan oleh harga yang terjadi biasanya lebih tinggi dan jumlah produksi lebih sedikit. Peran Pemerintah diharapkan dapat mengatur dan memperbaiki agar kesejahteraan masyarakat tidak terdepresiasi. Pada kondisi public goods yang memiliki karakteristik non excludable dan non rivalry, maka akan timbul fenomena free rider, artinya orang akan berlomba-lomba untuk tidak membayar dalam menikmati barang tersebut. Sistem penyediaan barang seperti ini tidak dapat dilakukan oleh sektor privat, sehingga menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakannya.

Ekternalitas merupakan dampak yang diakibatkan oleh adanya suatu aktifitas, yang dalam market economy bersifat selfish sehingga yang dipikirkan adalah meminimalkan biaya, sedangkan dampak secara tidak langsung seperti dampak sosial tidak diperhitungkan. Kegagalan informasi menunjukkan tidak tersalurkan informasi secara tepat, padahal dalam beberapa hal masyarakat sangat membutuhkan informasi yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta, misalnya prakiraan cuaca. Bidang pertanian

dan kelautan sangat membutuhkan informasi cuaca, akan tetapi pihak swasta tidak memiliki informasi tersebut oleh karena itu Pemerintah yang harus menyediakan informasi cuaca tersebut.

Secara konseptual, peranan pemerintah umumnya mendistribusikan pendapatan dari yang kaya kepada yang miskin secara lebih adil dan bijaksana serta menyediakan merit goods. Musgrave (1959) menyebutkan merit goods adalah barang-barang yang seharusnya disediakan meskipun masyarakat tidak memintanya. Masyarakat sering tidak bijaksana atau tidak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk mengalokasikan sumber ekonomi yang dimiliki. Peranan pemerintah terfokus pada memfasilitasi masyarakat untuk mengalokasikan kebutuhan masyarakat.

Secara umum fungsi pemerintah dalam perekonomian modern dapat dibagi menjadi :

- a. fungsi alokasi, dengan mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien;
- b. fungsi distribusi, oleh Kaldor mengatakan bahwa suatu tindakan dikatakan bermanfaat apabila golongan yang memperoleh manfaat dari tindakan tersebut memberikan kompensasi bagi golongan yang mengalami kerugian sehingga posisi golongan yang rugi tetap sama seperti halnya sebelum adanya tindakan yang bersangkutan;
- c. fungsi stabilisasi, terhadap guncangan keadaan yang akan menimbulkan pengangguran dan inflasi yang harus ditangani melalui kebijakan moneter.

Isu Strategis Pembangunan Ekonomi Daerah

Kebijakan pembangunan ekonomi Papua Barat diimplementasikan guna mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kesejahteraan umumnya dinilai dengan kondisi ekonomi makro yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan IPM tersebut, kesejahteraan masyarakat Papua Barat tergolong masih sangat rendah. IPM Papua Barat sejak berdirinya Provinsi ini selalu berada pada ranking 2-3 paling bawah dari 32-34 provinsi. Jumlah penduduk miskin meskipun menurun setiap tahunnya namun masih diatas rata-rata nasional. Pada sisi lain dana pembangunan yang sudah digunakan untuk membangun ekonomi di Papua Barat cukup besar dan mengalami peningkatan pada setiap tahun.

Berdasarkan fakta tersebut di atas isu strategis implementasi kebijakan pembangunan ekonomi provinsi Papua Barat yang akan dijawab sekaligus menjadi lingkup pembahasan dalam dokumen ini adalah (a) apakah dana yang telah digunakan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kurang mencukupi?; (b) apakah dana yang sudah digunakan masih belum fokus pada sasaran yang ingin dicapai?; (c) apakah telah terjadi bobot pembelanjaan yang kurang efektif dalam upaya mendorong pembangunan ekonomi daerah. Jawaban atas ketiga isu strategis ekonomi daerah tersebut menjadi dasar kajian implementasi kebijakan pembangunan ekonomi Papua Barat yang disajikan dalam bentuk Dokumen Buku hasil kajian yang telah dilakukan.

KONSEP MAKROEKONOMI REGIONAL

Teori Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Teori makroekonomi mengenai pengeluaran pemerintah yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi dalam berbagai referensi, dapat digolongkan menjadi 3 kelompok yakni Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah, Teori Adolf Wagner dan Teori Peacock dan Wiseman. Teori secara mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja.

Model Pengeluaran Pemerintah

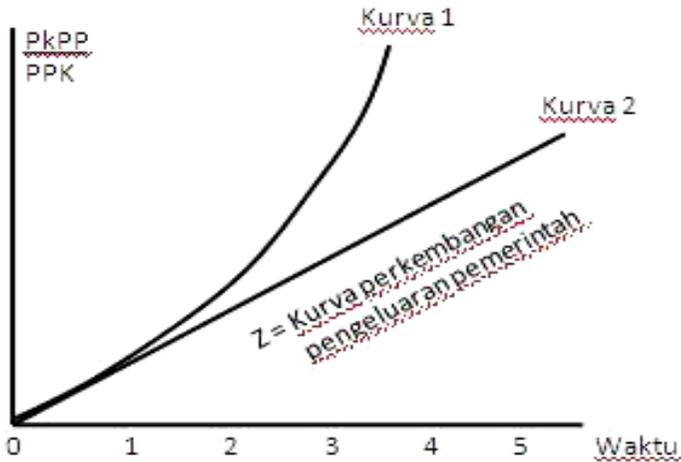
Model yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, prosentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi

swasta sudah semakin besar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta semakin besar akan menimbulkan banyak kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak. Pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor yang makin kompleks, seperti pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri akan menimbulkan dampak pencemaran atau polusi. Dampak ini yang mengharuskan pemerintah turun tangan untuk mengatur dan mengurangi dampak tersebut dan melindungi kesejahteraan masyarakat.

Musgrave (1980) berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam prosentase terhadap PDB semakin besar dan prosentase investasi pemerintah terhadap PDB akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Teori Mengenai Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam prosentase terhadap PDB oleh Wagner mengemukakan pendapatnya bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat seperti digambarkan berikut:



Gambar 1. Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Formulasi dari kurva tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\frac{P_k P P_1}{P P K_1} < \frac{P_k P P_2}{P P K_2} < \dots < \frac{P_k P P_n}{P P K_n}$$

$P_k P P$: pengeluaran pemerintah per kapita

$P P K$: pendapatan per kapita

1,2,...,n : jangka waktu (tahun)

Kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk eksponensial yang ditunjukkan oleh kurva di atas, yang didasarkan pada pengamatan empiris dari negara-negara maju (Amerika Serikat, Jerman, Jepang). Peranan pemerintah menjadi semakin besar, terutama karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat sedangkan pemerintah sebagai individu dan

bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya, walaupun teori tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang publik.

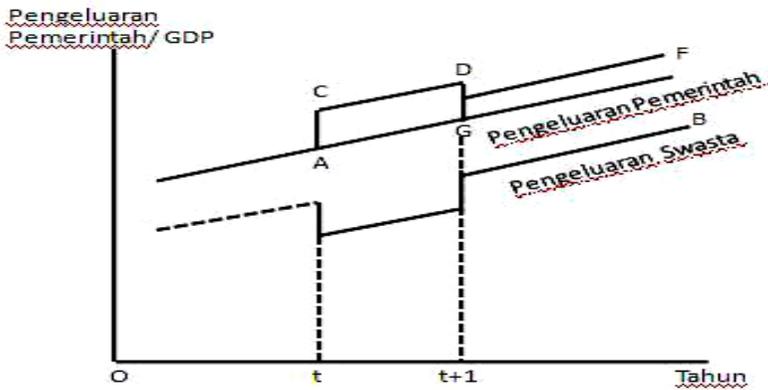
Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Teori mereka didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah tersebut. Teori ini didasarkan pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak.

Teori Peacock dan Wiseman ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah semakin meningkat. Dalam keadaan normal, meningkatnya PDB menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Apabila keadaan normal tersebut terganggu, misalnya karena adanya perang, maka pemerintah harus memperbesar pengeluarannya untuk

membayai perang. Karena itu penerimaan pemerintah dari pajak meningkat dengan cara menaikkan tarif pajak sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi menjadi berkurang.

Teori Peacock dan Wiseman menjelaskan bahwa terdapat efek penggantian (*displacement effect*) yaitu adanya gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Pengentasan gangguan tidak hanya cukup dibiayai semata-mata dengan pajak sehingga pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri. Setelah gangguan teratasi muncul kewajiban melunasi utang dan membayar bunga. Pengeluaran pemerintah yang semakin bertambah bukan hanya karena GNP bertambah tetapi karena adanya kewajiban baru tersebut, akibatnya pajak tidak menurun kembali ke tingkat semula meskipun gangguan telah berakhir. Masih banyak aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah terjadinya gangguan ini, dan ini disebut efek inspeksi (*inspection effect*). Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan oleh swasta. Efek inilah disebut sebagai efek konsentrasi (*concentration effect*). Dengan adanya ketiga efek tersebut menyebabkan bertambahnya aktivitas pemerintah sehingga tingkat pajak tidak menurun kembali pada tingkat sebelumnya. Dampak eksternal tersebut dapat digambarkan dalam bentuk kurva dibawah ini:



Gambar 2. Kurva Pengeluaran Pemerintah dan Swasta

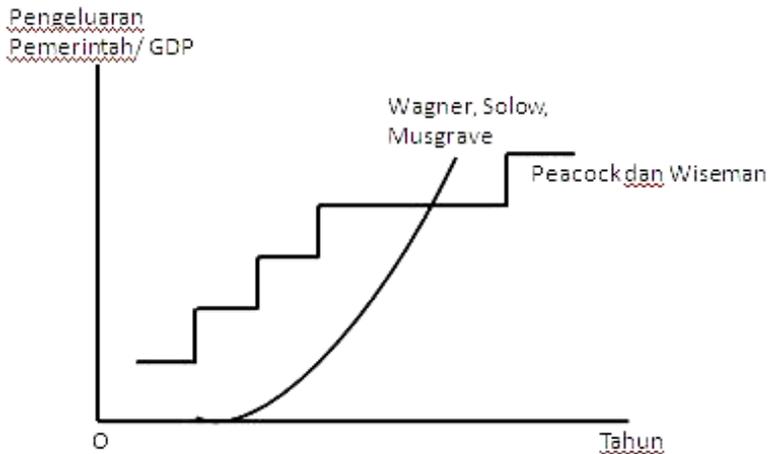
Pada kondisi normal t ke t+1, pengeluaran pemerintah dalam persentase terhadap GNP meningkat sebagaimana yang ditunjukkan garis AG. Apabila pada tahun t terjadi perang maka pengeluaran pemerintah meningkat sebesar AC dan kemudian meningkat seperti yang ditunjukkan pada segmen CD. Setelah perang selesai pada tahun t+1, pengeluaran pemerintah tidak menurun ke G. Hal ini disebabkan setelah perang, pemerintah membutuhkan tambahan dana untuk mengembalikan pinjaman pemerintah yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan.

Bird mengkritik hipotesa yang dikemukakan oleh Peacock dan Wiseman. Bird menyatakan bahwa selama terjadinya gangguan sosial memang terjadi pengalihan aktivitas pemerintah dari pengeluaran sebelum gangguan ke pengeluaran yang berhubungan dengan gangguan tersebut. Hal ini akan diikuti oleh peningkatan prosentase pengeluaran pemerintah terhadap PDB. Akan tetapi setelah terjadinya gangguan, prosentase pengeluaran pemerintah terhadap PDB

akan menurun secara perlahan-lahan kembali ke keadaan semula. Jadi menurut Bird, efek pengalihan merupakan gejala dalam jangka pendek, tetapi tidak terjadi dalam jangka panjang.

Satu hal yang perlu dicatat dari teori Peacock dan Wiseman adalah bahwa mereka mengemukakan adanya toleransi pajak, yaitu suatu limit perpajakan, akan tetapi mereka tidak menyatakan pada tingkat berapa toleransi pajak tersebut. Clarke menyatakan bahwa limit perpajakan adalah sebesar 25 persen dari pendapatan nasional. Apabila limit dilampaui maka akan terjadi inflasi dan gangguan lainnya.

Berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman tidaklah berbentuk suatu garis, seperti kurva di bawah, tetapi berbentuk seperti tangga.



Gambar 3. Kurva Pengeluaran Pemerintah Peacock dan Wiseman.

Pengeluaran pemerintah menurut teori Wagner, Sollow, dan Musgrave digambarkan dalam bentuk kurva yang eksponensial, sedangkan teori Peacock dan Wiseman mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah jika digambarkan dalam kurva seperti bentuk tangga. Hal ini dikarenakan adanya kendala toleransi pajak. Ketika masyarakat tidak ingin membayar pajak yang tinggi yang ditetapkan pemerintah, maka pemerintah tidak bisa meningkatkan pengeluarannya, walaupun pemerintah ingin senantiasa menaikkan pengeluarannya.

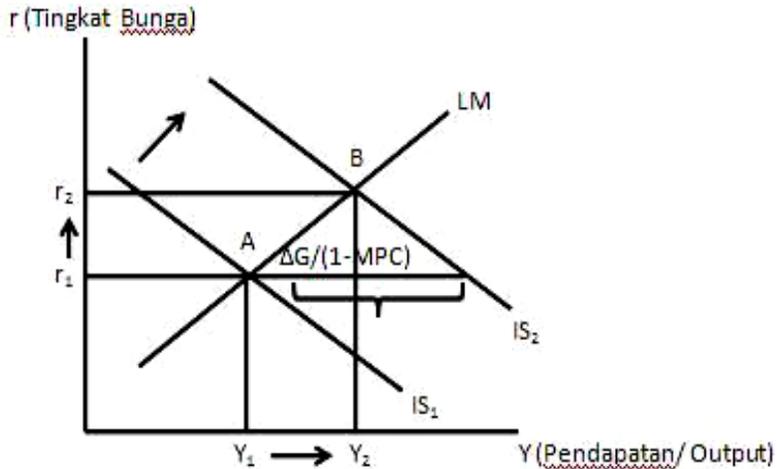
Menurut Mangkoesobroto (2004) perkembangan pengeluaran pemerintah ditentukan oleh beberapa faktor yaitu, a. perubahan permintaan akan barang publik; b. perubahan aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik, dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi; c. perubahan kualitas barang publik; dan d. perubahan harga-harga faktor-faktor produksi.

Hubungan Kausalitas Pengeluaran Pemerintah Dan Produk Domestik Bruto

Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah termasuk kedalam kebijakan fiskal bersama dengan pajak. Perubahan pengeluaran pemerintah ini akan mengubah ekuilibrium jangka pendek perekonomian. Perubahan fiskal akan mempengaruhi pengeluaran yang direncanakan dan menggeser kurva IS dalam Model IS-LM. Pergeseran dalam kurva IS tersebut

mempengaruhi pendapatan nasional dan tingkat bunga, seperti dalam grafik berikut:



Gambar 4. Kurva IS-LM Terhadap Pendapatan Nasional dan Tingkat Bunga

Kenaikan pengeluaran pemerintah sebesar ΔG sebagai pengganda pengeluaran pemerintah dalam perpotongan Keynesian menyatakan bahwa pada tingkat bunga berapapun perubahan dalam kebijakan fiskal ini menaikkan pendapatan sebesar $\Delta G/(1-MPC)$, sehingga kurva IS bergeser ke kanan sebesar jumlah ini. Ekuilibrium perekonomian bergerak dari titik A ke titik B, kenaikan pengeluaran pemerintah akan meningkatkan pendapatan dan bunga. Pengeluaran yang direncanakan akan naik ketika pemerintah meningkatkan belanjanya atas barang dan jasa. Kenaikan pengeluaran yang direncanakan ini akan mendorong produksi barang dan jasa, yang menyebabkan pendapatan total Y meningkat.

Berdasarkan teori perkembangan pengeluaran pemerintah menunjukkan bahwa produk domestik bruto (PDB) akan mempengaruhi besarnya pengeluaran pemerintah dan sebaliknya pengeluaran pemerintah sebagai variabel independen, akan mempengaruhi produk domestik bruto (PDB). John Due (1968) sebelumnya telah mengemukakan bahwa pemerintah dapat mempengaruhi tingkat PDB nyata dengan mengubah persediaan berbagai faktor yang dapat dipakai dalam produksi melalui program-program pengeluaran pemerintah seperti pendidikan.

Kegiatan yang dilakukan pemerintah yang mendorong besaran jumlah pengeluaran negara mempunyai pengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Hal tersebut sudah dibuktikan oleh Landau (1986) bahwa pengeluaran pemerintah di bidang militer dan pendidikan berkorelasi negative terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara untuk pendidikan sendiri berkorelasi kuat dan investasi pemerintah berkorelasi positif walaupun tidak signifikan. Lin (1994) mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PDB) dengan laju yang semakin mengecil. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah, sehingga apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, maka pengeluaran pemerintah tersebut mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan program yang melibatkan segenap lapisan masyarakat, sedangkan pemerintah hanya sebagai katalisator dan fasilitator untuk

menyediakan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, termasuk anggaran belanja dalam rangka terlaksananya pembangunan tersebut. Pengeluaran tersebut sebagian digunakan untuk administrasi pembangunan dan sebagian lain untuk kegiatan pembangunan. Alokasi belanja terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat sehingga mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi. Meningkatnya kegiatan ekonomi mengakibatkan aliran penerimaan pemerintah melalui PAD mengalami peningkatan.

Hubungan antara PAD dengan PDRB merupakan hubungan secara fungsional, karena PDRB merupakan fungsidari PAD, artinya dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan. Konsekuensinya akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitasnya.

Produk Domestik Bruto

Produk domestik bruto pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun, sedang PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku

pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Nilai PDB dapat dihitung dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Produksi

PDB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya oleh BPS telah mengelompokkannya menjadi 17 sektor utama yaitu: 1. Pertanian, kehutanan, dan perikanan; 2. Pertambangan dan penggalian; 3. Industri pengolahan; 4. Pengadaan listrik dan gas; 5. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; 6. Konstruksi; 7. Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; 8. Transportasi dan pergudangan; 9. Penyediaan akomodasi dan makan minum; 10. Informasi dan komunikasi; 11. Jasa keuangan dan asuransi; 12. Real estate; 13. Jasa perusahaan; 14. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; 15. Jasa pendidikan; 16. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial; 17. Jasa lainnya.

2. Pendekatan Pendapatan

PDB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi PDB mencakup

juga penyusutan dan pajak tidak langsung netto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

3. Pendekatan Pengeluaran

PDB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor netto (ekspor dikurangi impor).

Nilai seluruh produksi diperoleh dari penjumlahan pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan rumah tangga dan perusahaan, pemerintah dan luar negeri atas produk barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu daerah, seperti: a. Pengeluaran konsumen rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari hutang; b. Konsumen pemerintah; c. Pembentukan modal tertentu domestik bruto; d. Perubahan stok; e. Ekspor neto.

Secara konseptual ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi.

Pertumbuhan Wilayah dan Pengembangan Sektor Unggulan

Model pertumbuhan regional neoklasik mengacu pada model pertumbuhan Solow-Swan (Solow, 1956; Swan, 1956), dan diterapkan dalam lingkup regional. Melalui peningkatan kegiatan produksi, yang ditentukan oleh tiga faktor utama,

yaitu kemajuan teknologi, penambahan modal dan tenaga kerja. Guna mengidentifikasi sumber atau komponen pertumbuhan wilayah dapat digunakan pendekatan metoda Shift Share yang telah di perkenalkan oleh Perloff et (1960) dalam mengidentifikasi sumber pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, dan perbedaan dalam struktur dan keragaan pasar. Sedangkan komponen pertumbuhan pangsa wilayah timbul karena peningkatan atau penurunan PDRB atau kesempatan kerja dalam suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Menurut Lucas dan Primes (1979) cepat atau lambannya pertumbuhan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya ditentukan oleh keunggulan komparatif, akses ke pasar, dukungan kelembagaan, prasarana sosial dan ekonomi serta kebijakan ekonomi regional pada wilayah tersebut.

Selama ini yang menjadi permasalahan pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanan kebijakan-kebijakan pembangunan yang di dasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia. Menurut pemikiran ekonomi klasik bahwa pembangunan ekonomi di daerah yang kaya sumber daya alam akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan di daerah yang miskin sumberdaya alam. Hingga tingkat tertentu, anggapan ini masih bisa dibenarkan, dalam artian sumber daya alam harus dilihat sebagai modal awal untuk pembangunan yang selanjutnya harus dikembangkan terus, untuk ini diperlukan faktor-faktor lain, diantaranya yang sangat penting adalah teknologi dan sumber daya manusia (Tambunan, 2001).

Perbedaan tingkat pembangunan yang di dasarkan atas potensi suatu daerah, berdampak terjadinya perbedaan sektoral dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Rachbini (2001) ada empat syarat agar suatu sektor tertentu menjadi sektor prioritas, yakni (1) sektor tersebut harus menghasilkan produk yang mempunyai permintaan yang cukup besar, sehingga laju pertumbuhan berkembang cepat akibat dari efek permintaan tersebut; (2) karena ada perubahan teknologi yang teradopsi secara kreatif, maka fungsi produksi baru bergeser dengan pengembangan kapasitas yang lebih luas; (3) harus terjadi peningkatan investasi kembali dari hasil-hasil produksi sektor yang menjadi prioritas tersebut, baik swasta maupun pemerintah; (4) sektor tersebut harus berkembang, sehingga mampu memberi pengaruh terhadap sektor-sektor lainnya. Manfaat mengetahui sektor unggulan, yaitu mampu memberikan indikasi bagi perekonomian secara nasional dan regional. Sektor unggulan dipastikan memiliki potensi lebih besar untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor lainnya dalam suatu daerah terutama adanya faktor pendukung terhadap sektor unggulan tersebut yaitu akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja yang terserap, dan kemajuan teknologi (*technological progress*). Penciptaan peluang investasi juga dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi sektor unggulan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan.

Keterkaitan Antarsektor Di Dalam Perekonomian

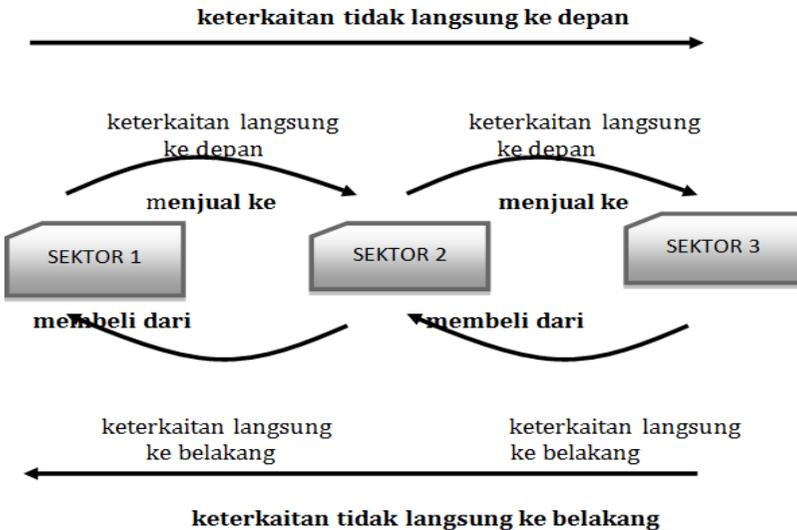
Keterbatasan sumber daya adalah masalah yang sering ditemui dalam pembangunan suatu wilayah/negara, yang mengakibatkan pembuat kebijakan harus memilih sektor mana yang akan menjadi fokus atau konsentrasi dalam pembangunan. Dengan memfokuskan pembangunan pada sektor-sektor yang dianggap sebagai leading sektor atau sektor kunci maka target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat dicapai dengan lebih baik. Keterkaitan antar sektor dapat digambarkan sebagai suatu proses produksi, misalnya pada industri kertas, bahan baku, bahan penolong, jasa-jasa dan sebagainya, untuk menghasilkan atau memproduksi kertas disebut sebagai input. Faktor produksi lainnya yaitu tenaga kerja, mesin-mesin dan peralatan.

Seandainya dalam perekonomian suatu wilayah terjadi perubahan permintaan terhadap output kertas misalnya (perubahan pada peubah eksogen), karena adanya kenaikan oplag koran, maka untuk mengantisipasi kenaikan permintaan ini, industri kertas perlu untuk meningkatkan output kertas agar dapat memenuhi permintaan tersebut. Upaya untuk meningkatkan output kertas, pada tahap awal, akan berdampak kepada peningkatan jumlah input yang diperlukan untuk menghasilkan kertas, misalnya peningkatan penggunaan bubur kertas (pulp).

Peningkatan output kertas memberikan dampak tidak hanya terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa yang digunakan langsung sebagai input oleh industri kertas; tetapi juga memberikan dampak tidak langsung kepada kegiatan-kegiatan ekonomi

lainnya. Dengan perkataan lain, perubahan permintaan terhadap industri kertas mempunyai dampak langsung dan dampak tidak langsung terhadap berbagai kegiatan ekonomi.

Dampak sedemikian dapat diibaratkan sebagai melemparkan batu ke dalam kolam, riak air yang terjadi di sekitar jatuhnya batu akan lebih besar dibandingkan dengan yang terjadi jauh dari tempat jatuhnya batu, apalagi sudah jauh sekali, dampak riak tersebut akan tidak ada. Dengan pengertian ini, dampak pengganda dapat diartikan sebagai suatu dampak yang terjadi baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap berbagai kegiatan ekonomi di dalam negeri sebagai akibat dari adanya perubahan pada variabel-variabel eksogen perekonomian suatu wilayah. Alurnya bisa disederhanakan dalam gambar 1.5 berikut:



Gambar 5. Alur Keterkaitan Antar Sektor Dalam Perekonomian

Keterkaitan ke belakang maupun ke depan, langsung dan tidak langsung, suatu sektor terhadap sektor-sektor lainnya dalam suatu perekonomian bisa diukur dari daya penyebaran dan derajat kepekaannya.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Susunan pengeluaran daerah ini disusun dengan mengaitkan penerimaan daerah tersebut dalam sebuah susunan sistematis yang dinamakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Mustopadidjaya (1997) menyatakan bahwa penyusunan rencana anggaran pengeluaran salah satu kegiatannya adalah identifikasi kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan serta mempertimbangkan kebijaksanaan yang menyangkut pengalokasian pada program-program yang dihubungkan baik dengan tujuan perekonomian secara keseluruhan maupun sasaran spesifik sektoral dan regional tertentu.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Prinsip pengelolaannya dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan, asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Tujuan utama dari pengelolaan keuangan daerah dan organisasi Pemerintah Daerah adalah memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat di daerah yang merupakan klient dari pemerintah daerah. Dalam hal ini, semua unit pemerintah yang ada

secara pokok difungsikan untuk melayani dengan sebaik-baiknya masyarakat yang bersangkutan.

Untuk dapat berfungsi sebagai public service maka persepsi aparatur pemerintah daerah tentang pelayanan terhadap masyarakat merupakan suatu kunci dalam memberikan kejelasan arah, semakin baik persepsi aparatur pemerintah akan semakin baik pula penyelenggaraan pemerintahan begitu juga sebaliknya. Menurut Devas (1989) Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Tanggung jawab Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada lembaga, Pemerintah Pusat, DPRD, Kepala Daerah dan masyarakat umum.
- b. Mampu memenuhi kewajiban keuangan Keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan.
- c. Kejujuran hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang benar-benar jujur dan dapat dipercaya.
- d. Hasil guna dan daya guna merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah-rendahnya dan

dalam waktu yang secepat-cepatnya.

- e. Pengendalian Aparat pengelola keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai.

Konsep dan Pengertian Efisiensi

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, efisiensi adalah hubungan antara masukan dan keluaran, efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintahan dapat mencapai manfaat tertentu. Efisiensi juga mengandung beberapa pengertian antara lain :

1. Efisiensi pada sektor hasil dijelaskan dengan konsep masukan- keluaran (input output)
2. Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan pengorbanan seminimal mungkin; atau dengan kata lain suatu kegiatan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran dengan biaya yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan.
3. Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai dengan memperhatikan aspek hubungan dan tatakerja antar instansi pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi dan keanekaragaman suatu daerah.

Faktor penentu efisiensi adalah : a) teknologi pelaksanaan pekerjaan; b) struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan baik itu struktural maupun

fungsional; c) sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan; d) dukungan kepada aparatur dan pelaksanaannya baik pimpinan maupun masyarakat; e) pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud.

Konsep dan Pengertian Efektivitas

Pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, dalam bahasa sederhana hal tersebut dapat dijelaskan bahwa : efektifitas dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Indikator efektifitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program (Mardiasmo 2009:132).

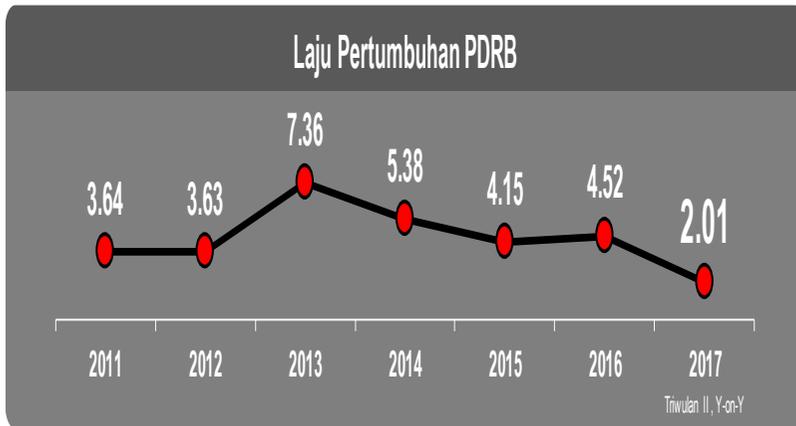
ANALISIS EKONOMI REGIONAL

Indikator Makroekonomi Fundamental

Ekonomi Papua Barat berkembang sesuai dengan pemanfaatan sumber daya ekonomi. Sumber daya ekonomi tersebut antara lain tanah Papua yang kaya dengan kandungan mineral dan subur. Selain itu, sumber daya tenaga kerja. Meski jumlah penduduk Papua Barat terbilang kecil, tetapi tenaga kerja yang ada merupakan sumber daya ekonomi yang mampu menghasilkan berbagai macam produk. Sumber daya ekonomi lainnya adalah modal (*capital*). Ketiga sumber daya ekonomi tersebut dikenal juga sebagai faktor produksi. Faktor produksi tenaga kerja mampu merubah bahan baku menjadi bahan lain yang bernilai lebih tinggi atau mampu memberi nilai tambah (*value added*). Total seluruh nilai tambah yang terbentuk itulah yang disebut dengan produk domestik bruto yang di tingkat daerah dikenal sebagai produk domestik regional bruto atau PDRB.

PDRB dinilai berdasarkan dua harga, harga berlaku saat ini dan harga pada tahun dasar (konstan). PDRB atas dasar harga konstan sesungguhnya adalah PDRB atas dasar harga berlaku yang dihilangkan pengaruh dari perubahan harga sehingga perubahan PDRB yang terbentuk antara dua waktu menunjukkan pertambahan nilai volume barang dan jasa bukan karena perubahan nilai yang disebabkan perubahan harga. Karenanya, tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dari perubahan PDRB atas dasar harga konstan.

Pada triwulan II 2017, total PDRB Papua Barat senilai 16,78 triliun rupiah (atas dasar harga berlaku). Nilai PDRB tersebut setara dengan 0,5 persen dari total PDB Indonesia yang mencapai 3.366,8 triliun rupiah. Nilai PDRB atas dasar harga konstan sebesar 13,30 triliun rupiah. Dibanding triwulan II 2016, pertumbuhan ekonomi (*year on year*) hanya 2,01 persen, lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2017 yang mencapai 3,62 persen. Pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada triwulan II 2017 mengalami perlambatan dalam arti masih terdapat pertumbuhan nilai tambah produk tetapi dibandingkan pertumbuhan triwulan I 2017, pertumbuhan nilai tambah produk tersebut masih lebih rendah.



Gambar 6. Laju Pertumbuhan PDRB Papua Barat 2011 - 2017

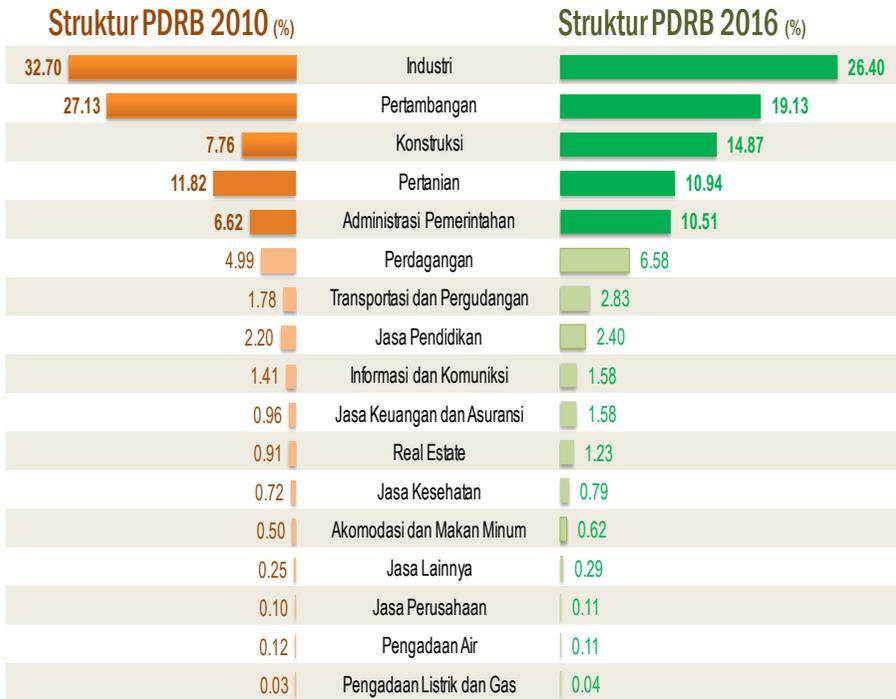
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2011 – 2017

Selama periode 2011 – 2017, pertumbuhan ekonomi Papua Barat cenderung melambat. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2017 terendah selama enam tahun terakhir.

PDRB Papua Barat sangat bergantung kepada industri pengolahan gas dari LNG Tangguh. Setiap kali LNG tangguh mengurangi kapasitas produksinya setiap kali itu pula pertumbuhan ekonomi Papua Barat mengalami perlambatan. Analisis selanjutnya menguraikan pertumbuhan ekonomi Papua Barat yang diuraikan berdasarkan PDRB menurut lapangan usaha dan PDRB menurut pengeluaran.

Struktur PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha

Struktur perekonomian Provinsi Papua Barat selama periode tahun 2010 hingga 2016 menunjukkan pergeseran kontribusi perekonomian. Pada tahun 2010 perekonomian Papua Barat didominasi oleh kategori Industri Pengolahan (32,70 persen); Pertambangan dan Penggalian (27,13 persen); dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (11,82 persen); Konstruksi (7,76 persen); dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (6,62 persen).



Gambar 7. Struktur Ekonomi Papua Barat Tahun 2010 dan 2016

Sumber: BPS (Data Diolah)

Pada tahun 2016 lima kategori perekonomian yang mempunyai kontribusi terbesar di Papua Barat adalah Industri Pengolahan (26,40 persen); Pertambangan dan Penggalian (19,13 persen); Konstruksi (14,87 persen); Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (10,94 persen); dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (10,51 persen).

Kategori Industri Pengolahan dan Pertambangan dan Penggalian sangat mendominasi struktur perekonomian Papua Barat sejak tahun 2010. Adanya komoditas minyak

dan gas bumi (migas) pada dua kategori lapangan usaha tersebut menyumbang lebih dari separuh PDRB Papua Barat. Komoditas migas dimaksud adalah gas alam cair atau Liquid Netrolium Gas (LNG) yang diproduksi oleh LNG Tangguh.



Gambar 8. British Petroleum (BP) Berau Ltd Proyek L\Kilang LNG Tangguh Train 3 di Teluk Bintuni

LNG Tangguh merupakan proyek multinasional yang meliputi pengembangan enam ladang gas yakni: Wiriagar, Berau dan Muturi di Teluk Bintuni, Papua Barat. Proyek LNG Tangguh mulai dibangun sesuai dengan persetujuan akhir dari Pemerintah Republik Indonesia dan partner pada bulan Maret 2005. Pengapalan komersial perdana proyek ini pada akhir kwartal ke-2 tahun 2009. Proyek ini meliputi kegiatan pengeboran gas dari enam lapangan untuk menarik

cadangan gas sekitar 14,4 triliun kaki kubik melalui dua anjungan lepas pantai yang terletak di Teluk Bintuni.

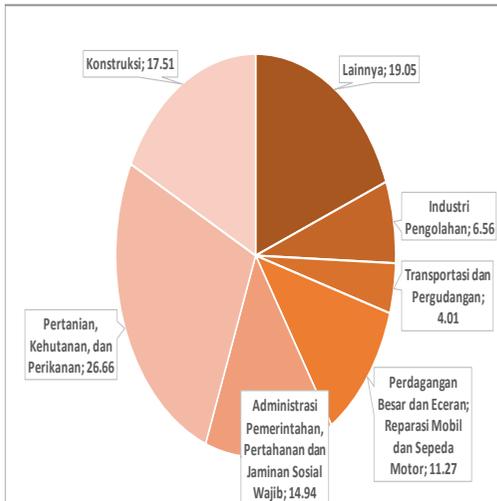
Peran kategori industri pengolahan dan pertambangan dan galian begitu besar terhadap pembentukan PDRB. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 sempat menyentuh angka 46,6 persen. Pertumbuhan tertinggi sejak Provinsi Papua Barat definitif sebagai daerah otonom baru. Setelah tahun 2010, pertumbuhan ekonomi Papua Barat terus melambat seiring dengan stagnasi produk gas alam cair LNG Tangguh. Terlebih dengan dikeluarkannya Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada Pasal 170 dinyatakan bahwa pemegang Kontrak Karya wajib melakukan pemurnian mineral dalam negeri dalam jangka waktu 5 tahun sejak diundangkannya Undang-undang tersebut. Akibatnya, meski lapangan usaha Industri Pengolahan dan Pertambangan dan Penggalian masih mendominasi perekonomian Papua Barat tetapi besaran kontribusi dua kategori lapangan usaha ini hingga tahun 2016 semakin berkurang.

Faktor lain yang mempengaruhi penurunan kontribusi Industri Pengolahan dan Pertambangan dan Penggalian pada tahun 2016 karena semakin tingginya pertumbuhan kategori lapangan usaha lainnya. Kategori Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi.

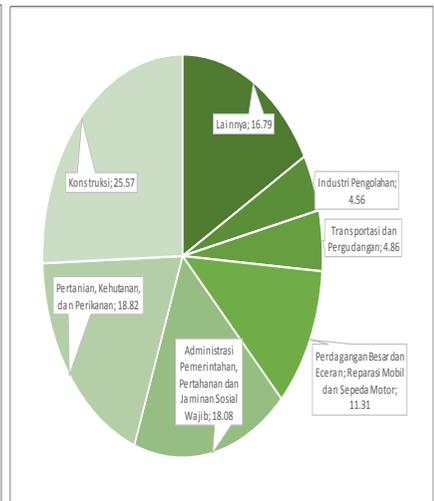
Pergeseran struktur perekonomian Papua Barat juga terjadi pada pembentukan PDRB tanpa migas. Pada tahun 2010, struktur perekonomian Papua Barat didominasi oleh

kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (26,66 persen); Konstruksi (17,51 persen); Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (14,94 persen); Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (11,27 persen); Industri Pengolahan (6,56 persen). Pada tahun 2016, kategori Konstruksi menjadi penyumbang terbesar PDRB Papua Barat yaitu sebesar 25,57 persen diikuti oleh kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (18,82 persen); Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (18,08); Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (11,31); dan Transportasi dan Pergudangan (4,86 persen).

Struktur PDRB 2010 (%)



Struktur PDRB 2016 (%)



Gambar 9. Struktur PDRB Tanpa Migas Tahun 2010 dan 2016
Sumber: BPS (Data Diolah)

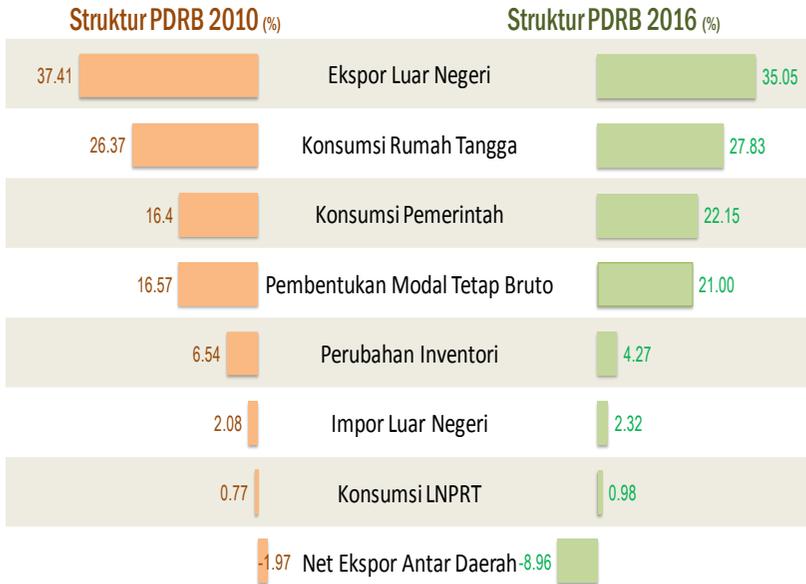
Kontribusi kategori konstruksi yang sangat dominan pada pembentukan struktur perekonomian Papua Barat tahun 2016 mengindikasikan beberapa hal berikut. Pertama, pembangunan infrastruktur kantor-kantor pemerintahan, jalan-jalan penghubung antar kabupaten, bandara, pelabuhan serta pembangunan-pembangunan lainnya terus menerus dilakukan sampai saat ini. Kedua, pembiayaan pembangunan infrastruktur didominasi oleh pemerintah. Hal ini terkait dengan 18,08 persen pembentukan PDRB tanpa migas tahun 2016 disumbang oleh kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial.

Selain Konstruksi, Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap struktur perekonomian Papua Barat pada tahun 2016. Kontribusi kategori ini sebesar 18,82 persen pada tahun 2016. Urgensi pembangunan kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Papua Barat terkait dengan: 1) daya serap tenaga kerja tertinggi yaitu 39,50 persen pada tahun 2016; dan 2) Sasaran pembangunan nomor 25, 26, dan 27 RPJMD Provinsi Papua Barat tahun 2012 sampai dengan 2016 yaitu terwujudnya ketahanan pangan wilayah dengan peningkatan produktivitas pertanian, perikanan, dan peternakan; meningkatnya kegiatan perkebunan rakyat; meningkatnya pemanfaatan sumber daya hutan.

Struktur dan Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran

PDRB menurut pengeluaran terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga, konsumsi akhir LNPR, konsumsi akhir pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor

neto (ekspor dikurangi impor). Dengan mengetahui struktur PDRB dari sisi pengeluaran maka akan diketahui pula peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.



Gambar 10. Struktur PDRB Pengeluaran Tahun 2010 dan Tahun 2016

Sumber: BPS (Data Diolah)

PDRB Papua Barat pada tahun 2016 mencapai 66,64 triliun rupiah. Dari total PDRB tersebut terdapat empat komponen pengeluaran terbesar yang membentuknya, yakni pengeluaran ekspor ke luar negeri mencapai 23,36 triliun rupiah (35 %), pengeluaran konsumsi rumah tangga mencapai 18,54 triliun rupiah (27%), pengeluaran konsumsi pemerintah mencapai 14,76 triliun rupiah (22 %),

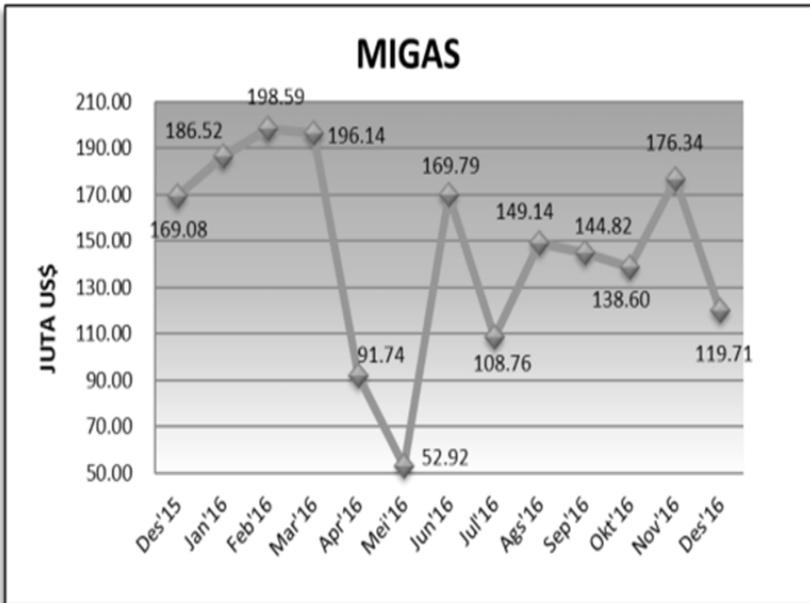
pembentukan modal tetap bruto mencapai 13,99 triliun rupiah (21 %), sedangkan net ekspor antar daerah defisit - 5,97 triliun rupiah.

Selama tahun 2010–2016 terdapat pergeseran distribusi komponen pengeluaran PDRB. Pergeseran terbesar terdapat pada komponen pengeluaran pemerintahan dan pembentukan modal tetap bruto. Pada tahun 2010, share komponen pengeluaran pemerintah 16,40 persen dari total PDRB sebesar 41,36 triliun rupiah. Pada tahun 2016, share komponen ini bertambah 5,75 poin menjadi 22,15 persen dari total PDRB sebesar 66,64 triliun rupiah. Seiring dengan penambahan kontribusi komponen pengeluaran pemerintah ini diikuti oleh penambahan share komponen pengeluaran untuk pembentukan modal tetap bruto dari 16,57 persen pada tahun 2010 menjadi 21 persen pada tahun 2016.

Besarnya share komponen pengeluaran pemerintah dan pembentukan modal bruto selama tahun 2010–2016 berkaitan dengan fokus pembangunan fisik di Provinsi Papua Barat. Kantor Gubernur Papua Barat berlantai 5 yang terletak di bukit Arfai II, Manokwari, diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Senin, 19 Oktober 2015. Kantor dengan luas 26.663 meter persegi tersebut dibangun menggunakan anggaran tahun jamak selama 12 tahun yang mencapai hampir setengah triliun atau 445 miliar rupiah. Demikian juga dengan proyek pembangunan jalan trans Papua Barat – Papua turut berkontribusi pada besarnya pengeluaran konsumsi pemerintah sekaligus pembentukan modal tetap bruto. Jalan Trans-Papua adalah jalan nasional yang menghubungkan Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua, membentang dari Kota Sorong di Provinsi Papua

Barat hingga Merauke di Provinsi Papua dengan total panjang mencapai 4.330,07 kilometer (km). Dari total panjang tersebut, terbagi atas 3.259,45 km di Provinsi Papua dan 1.070,62 km di Provinsi Papua Barat. Alokasi untuk Papua Barat, pada tahun 2015 untuk alokasi infrastruktur jalan dan jembatan Rp 2,48 triliun. Tahun 2016 alokasi Papua Barat sebesar Rp 1,28 triliun untuk infrastruktur jalan dan jembatan.

Peran komponen ekspor dalam pembentukan PDRB Pengeluaran di Papua Barat sangat dominan. Komoditas unggulan yang menjadi barang ekspor antara lain gas alam cair; Kakao, Coklat Bijih, Kerak, dan Abu Logam; Perhiasan atau permata; Kayu, barang dari Kayu; dan Ikan dan Udang. Total ekspor Papua Barat pada tahun 2016 mencapai 45,38 triliun rupiah. Ekspor terbesar berupa gas alam cair. Tiga negara tujuan utama ekspor Papua Barat adalah Jepang, Tiongkok dan Korea Selatan. Sebesar 99,81 persen ekspor Papua Barat bersumber dari migas. Perkembangan ekspor migas selama tahun 2016 pada Gambar 11.



Gambar 11. Ekspor Migas Papua Barat Tahun 2016 (Juta US\$)

Sumber: BPS (Data Diolah)

Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

PDRB per kapita adalah rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk di suatu wilayah selama satu tahun. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Trend PDRB per kapita di Provinsi Papua Barat dapat dilihat pada Tabel 1, terlihat bahwa PDRB per kapita Provinsi Papua Barat mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2012, PDRB atas dasar harga berlaku per kapita Provinsi Papua Barat adalah sebesar Rp 58,76 juta per orang, kemudian meningkat menjadi Rp 74,59 juta per orang pada tahun 2016. PDRB per kapita tersebut tampak sangat besar. Hal ini disebabkan karena dominasi PDRB Papua Barat adalah dari kategori industri pengolahan di mana salah satu sumber utamanya adalah produksi gas dari LNG tangguh. PDRB per kapita dengan menyertakan Migas di dalamnya menghasilkan indikator semu karena tidak menggambarkan kemakmuran masyarakat Papua Barat seutuhnya.

Tabel 1. PDRB ADHB Per Kapita Papua Barat Tahun 2012 – 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Penduduk	806.995	828.293	849.809	871.510	893.362
PDRB Dengan Migas ADHB (Juta Rupiah)	47.421.091	52.997.659	58.180.964	62.889.889	66.635.513
PDRB Tanpa Migas ADHB (Juta Rupiah)	23.151.730	26.637.142	30.670.155	34.900.590	38.736.574
PDRB Dengan Migas ADHB Per Kapita (Juta Rupiah)	58,76	63,98	68,46	72,16	74,59
PDRB Tanpa Migas ADHB Per Kapita (Juta Rupiah)	28,69	32,16	36,09	40,05	43,36

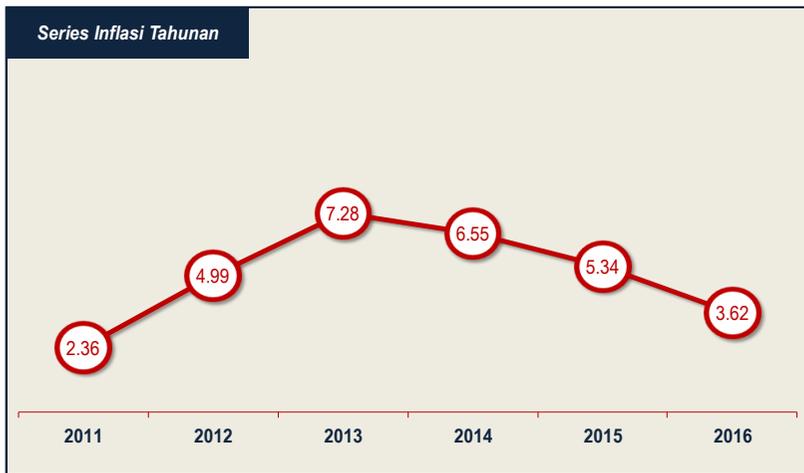
Sumber: BPS (Data Diolah)

Dengan meniadakan pengaruh migas pada PDRB atas dasar harga berlaku, PDRB per kapita Papua Barat tidaklah sebesar di atas. PDRB per kapita tahun 2016 terkoreksi menjadi 43,36 juta rupiah per orang per tahun. Terdapat selisih hingga 31,23 juta rupiah per kapita per tahun antara PDRB per kapita dengan migas dan tanpa migas. Hal ini menandakan bahwa investasi yang bersumber dari penanaman modal asing mendongkrak PDRB sangat besar tetapi kurang berdampak pada peningkatan tingkat kesejahteraan penduduk.

Inflasi

Inflasi dalam arti sempit bermakna kenaikan harga barang dan jasa secara rata-rata. Inflasi erat kaitannya dengan fenomena interaksi antara *supply* dan *demand*. Keduanya dipengaruhi banyak hal seperti distribusi barang, tata kelola perdagangan, dan regulasi pemerintah. Umumnya, inflasi disebabkan oleh tiga hal. Pertama, inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi *supply* (*cost push inflation*); Kedua, inflasi karena tekanan dari sisi permintaan (*demand pull inflation*); Ketiga, inflasi yang dipengaruhi jumlah uang yang beredar. Faktor-faktor terjadinya *cost push inflation* dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara mitra dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (*administered price*), dan terjadi *negative supply shocks* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Faktor penyebab terjadi *demand pull inflation* adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap

ketersediaannya. Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan oleh *output* riil yang melebihi *output* potensialnya atau permintaan total (*aggregate demand*) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian (Bank Indonesia, 2016). *Monetary inflation* adalah inflasi karena peningkatan jumlah uang beredar misalnya dengan cara pencetakan uang baru dan beredarnya kembali uang lama (BPS, 2016).



Gambar 12. Inflasi Tahunan Provinsi Papua Barat Tahun 2011 - 2016

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2011 – 2016

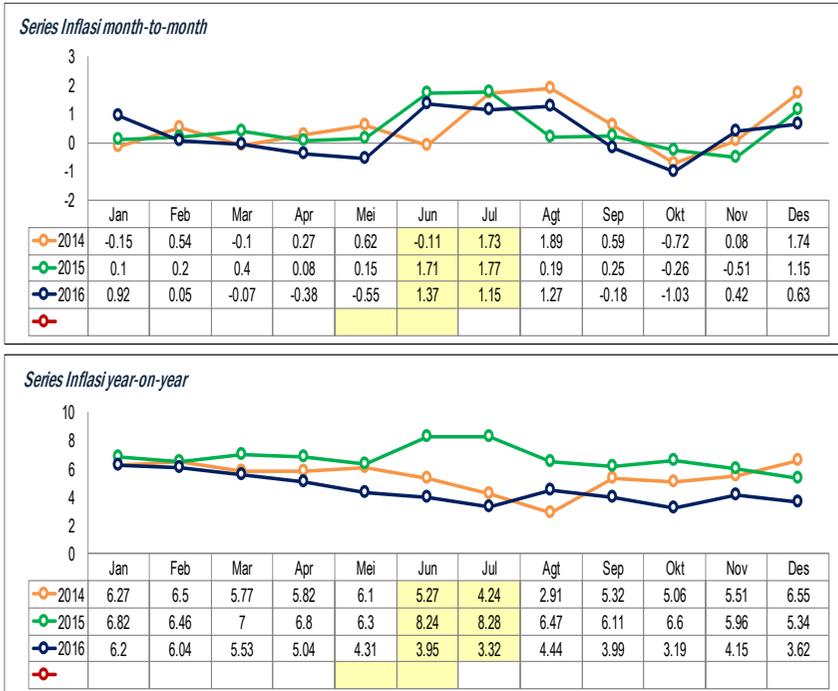
Menurut tingkat keparahannya, inflasi dibagi menjadi 4 kategori yaitu inflasi ringan (< 10 persen per tahun); inflasi sedang (10-30 persen per tahun); inflasi berat (30-100 persen per tahun); dan inflasi sangat berat/hiperinflasi (> 100 persen per tahun). Menteri Keuangan RI menerbitkan Permenkeu RI Nomor 93/PMK.011/2014 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2016, 2017 dan 2018 sebesar 4; 4; dan 3,5 dengan deviasi 1.

Penetapan sasaran inflasi ini dimaksudkan untuk memberikan batas toleransi inflasi yang masih mendukung pertumbuhan ekonomi.

Selama periode 2011-2016, rata-rata inflasi tahunan di Provinsi Papua Barat tergolong ringan (kurang dari 10 persen). Laju inflasi tertinggi selama periode tersebut terjadi pada tahun 2013 yang hampir mencapai dua digit yaitu sebesar 7,28%, sedangkan inflasi terendah terjadi pada tahun 2011 yang hanya sebesar 2,36%. Menurut Bank Indonesia (2016), salah satu penyebab inflasi di Provinsi Papua Barat selain faktor ekspektasi inflasi tahunan yang terjadi pada saat menjelang hari keagamaan, juga disebabkan oleh sisi supply (*cost push inflation*) di mana terjadi *negative supply shocks* akibat terganggunya distribusi karena infrastruktur jalan yang belum merata di seluruh wilayah kabupaten/kota.

Gambar 13 menunjukkan laju inflasi bulanan yang terjadi di Provinsi Papua Barat selama periode 2014-2016. Secara umum terlihat bahwa terjadi pengulangan tren setiap triwulan di setiap tahunnya walaupun tidak 100% sama. Pada triwulan pertama dan kedua tingkat inflasi terkontrol antara -0,5% hingga 0,5%, walaupun terjadi penyimpangan pada bulan Januari 2016 dimana tingkat inflasi pada bulan tersebut adalah sebesar 0,92%. Memasuki triwulan ketiga, inflasi cenderung tinggi dan mencapai puncaknya pada bulan Juni - Agustus, yaitu sebesar 1,89% di bulan Agustus 2014; 1,77% pada Juli 2015 dan 1,37% di bulan Juni 2016. Diprediksi hal tersebut merupakan *seasonal effect* akibat hari raya lebaran yang menyebabkan rata-rata harga barang dan jasa naik. Memasuki awal triwulan keempat terjadi deflasi yang cukup tinggi di ketiga tahun tersebut, dimana tingkat

inflasi turun pada level lebih dari -0,5% dan mencapai titik terendah pada Oktober 2016 di level -1,03%. Hingga akhirnya pada bulan Desember tingkat inflasi kembali naik di atas 0,5%.



Gambar 13. Inflasi Bulanan dan Tahunan Papua Barat Tahun 2014 – 2016

Sumber: BPS (Data Diolah)

Inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia dikelompokkan ke dalam 7 kelompok pengeluaran (berdasarkan *the Classification of individual consumption by purpose-COICOP*), yaitu: kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, minuman, dan tembakau, kelompok

perumahan, kelompok sandang, kelompok kesehatan, kelompok pendidikan dan olah raga, dan kelompok transportasi dan komunikasi. Inflasi masing-masing kelompok tersebut selengkapnya disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Inflasi Tahunan Papua Barat Tahun 2014 - 2016

Kelompok Pengeluaran	Tahun		
	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
UMUM	6,55	5,34	3,62
Bahan Makanan	6,57	9,61	3,44
Makanan Jadi,	7,29	11,68	5,17
Perumahan, Air, Listrik,	7,17	2,80	3,12
Sandang	0,90	2,47	1,22
Kesehatan	4,02	6,81	13,0
Pendidikan, Rekreasi,	2,68	-4,97	1,52
Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	8,81	-1,20	2,69

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016

Kesehatan merupakan kelompok yang paling dominan mendorong tingkat inflasi di Provinsi Papua Barat pada tahun 2016. Inflasi pada kelompok ini tergolong inflasi sedang karena berada di antara 10 – 30 persen setahun sementara inflasi pada enam kelompok lainnya tergolong ringan. Selama tahun 2014 – 2016, inflasi tahunan kelompok kesehatan selalu meningkat mulai 4,02 persen pada tahun 2014 menjadi 6,81 persen pada tahun 2015 dan 13,03 persen pada tahun 2016. Penyebab inflasi kesehatan di Papua Barat pada tahun 2016 adalah inflasi jasa kesehatan yang mencapai

24,17 persen dan perawatan jasmani dan kosmetik dengan inflasi tahunan sebesar 11,87 persen (BPS Provinsi Papua Barat, 2016).

Inflasi pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau merupakan inflasi tertinggi kedua setelah kesehatan. Inflasi tahunan kelompok ini pernah menyentuh level tertinggi di tahun 2014 dengan inflasi dua digit yaitu 11,68 persen meski pada tahun 2016 berada pada level 5,17 persen. Dilihat dari sub kelompoknya, inflasi kelompok ini didorong oleh sub kelompok minuman yang tidak beralkohol yang mencapai 11,16 persen pada tahun 2016.

Inflasi kelompok makanan pada tahun 2016 terbilang cukup rendah. Inflasi tahunan kelompok ini sebesar 3,44 persen lebih rendah daripada inflasi tahunan pada tahun sebelumnya yang menyentuh angka 9,61 persen. Dilihat dari sub kelompoknya, inflasi tahunan kelompok makanan didominasi oleh sub kelompok daging dan hasil-hasilnya dan sub kelompok bumbu-bumbuan. Inflasi tahunan sub kelompok daging dan hasil-hasilnya bahkan termasuk kelompok inflasi berat karena lebih dari 30 persen yaitu 30,48 persen. Inflasi tahunan sub kelompok bumbu-bumbuan mencapai 18,36 persen. Sebaliknya, perubahan indeks harga konsumen pada sub kelompok ikan diawetkan, ikan segar, dan kacang-kacangan mengalami deflasi yang sangat rendah dengan besaran deflasi masing-masing 13,44 persen; 12,44 persen dan 11,40 persen.

Inflasi tahunan pada kelompok pengeluaran lain berada di bawah level inflasi umum. Inflasi tahunan terendah pada tahun 2016 pada kelompok sandang yaitu 1,22 persen. Inflasi kelompok ini didominasi oleh inflasi sub kelompok sandang

wanita yang mencapai 4,41 persen. Sebaliknya, sub kelompok barang pribadi dan sandang lainnya mengalami deflasi sebesar 3,16 persen.

Indikator Pembangunan

Indeks Pembangunan Manusia

Sebelum tahun 1970-an, pembangunan dipandang hanya sebagai fenomena ekonomi saja (*Todaro dan Smith*). Pengalaman pada dekade tersebut menunjukkan adanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi gagal memperbaiki taraf hidup sebagian besar penduduknya. Oleh karena itu, pada tahun 1990 UNDP memperkenalkan ukuran pembangunan yang bersifat holistik, indeks pembangunan manusia dikenal dengan IPM.



Gambar 14. Tren IPM Papua Barat Tahun 2010 - 2016

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016

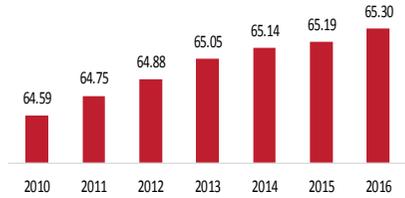
IPM mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar. Pertama, *A Long and Healthy Life* (umur panjang dan hidup sehat); kedua, *knowledge* (pengetahuan); dan ketiga, *A Decent Standard of Living* (standard hidup layak). Jika pada era pra 1970-an, keberhasilan pembangunan diukur hanya dari aspek pertumbuhan ekonomi semata, setelah lahirnya IPM, keberhasilan pembangunan juga diukur dari capaian IPM-nya. Masih ada wilayah di mana pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi capaian IPM rendah.

Tren capaian IPM Papua Barat pada tahun 2016 dapat diamati pada Gambar 14. Meski IPM Papua Barat meningkat tetapi Papua Barat masih berada pada kelompok IPM sedang, kelompok IPM antara 60 sampai dengan 70. Di tingkat nasional, IPM Papua Barat berada pada peringkat kedua terendah setelah Provinsi Papua. Capaian IPM Papua Barat pada tahun 2016 sebesar 62,21 yang terdiri dari AHH 65,30 tahun, rata-rata lama sekolah 7,06 tahun, harapan lama sekolah 12,26 tahun dan pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan sebesar 7.175.000 rupiah. IPM Papua Barat selama tahun 2010 sampai dengan 2016 rata-rata tumbuh 0,72 persen per tahun. Pertumbuhan IPM dari tahun 2015 ke tahun 2016 sebesar 0,77 persen.



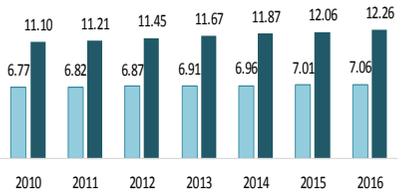
Angka Harapan Hidup saat Lahir (tahun)

Tahun 2010-2016 rata-rata tumbuh **0,18 persen** per tahun



Harapan Lama Sekolah (HLS) (tahun)

Tahun 2010-2016 rata-rata tumbuh **1,78 persen** per tahun



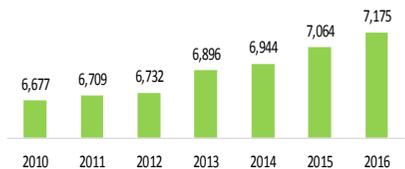
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (tahun)

Tahun 2010-2016 rata-rata tumbuh **0,69 persen** per tahun



Pengeluaran Per Kapita/tahun Disesuaikan (Ribu Rupiah)

Tahun 2010-2016 rata-rata tumbuh **1,21 persen** per tahun

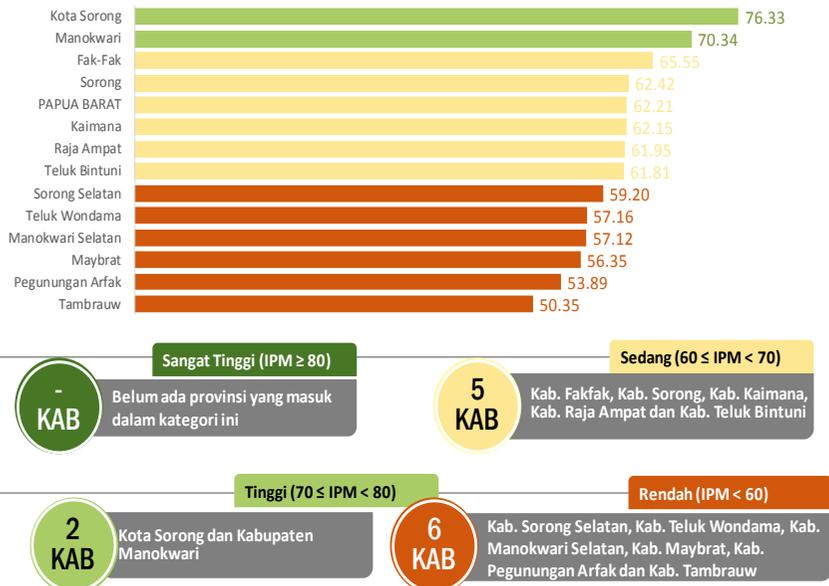


Gambar 15. Tren Komponen IPM Papua Barat Tahun 2010 - 2016

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016

Meningkatnya IPM disebabkan oleh peningkatan pada semua komponen pembentuk indeks. Angka harapan hidup rata-rata tumbuh 0,18 persen per tahun selama tahun 2010 sampai dengan 2016. Harapan lama sekolah rata-rata tumbuh 1,78 persen per tahun pada periode yang sama. Kecepatan pertumbuhan Harapan Lama Sekolah (HLS) tercatat paling menonjol di antara tiga komponen lain. Rata-rata sekolah dan pengeluaran per kapita yang di sesuaikan rata-rata tumbuh 0,69 persen dan 1,21 persen per tahun.

Disparitas IPM di Papua Barat sangat tinggi antar kabupaten/kota. Tahun ini, IPM Kabupaten Manokwari berubah status dari IPM sedang menjadi IPM tinggi. Dengan demikian, Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong adalah dua wilayah dengan IPM tinggi di Papua Barat. Lima kabupaten lain yaitu: Kab. Fakfak, Kab. Sorong, Kab. Kaimana, Kab. Raja Ampat dan Kab. Teluk Bintuni termasuk kelompok IPM sedang. Enam kabupaten sisanya masih terperosok dalam kelompok IPM rendah (Gambar 16). Nilai IPM terendah Kabupaten Tambrauw yaitu 50,35 dan tertinggi Kota Sorong yaitu sebesar 76,33. Jarak capaian IPM kedua wilayah tersebut sangat besar.



Gambar 16. Capaian IPM Menurut Kabupaten/Kota di Papua Barat Tahun 2016

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016

Perbedaan capaian IPM kabupaten/kota yang sangat variatif di Papua Barat sangat erat kaitannya dengan perbedaan capaian pembangunan. Pertama, nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kota Sorong pada tahun 2016 mencapai 12,4 triliun rupiah sementara Kabupaten Tambrauw hanya 175 miliar rupiah. Artinya, total produk yang dihasilkan seluruh penduduk kedua wilayah ini berbeda 70 kali. Efeknya, rata-rata pendapatan setiap penduduk Kota Sorong mempunyai pendapatan 53,24 juta rupiah per tahun sementara rata-rata pendapatan setiap penduduk Kabupaten Tambrauw hanya 12,78 juta rupiah per tahun. Dengan pendapatan per kapita per tahun sebesar itu adalah wajar jika Kota Sorong menempati peringkat pertama IPM di Papua Barat dari aspek standar hidup layak.

Kedua, ketersediaan layanan kesehatan dan pendidikan di Kota Sorong terlengkap dan termaju di Papua Barat. Kota Sorong dilengkapi dengan rumah sakit, 8 puskesmas dari 10 distrik yang ada, 3 balai kesehatan, 5 polindes lengkap dengan 441 tenaga kesehatannya. Bandingkan dengan Kabupaten Tambrauw yang hanya memiliki 12 puskesmas dari 12 distrik, 11 pustu dan 63 tenaga kesehatan dengan kondisi geografis yang sangat sulit (*remote area*). Demikian juga dengan fasilitas pendidikan lengkap mulai dari 49 TK, 81 SD, 36 SMP hingga ke 11 perguruan tinggi. Sementara Kabupaten Tambrauw hanya ada 6 TK, 48 SD, 12 SMP, 5 SMU, dan 2 SMK. Keterbatasan fasilitas pendidikan dan kesehatan ini berdampak pada hilangnya *opportunitiy* dan akses masyarakat di daerah *remote* untuk memperoleh hak dasar pendidikan dan kesehatan. Akibatnya, harapan lama sekolah di Kabupaten Tambrauw tiga tahun lebih singkat

daripada di Kota Sorong yang sudah mencapai 14 tahun. Demikian juga dengan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tambrau, 6,21 tahun lebih pendek daripada Kota Sorong yang mencapai hampir 11 tahun. Hendril L Blum, 20 persen derajat kesehatan ditentukan oleh layanan kesehatan.

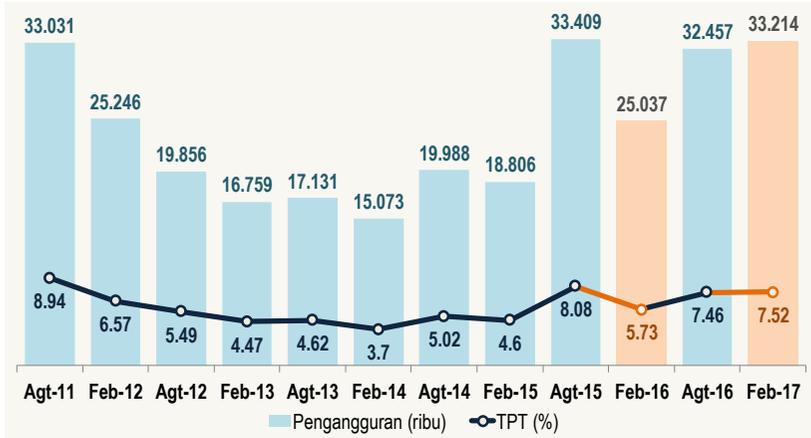
Ketenagakerjaan

Pertumbuhan ekonomi Papua Barat 4,15 persen pada tahun 2016. Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar itu diharapkan mampu menciptakan perubahan dan perbaikan-perbaikan di masyarakat, khususnya pengurangan tingkat pengangguran dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, pertumbuhan yang ada diharapkan mampu menyertakan sebanyak-banyaknya angkatan kerja ke dalam tenaga kerja yang berkualitas. Hal ini ditandai dengan tingginya daya serap sektor formal, meningkatnya serapan tenaga kerja terdidik, kualitasnya jam kerja dan mendorong pemerataan pendapatan khususnya pada kelompok 40 persen terbawah sehingga mampu menekan kesenjangan yang ada.

Mengurangi Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Papua Barat ditargetkan mencapai 4,6 persen pada tahun 2017 dan 4,1 persen pada tahun 2019 (Buku III RPJMN 2015–2019 halaman 2-8). Memperhatikan TPT Februari 2017 yang masih bertengger di 7,52 persen, target penurunan TPT untuk Papua Barat di dalam RPJMN 2015–2019 hingga 4,1 persen di tahun 2019 terlalu optimistik. TPT terendah yang pernah

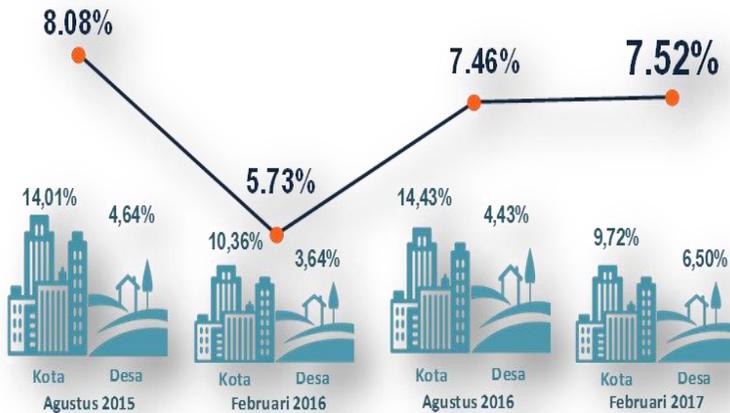
dicapai Papua Barat adalah 3,7 persen pada Februari 2014. Sejak saat itu, tren TPT Papua Barat menunjukkan kenaikan dan mencapai puncaknya yaitu 8,08 persen pada Agustus 2015.



Gambar 17. Tren Pengangguran Papua Barat 2011 – 2017

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2011 – 2017

Pengangguran di Papua Barat lebih didominasi oleh tingginya tingkat pengangguran di perkotaan. Tren pengangguran pada periode 2015–2017 menunjukkan TPT di perkotaan selalu lebih tinggi daripada TPT di perdesaan. Tingginya pengangguran di perkotaan disebabkan oleh kenaikan tingkat pendidikan yang ditamatkan. Pencari kerja di perkotaan didominasi oleh angkatan kerja yang berpendidikan SMP dan SMA. Pada tahun 2016, TPT untuk kelompok angkatan kerja dengan pendidikan SMA mencapai 21,13 persen dan untuk kelompok SMP mencapai 14,01 persen. Sementara TPT untuk angkatan kerja dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi hanya 6,76 persen.



Gambar 18. TPT Menurut Wilayah di Papua Barat Tahun 2015 - 2017

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2015–2017

Rendahnya pengangguran di perdesaan disebabkan oleh tingginya sektor pertanian dalam menyerap angkatan kerja. Sebanyak 49,25 persen tenaga kerja di perdesaan dan hanya 5,63 persen tenaga kerja di perkotaan terserap di sektor pertanian. Profil tenaga kerja di sektor pertanian identik dengan *uneducated worker*, karena itu angkatan kerja yang terdidik lebih memilih mencari pekerjaan di perkotaan daripada bekerja sebagai petani.

Selain itu, pengangguran di Provinsi Papua Barat didominasi oleh pencari kerja pada kelompok usia muda. TPT tertinggi pada kelompok usia 15–19 tahun yaitu sebesar 26,32 persen; kelompok usia 20–24 tahun sebesar 19,95 tahun; dan kelompok usia 25–29 tahun 10,73 tahun. Dengan

demikian profil tenaga pengangguran di Papua Barat mayoritas berada pada kelompok pemuda. TPT kelompok usia 20–24 tahun di perkotaan bahkan mencapai 41,09 persen.

Persoalan lain pengangguran adalah menyangkut kesenjangan gender. Dari TPT Papua Barat pada angka 7,46 persen, TPT perempuan lebih tinggi daripada TPT laki-laki dengan besaran masing-masing 8,11 persen dan 7,12 persen. Dengan kata lain, lapangan kerja yang ada belum mampu memberikan kesempatan yang seimbang dari aspek gender.

Berdasarkan data dan fakta di atas, sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintah Papua Barat untuk menurunkan tingkat pengangguran adalah:

1. Meningkatkan penyediaan kesempatan kerja bagi angkatan kerja usia muda sesuai tingkat pendidikannya. Tantangan ini terkait dengan meningkatnya angkatan kerja usia muda akibat tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, juga terkait dengan lulusan muda (*fresh graduate*) yang langsung masuk sebagai angkatan kerja.
2. Meningkatkan produktivitas sektor dan sub-sektor kegiatan ekonomi dengan produktivitas rendah menjadi kegiatan ekonomi dengan produktivitas tinggi. Hal ini terkait dengan tingginya daya serap tenaga kerja sektor pertanian di satu sisi tetapi produktivitasnya tidak sepadan dengan besarnya tenaga kerja yang ada. Di sisi lain, sektor dengan produktivitas tinggi namun serapan tenaga kerjanya rendah.

3. Mewujudkan kesepakatan kerja yang berkeadilan gender. Kesempatan kerja yang ada saat ini masih condong untuk angkatan kerja pria. Angkatan kerja perempuan masih menghadapi stigma sebagai cadangan tenaga kerja sekunder apabila tenaga kerja laki-laki tidak didapatkan.
4. Menciptakan lapangan kerja yang mampu meredam arus urbanisasi. Meningkatnya tingkat pendidikan yang ditamatkan mengakibatkan sektor pertanian di perdesaan kurang diminati oleh angkatan kerja muda terdidik. Akibatnya, mereka berlomba-lomba mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya di perkotaan.

Menciptakan Tenaga Kerja Yang Berkualitas

Memperbanyak Tenaga Kerja di Sektor Formal

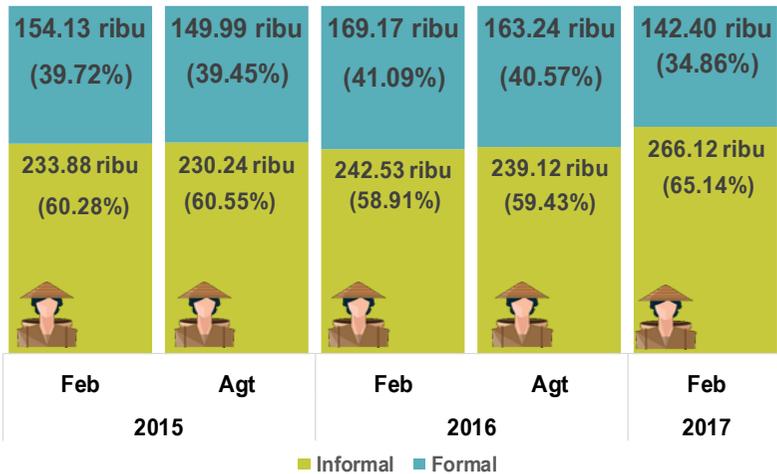
Pada saat program pembangunan belum mampu memberikan kesempatan kerja bagi angkatan kerja, sektor informal dengan segala keterbatasannya mengambil alih peran sebagai penyerap pencari kerja. Sektor informal lekat dengan ciri-ciri: menyerap tenaga kerja keluarga tak dibayar, kegiatan usaha mandiri, memanfaatkan teknologi sederhana, melayani kebutuhan menengah bawah, dan pendidikan dan kualitas tenaga kerja rendah. Kendati demikian, sektor informal menjadi benteng pertahanan di kala lapangan kerja yang ada sangat terbatas.

Pendekatan sederhana untuk menangkap fenomena tenaga kerja sektor formal dan informal melalui status pekerjaan utama. Status pekerjaan utama adalah kedudukan

seseorang dalam melakukan pekerjaan pada suatu unit usaha/pekerjaan utama (BPS). Sejak 2011, status pekerjaan utama dibagi menjadi tujuh status yaitu: 1) berusaha sendiri; 2) berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar; 3) berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar; 4) buruh/karyawan/pegawai; 5) pekerja bebas di pertanian; 6) pekerja bebas di non pertanian; 7) pekerja tidak dibayar. Definisi pekerja di sektor formal adalah mereka yang berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar dan mereka yang berstatus buruh/karyawan/pegawai. Sementara pekerja di sektor informal adalah mereka yang status pekerjaan utamanya selain status pekerjaan utama nomor 2) dan nomor 4) tadi. Idealnya, komposisi tenaga kerja yang seharusnya dominan adalah besarnya peran tenaga kerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar. Mereka inilah yang masuk kelompok “entrepreneur” atau “pengusaha” yang diharapkan mampu menjadi pelopor pergerakan perekonomian.

Hingga Februari 2017, peranan sektor informal di Papua Barat masih sangat dominan. Dari 408,52 ribu tenaga kerja, hanya 142,40 ribu tenaga kerja yang bekerja di sektor formal (34,86 %). Dengan kata lain, sekitar 65,14 persen tenaga kerja bekerja di sektor informal. Kontribusi “pengusaha” dalam sektor formal hanya 2,05 persen (8.395 orang) dari total tenaga kerja, sangat kecil, dan 32,80 persen pekerja sektor formal adalah buruh/karyawan/pegawai. Artinya, dari 915.361 jiwa penduduk Papua Barat pada tahun 2017, hanya 0,92 persen yang termasuk kelompok entrepreneur. Padahal seorang sosiolog, David McClelland, berpendapat, “Suatu negara bisa menjadi makmur bila ada

entrepreneur (pengusaha) sedikitnya 2% dari jumlah penduduknya”. Artinya, agar Papua Barat makmur dibutuhkan sedikitnya 18 ribu pengusaha yang berarti Papua Barat masih kekurangan 10 ribu pengusaha di tahun 2017. Dengan memanfaatkan data proyeksi penduduk, Papua Barat membutuhkan 19,6 ribu pengusaha di tahun 2020 nanti.

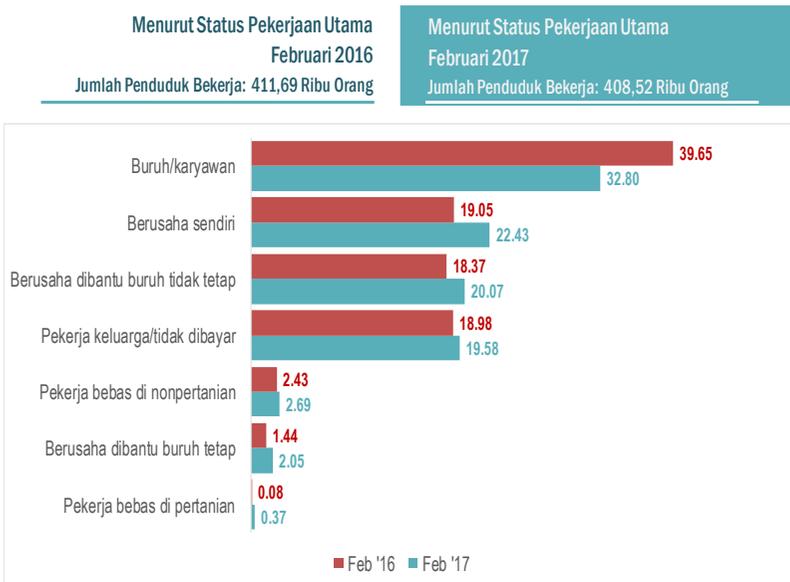


Gambar 19. Tenaga Kerja Menurut Sektor Formal/Informal di Papua Barat Tahun 2015 - 2017

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016

Tren tenaga kerja formal di Papua Barat selama 2015–2017 fluktuatif bahkan cenderung turun. Pada Februari 2015, tenaga kerja yang bekerja di sektor formal hampir 40 persen tetapi di Februari 2017 hanya sekitar 35 persen. Penopang utama sektor formal di Papua Barat adalah mereka yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Meski mengalami penurunan komposisi, tenaga kerja yang berstatus buruh/karyawan/pegawai pada Februari 2017 masih 32,80

persen lebih rendah dari Februari 2016 yang mencapai 39,65 persen. Sejak kebijakan moratorium CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) Menteri MENPAN Yuddy Crisnandi, 2015–2019, daerah yang belum besar membuka kesempatan kerja amat bergantung pada penerimaan aparat sipil negara (ASN) untuk mengurangi tingkat pengangguran. Demikian pula “mindset” yang ada pada penduduknya, mereka akan menganggap bahwa menjadi aparat sipil negara adalah tujuan akhir setelah lulus sekolah/kuliah. Hal ini menjadi tantangan pemerintah daerah untuk merubah mindset dari mental pegawai menjadi mental entrepreneur.

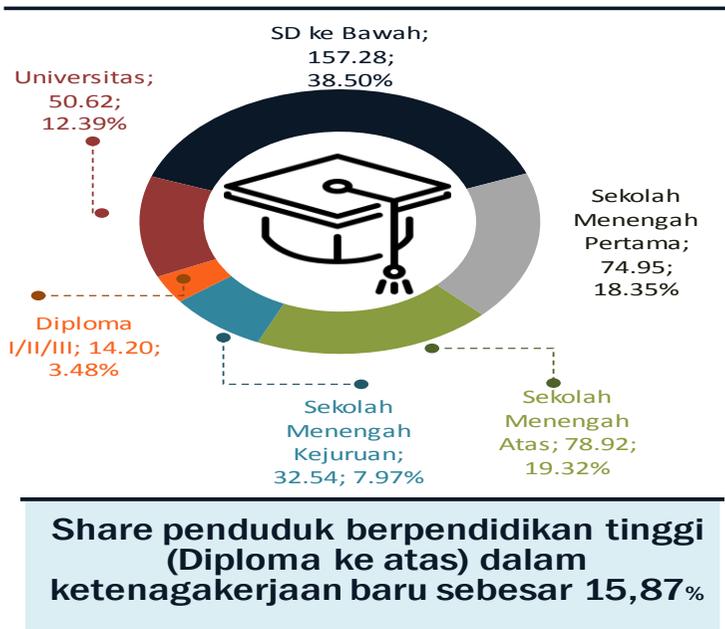


Gambar 20. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Papua Barat Tahun 2016 – 2017

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2017

Selain persoalan di atas, masalah lainnya adalah masih besarnya tenaga kerja yang tidak dibayar/pekerja keluarga. Biasanya, kelompok ini didominasi oleh pekerja perempuan. Data Sakernas 2016 menunjukkan, jumlah tenaga kerja perempuan dengan status tidak dibayar (42.658 orang) dua kali lebih tinggi daripada tenaga kerja laki-laki yang tidak dibayar (BPS Provinsi Papua Barat, 2016).

Meningkatkan Daya Serap Tenaga Kerja Terdidik

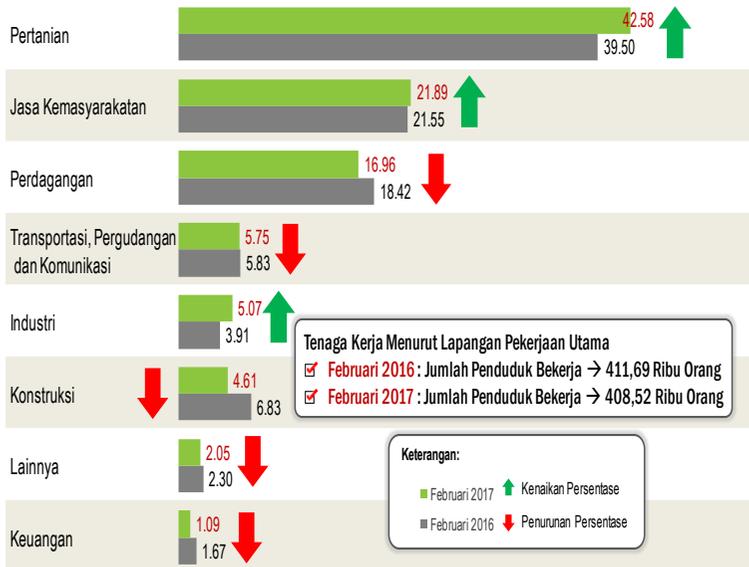


Gambar 21. Tenaga Kerja Menurut Pendidikan Tahun 2016

Tingginya tingkat pengangguran terbuka dari kelompok usia muda dan terdidik mengindikasikan masih ada gap antara output yang dihasilkan dunia pendidikan di

Papua Barat dan keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan dunia usaha. Share penduduk berpendidikan tinggi dalam ketenagakerjaan di Papua Barat tahun 2017 sebesar 15,87 persen. Sebaliknya, share penduduk dengan pendidikan SD atau lebih rendah dalam ketenagakerjaan masih sangat dominan yaitu sebesar 38,50 persen.

Gambar 22, berikut membuktikan bahwa sektor pertanian adalah lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Provinsi Papua Barat baik tahun 2016 maupun tahun 2017. Hasil Survei Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT) Tahun 2014 mencatat 38,40 persen petani padi di Papua Barat tamat SD dan 32,74 persen belum pernah mengecap bangku sekolah. Artinya, 71 persen petani padi di Papua Barat berpendidikan rendah. Hanya 1,98 persen petani padi yang pernah mengenyam pendidikan tinggi minimal Diploma I.



Gambar 22. Persentase Tenaga Kerja Menurut Lapangan Kerja Utama di Provinsi Papua Barat Tahun 2016 – 2017

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016 dan 2017.

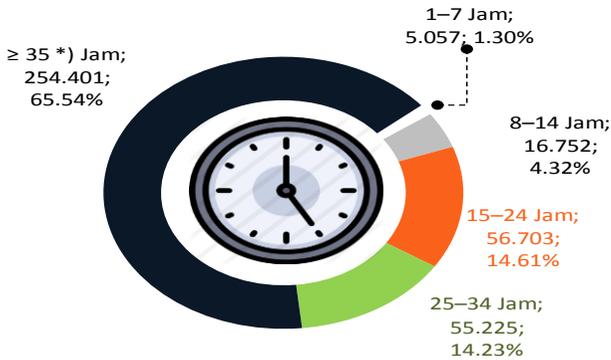
Selain sektor pertanian, jasa kemasyarakatan dan perdagangan adalah dua sektor lainnya yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Papua Barat. Tahun 2017, satu di antara lima pekerja bekerja di sektor jasa kemasyarakatan. Demikian juga dengan kondisi tahun 2016. Sektor jasa kemasyarakatan ini identik dengan aparat sipil negara (ASN). Kebanyakan pencari kerja sangat mendambakan bekerja sebagai ASN. Pengangkatan tenaga kerja sebagai ASN masih ditunda dengan dikeluarkannya moratorium CPNS pada tahun 2015 hingga 2019 nanti. Dengan kata lain, penerimaan CPNS di masa pemerintahan Jokowi sangat dibatasi.

Sejak diberlakukannya moratorium CPNS pada tahun 2015, banyak bermunculan perdagangan baru. Hasil Sensus Ekonomi 2016, jumlah usaha/pengusaha yang bergerak di sektor perdagangan sebanyak 39.993 usaha dengan serapan tenaga kerja sebanyak 70.806 orang. Secara keseluruhan, sektor perdagangan ini menyerap 16,96 persen tenaga kerja (BPS, Sakernas 2017) dan menempati sektor lapangan usaha dengan serapan terbanyak ketiga.

Jam Kerja

Jam kerja normal ditetapkan 35 jam per minggu. Tenaga kerja yang bekerja di bawah jam kerja normal disebut setengah pengangguran. Sebagian besar tenaga kerja di Papua Barat bekerja lebih dari 35 jam per minggu dengan 65,54 persen. Artinya, masih ada 34,46 persen tenaga kerja yang bekerja kurang dari jam kerja normal. Kelompok terakhir ini mengindikasikan fenomena setengah pengangguran.

Tingkat pengangguran terbuka Papua Barat sebesar 7,52 persen pada Februari 2017 sesungguhnya sebanding dengan tingkat kesempatan kerja sebesar 92,48 persen, sangat besar. Namun, di balik itu semua, kualitas jam kerja normal yang diharapkan belum tercapai. Masih ada tenaga kerja yang bekerja paruh waktu sebanyak 154.111 orang.



*) Termasuk sementara tidak bekerja

Sebagian besar penduduk bekerja, yaitu sekitar 254,4 ribu orang (65,54%) merupakan pekerja penuh (jam kerja minimal 35 jam per minggu)

Gambar 23. Tenaga Kerja Menurut Jam Kerja Tahun 2017

Ketimpangan (Gini Ratio)

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas ditandai oleh rendahnya tingkat ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencerminkan pertumbuhan produksi di berbagai sektor ekonomi. Namun, itu baru syarat cukup sebagai pendorong untuk mencapai tingkat kesejahteraan penduduk. Masih ada syarat perlu yaitu rendahnya ketimpangan yang mencerminkan bahwa hasil-hasil pembangunan dinikmati secara merata oleh semua penduduk.



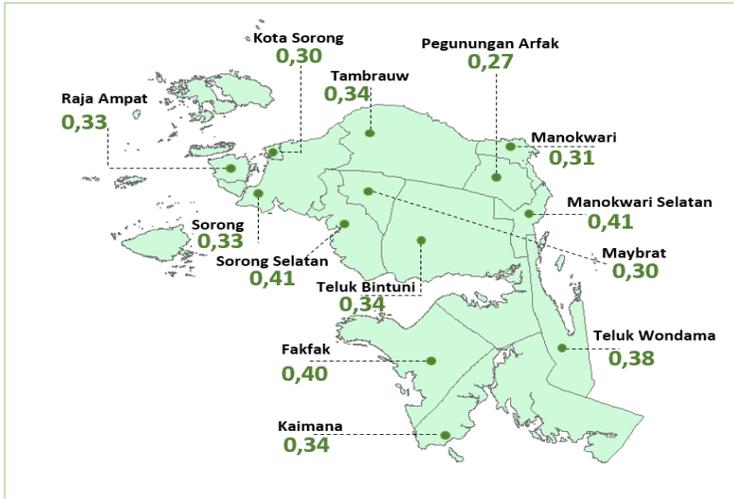
Gambar 24. Tren Gini Ratio Provinsi Papua Barat Tahun 2006 – 2017

Sumber: BPS, 2006 - 2017

Salah satu ukuran ketimpangan pendapatan adalah indeks gini atau gini ratio. Indeks ini bernilai antara nol (pemerataan sempurna) dan satu (ketimpangan sempurna). Nilai gini kurang dari 0,3 menandakan ketimpangan yang terjadi rendah. Artinya, hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh hampir semua golongan. Nilai gini antara 0,3 dan 0,5 mengindikasikan ketimpangan sedang yang bermakna bahwa hasil-hasil pembangunan lebih dominan dinikmati oleh kalangan menengah atas. Nilai gini di atas 0,5 patut dirisaukan karena dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan sangat buruk karena kondisi ketimpangan parah. Hasil-hasil pembangunan hanya dinikmati oleh kelompok atas. Sebagai catatan, nilai gini yang ada saat ini cermin ketimpangan pengeluaran sebagai proksi dari ketimpangan pendapatan. Hal ini disebabkan karena pelaporan pendapatan cenderung underestimate dibandingkan dengan pelaporan pengeluaran.

Pada awal Papua Barat berdiri sebagai daerah otonom, kesenjangan pengeluaran penduduk masih sangat rendah nilai gini saat itu masih di bawah 0,3. Seiring waktu berjalan, pertumbuhan ekonomi makin kencang, indeks gini mulai bergerak naik mulai dari 0,3 pada tahun 2006 menjadi 0,33 pada tahun 2007 dan naik menjadi 0,36 pada tahun 2008. Indeks gini pada tahun 2015 mencapai 0,43, tertinggi selama periode tahun 2006 sampai dengan 2017. Secara umum, tren gini ratio selama periode tersebut adalah meningkat.

Perbedaan tingkat ketimpangan berbeda antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya. Ketimpangan terendah di Kabupaten Pegunungan Arfak dengan gini ratio sebesar 0,27 dan tertinggi di Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Manokwari Selatan dengan nilai gini ratio sebesar 0,41. Secara keseluruhan, nilai gini ratio Provinsi Papua Barat pada Maret 2017 sebesar 0,39. Kecuali Kabupaten Pegunungan Arfak, tingkat ketimpangan pengeluaran di kabupaten/kota di Papua Barat termasuk ketimpangan sedang.



Gambar 25. Nilai Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2016

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016

Menurut Mantan Wakil Presiden Boediono dalam Ikhsan (2014), ada empat sumber ketimpangan yang terjadi di Indonesia yaitu:

1. Masih ada segmen masyarakat Indonesia yang tidak tunduk pada hukum. Kelompok yang dekat dengan kekuasaan memanfaatkan dan menimbulkan perlakuan diskriminatif.
2. Penerapan hukum formal tidak sesuai dengan tujuan sehingga kegiatan pencari rente timbul dan menimbulkan kesenjangan akses.
3. Walaupun penerapan hukum relatif baik tetapi kesenjangan bisa muncul karena aturan hukumnya memang tidak terdisain dengan baik dan memiliki persoalan tersendiri.

4. Ketimpangan dalam opportunity dan akses. Bagaimana segmen masyarakat bawah bisa bersaing jika persentase asupan gizi tidak cukup (*stunting problem*).

Solusi terhadap keempat masalah di atas adalah:

1. Penegakan hukum.
2. Reformasi sistem hukum.
3. Reformasi politik.
4. Untuk mengatasi ketimpangan dalam *oppportunity* dan akses dapat ditempuh melalui efektifkan peran negara khususnya membuka dan memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua elemen masyarakat terutama masyarakat miskin.

Kesejahteraan (Kemiskinan dan Nilai Tukar Petani)

Kemiskinan seringkali digunakan untuk menakar kesejahteraan yang hilang. Bank Dunia (2000) mendefinisikan kemiskinan sebagai kehilangan kesejahteraan (*poverty is pronounced deprivation in well-being*). Pengukuran kemiskinan didekati dengan ketidakmampuan memenuhi batasan-batasan kesejahteraan. Bappenas (2004) misalnya, memaknai kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Penduduk miskin seringkali tidak menikmati “kue” pembangunan sebagaimana layaknya. Mereka adalah kelompok yang masuk pada kategori *the lost, the least and the last*. Mereka adalah kelompok yang kehilangan

kesempatan dan pilihan. UNDP menyatakan bahwa kemiskinan berdampak pada keterbatasan pilihan yang dimiliki oleh penduduk miskin. Keterbatasan untuk memilih layanan pendidikan terbaik, keterbatasan untuk mengakses layanan kesehatan terbaik, dan keterbatasan untuk memperoleh sumber pendapatan terbaik. Mereka juga tergolong sebagai kelompok yang kehilangan sumber pendapatan. Mereka adalah kelompok yang tertinggal jauh di “belakang”.

Persoalan yang lebih pelik terkait kuantifikasi penduduk miskin, bagaimana mengidentifikasi sekaligus mengukur penduduk miskin. Pengukuran kemiskinan di Indonesia secara garis besar dipilah menjadi dua yaitu pengukuran kemiskinan makro dan mikro. Pengukuran kemiskinan makro telah dilakukan sejak tahun 1984 yang mencakup data kemiskinan tahun 1976–1981 dan dirilis resmi oleh BPS. BPS mengukur kemiskinan melalui jumlah penduduk dengan pengeluaran per kapita kurang dari garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang dikeluarkan oleh penduduk pada kelompok referensi untuk mengkonsumsi sejumlah paket komoditas makanan dan non makanan. Metode pengukuran moneter ini dikenal dengan *basic need approach*. Metode ini diperbaharui pada tahun 1998 berkenaan dengan krisis moneter yang melanda Indonesia.

Pengukuran kemiskinan mikro di Indonesia dilakukan pertama kali oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 1999. BKKBN mengidentifikasi penduduk miskin sebagai penduduk pada keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I. Ada lima

kriteria yang digunakan BKKBN untuk menjaring keluarga sejahtera I, yaitu: 1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut masing-masing; 2) Seluruh anggota keluarga pada umumnya makan 2 kali sehari atau lebih; 3) Seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda di rumah, sekolah, bekerja dan bepergian; 4) Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah; dan 5) Bila anak sakit atau PUS (Pasangan Usia Subur) ingin mengikuti KB pergi ke sarana/petugas kesehatan serta diberi KB moderen. Salah satu dari kelima kriteria tidak dipenuhi maka status keluarga adalah pra sejahtera.

BPS melakukan kajian penentuan penduduk miskin dengan pendekatan mikro pada tahun 2010. Studi penentuan kriteria penduduk miskin menggunakan 8 variabel yaitu: 1) luas lantai per kapita paling besar 8 m^2 ; 2) Jenis lantai tanah; 3) Air minum/ketersediaan air bersih berupa air hujan/sumur tidak terlindung; 4) Tidak ada jamban/WC; 5) Tidak memiliki aset; 6) Total pendapatan per bulan paling besar 350.000; 7) porsi pengeluaran makanan minimal 80 persen terhadap total pengeluaran; dan 8) Tidak mengonsumsi lauk pauk (daging, ikan, telur, ayam) atau mengonsumsi tetapi tidak variatif. Penduduk miskin menurut kriteria ini adalah mereka yang tinggal dalam suatu rumah tangga yang memenuhi minimal 5 dari 8 variabel tersebut.

Provinsi Papua Barat termasuk dalam 10 provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia setelah Provinsi Papua (Metro TV). Data BPS terakhir (Maret 2017), penduduk miskin di Papua Barat mencapai 25,10 persen dari total penduduk Papua Barat atau setara dengan 228 ribu penduduk miskin. Indeks kedalaman dan

indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2017 masing-masing sebesar 6,74 dan 2,45. Dibandingkan kondisi kemiskinan tahun 2007, kemiskinan tahun 2017 jauh lebih rendah dengan pengurangan tingkat kedalaman kemiskinan dan kesenjangan pengeluaran penduduk miskin semakin berkurang.

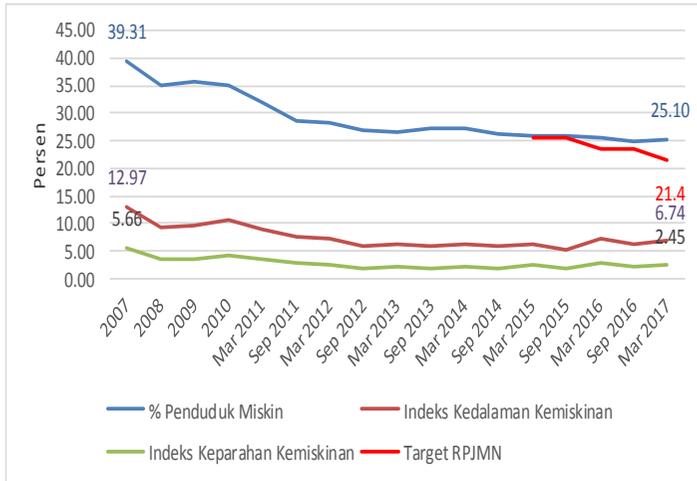
Tabel 3. Sasaran Tingkat Kemiskinan Papua Barat Tahun 2015 - 2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Tingkat Kemiskinan	25,6	23,5	21,4	19,4	17,4

Sumber: Bappenas, 2014

Peraturan Presiden No.2 Tahun 2015 tentang RPJM 2015-2019 Buku III menyebutkan sasaran tingkat kemiskinan di Papua Barat pada tahun 2017 sebesar 21,4 persen. Merujuk pada rilis kemiskinan di Papua Barat pada Maret 2017, masih terdapat gap yang sangat besar yaitu sebesar 3,7 poin persen. Pemerintah Indonesia menargetkan penurunan persentase penduduk miskin di Papua Barat rata-rata dua poin persen per tahun. Target penurunan persentase penduduk miskin sebesar dua poin persen per tahun sangat berat untuk dicapai kecuali terdapat pengerahan berbagai sumber daya yang ada untuk mengentaskan kemiskinan di Papua Barat. Sebagai gambaran, Pemerintahan SBY menargetkan penurunan persentase penduduk miskin di Papua Barat antara 19,94 hingga 18,78 persen pada akhir tahun 2014. BPS merilis angka kemiskinan Papua Barat pada

September 2014 sebesar 26,26 persen sehingga masih terdapat gap yang sangat besar antara target dan realisasi capaian (7,48 poin persen).



Gambar 26. Indikator Kemiskinan Papua Barat Tahun 2007 – 2017 dan Target Penurunan Kemiskinan Papua Barat 2015 - 2017

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2007 – 2017

Perkembangan penurunan tingkat penduduk miskin di Papua Barat selama satu dasawarsa terakhir sangat lambat. Penetapan target pengurangan penduduk miskin di Papua Barat hingga 17,4 persen pada akhir tahun 2019 terlalu optimis. Belajar dari pengalaman pemerintah SBY, target persentase penduduk miskin di Papua Barat hingga 18,78 persen tidak tercapai.

Lambatnya penurunan kemiskinan di Papua Barat disebabkan beberapa faktor berikut:

1. Tingginya Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan Papua Barat menempati peringkat keenam tertinggi di Indonesia. Di kawasan Sulawesi, Maluku dan Papua, GK Papua Barat tertinggi. Meskipun masih terdapat lima provinsi dengan GK yang lebih tinggi daripada GK Papua Barat tetapi persentase penduduk miskin di wilayah itu terbilang kecil, kuarng dari 10 persen. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan GK sebesar Rp. 587.530,- per kapita per bulan memiliki persentase penduduk miskin hanya 5,20 persen (74 ribu jiwa) tetapi Provinsi Papua Barat dengan GK Rp. 499.778 memiliki persentase penduduk miskin hingga 25,10 persen (BPS, Maret 2017).

Tabel 4. Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin di Beberapa Provinsi di Indonesia Tahun 2017

No	Provinsi	Garis Kemiskinan (Rp)	P ₀ (%)
1	Bangka Belitung	587.530	5,20
2	Kalimantan Utara	552.040	7,22
3	Kalimantan Timur	548.094	6,19
4	DKI Jakarta	536.546	3,77
5	Kepulauan Riau	513.237	6,06
6	Papua Barat	499.778	25,10

Sumber: BPS, 2017

Dengan memperhatikan provinsi di mana GK lebih tinggi dari GK Provinsi Papua Barat, maka tingginya GK bukan sebab utama tingginya persentase penduduk miskin. Meskipun GK tinggi, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di kelima provinsi tersebut juga lebih tinggi daripada Papua Barat. Selain itu, nilai gini ratio di kelima provinsi tersebut kecuali DKI Jakarta lebih rendah daripada Papua Barat. Apa maknanya? Dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang tinggi disertai dengan tingkat ketimpangannya yang rendah maka tingginya GK tidak serta merta mengakibatkan tingginya persentase penduduk miskin. Dengan demikian, tingginya persentase penduduk miskin di Papua Barat merupakan indikasi awal terhadap dua persoalan yaitu persoalan tingkat pendapatan dan persoalan ketimpangan pendapatan.

Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk miskin di tengah kenaikan garis kemiskinan diperlukan peningkatan kemampuan penduduk untuk meningkatkan pendapatannya. Rumusnya, kenaikan garis kemiskinan tidak akan meningkatkan persentase penduduk miskin pada kondisi pertumbuhan pendapatan lebih besar daripada pertumbuhan garis kemiskinan. Agar kenaikan pendapatan penduduk bisa meningkatkan daya beli masyarakat diperlukan stabilitas harga kebutuhan masyarakat dalam arti perubahan atau kenaikan harga komoditas yang dibutuhkan masyarakat masih dalam rentang kendali yang wajar. Oleh karena itu, ada keterkaitan antara kerja Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID dengan upaya penekanan kenaikan Garis Kemiskinan dalam rangka menekan pertumbuhan penduduk miskin.

Karena GK Papua Barat tinggi maka sedikit kenaikan

harga (inflasi) akan mengakibatkan kenaikan GK. Di sisi lain, kenaikan pendapatan penduduk tidak selalu melebihi kenaikan GK.

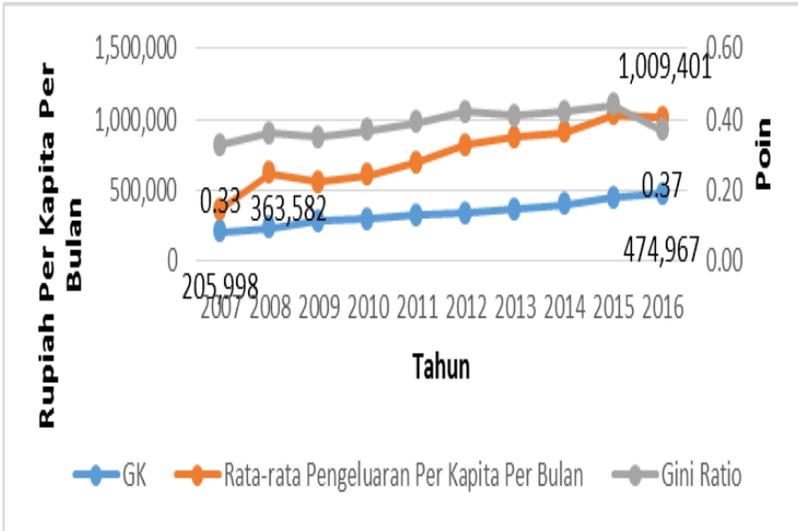
Tabel 5. Rata-Rata Pengeluaran Perkapita dan Gini Ratio di Beberapa Provinsi di Indonesia Tahun 2017

No	Provinsi	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita* (Rp)	Gini Ratio**
1	Bangka Belitung	1.211.879	0,282
2	Kalimantan Utara	1.157.774	0,308
3	Kalimantan Timur	1.296.926	0,330
4	DKI Jakarta	1.876.648	0,413
5	Kepulauan Riau	1.465.121	0,334
6	Papua Barat	1.009.401	0,390

Keterangan: * Maret 2016 ** Maret 2017

GK dibentuk oleh GK Makanan dan GK Non Makanan. Share GK Makanan masih sangat dominan. Kenaikan harga komoditas makanan sedikit saja akan sangat berpengaruh terhadap kenaikan GK Papua Barat. Selama 10 tahun terakhir, GK Papua Barat tumbuh 142,61 persen. Rata-rata kenaikan GK setiap tahun mencapai 5,80 persen. Di sisi lain, pertumbuhan pengeluaran per kapita per bulan mencapai 177,63 persen pada periode yang sama dengan pertumbuhan per tahun sebesar 13,73 persen. Artinya, meskipun terdapat kenaikan garis kemiskinan setiap tahunnya tetapi mampu dikejar oleh kenaikan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan oleh penduduk Papua

Barat. Karena itu, selama satu dasawarsa terakhir tingkat kemiskinan di Papua Barat berhasil diturunkan dari 39,31 persen pada tahun 2007 menjadi 25,10 persen pada tahun 2017. Penurunan tingkat kemiskinan di Papua Barat selama tahun 2007 s.d tahun 2017 mencapai 1,29 persen per tahun.



Gambar 27. Garis Kemiskinan, Rata-rata pengeluaran Per Kapita Per Bulan dan Gini Ratio Papua Barat Tahun 2017

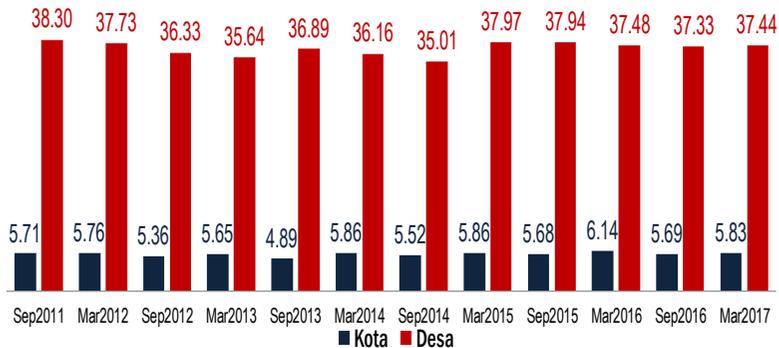
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat 2007 - 2016

Penyebab lambannya penurunan tingkat kemiskinan di Papua Barat adalah tingkat ketimpangan pendapatan yang cenderung meningkat selama kurun 2007- 2017. Gambar di atas juga menampilkan perkembangan tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur dengan gini ratio. Selama periode tersebut, tingkat ketimpangan pengeluaran Papua Barat masuk dalam kategori sedang dalam arti kontribusi kelompok bawah terhadap total pengeluaran di Papua Barat

kalah dominan dibandingkan kelompok sedang dan kelompok atas. Dengan kata lain, hasil-hasil pembangunan di Papua Barat lebih banyak dinikmati oleh kelompok menengah dan kelompok atas.

2. Disparitas wilayah

Persoalan kemiskinan di Papua Barat berikutnya adalah disparitas wilayah. Kemiskinan di Papua Barat berpusat di wilayah pedesaan. Tingkat kemiskinan di perkotaan pada Maret 2017 hanya 5,83 persen tetapi tingkat di pedesaan enam kali lebih tinggi (37,44 persen). Padahal, garis kemiskinan di perkotaan (Rp. 515.849,-) lebih tinggi daripada garis kemiskinan di pedesaan (Rp. 488.564). Ini indikasi awal adanya perbedaan daya beli masyarakat di perkotaan dan di pedesaan.



Gambar 28. Persentase Penduduk Miskin Kota dan Desa di Provinsi Papua Barat Tahun 2011 – 2017

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2011–2017

Demikian juga dengan disparitas tingkat kemiskinan antar kabupaten/kota, jarak tingkat kemiskinan antara wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi dan terendah sangat besar. Tingkat kemiskinan terendah di Kaimana (17,44 persen) dan tertinggi di Kabupaten Pegunungan Arfak (39,46 persen). Garis kemiskinan Kota Sorong tertinggi di Papua Barat yaitu Rp. 625.071 per kapita per bulan sementara garis kemiskinan Kabupaten Pegunungan Arfak sebesar Rp. 552.153 per kapita per bulan. Garis kemiskinan terendah di Papua Barat di Kabupaten Sorong Selatan yaitu Rp. 286.318 per kapita per bulan dengan persentase penduduk miskin 19,92 persen.



Persentase Penduduk Miskin

Garis Kemiskinan
Rp. Per Kapita Per Bulan

Gambar 29. Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten Kota di Papua Barat Tahun 2016

ANALISIS KEUANGAN DAERAH

Analisis Pelaksanaan APBN

APBN Tingkat Provinsi

Penetapan APBN pada setiap tahun memberikan konsekuensi kepada pemerintah pusat maupun provinsi untuk merealisasikan pengalokasian bagi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua Barat. Pengalokasian keuangan dan pelaksanaan kebijakan fiskal oleh pemerintah dapat dilihat pada realisasi APBN di Provinsi Papua Barat untuk tahun 2014 s.d tahun 2016 seperti berikut:

Tabel 6. Pagu dan Realisasi APBN di Provinsi Papua Barat (dalam milyar rupiah)

Uraian	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
A Pendapatan Negara dan Hibah	1.971,75	1.896,50	96,18%	2.859,20	2.508,17	87,72%	3.680,12	2.541,92	69,07%
I Penerimaan Perpajakan	1.924,25	1.751,52	91,02%	2.713,96	2.359,60	86,94%	3.193,50	2.311,58	72,38%
1. Pajak Dalam Negeri	1.924,25	1.739,19	90,38%	2.713,96	2.352,31	86,67%	3.193,50	2.297,28	71,94%
2. Pajak Perdagangan Internasional	-	12,33	-	-	7,29	-	-	14,31	-
II Penerimaan Negara Bukan Hibah	47,50	135,71	285,69%	145,24	148,56	102,29%	486,62	230,34	47,34%
1. Penerimaan Sumber Daya Alam	-	0,12	-	-	-	-	-	-	-
2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. PNBPN Lainnya	47,50	135,59	285,43%	145,24	148,56	102,29%	486,62	228,37	46,93%
4. Pendapatan BLU	-	-	-	-	-	-	-	1,97	-
III Penerimaan Hibah	-	9,28	-	-	-	-	-	-	-
B Belanja Negara	17.067,97	19.220,02	112,61%	23.301,77	22.894,17	98,25%	24.209,16	23.948,97	98,93%
I Belanja Pemerintah Pusat	6.757,50	6.317,59	93,49%	8.474,80	7.776,21	91,76%	7.046,63	6.094,21	86,48%
1. Belanja Pegawai	863,86	798,01	92,38%	1.029,27	973,84	94,61%	1.163,06	1.131,59	97,29%
2. Belanja Barang	1.724,91	1.508,41	87,45%	2.017,07	1.740,79	86,30%	2.790,82	2.114,66	75,77%
3. Belanja Modal	3.838,69	3.692,25	96,19%	5.317,80	4.962,72	93,32%	3.061,35	2.824,83	92,27%
4. Bantuan Sosial	320,38	310,02	96,77%	99,55	94,45	94,88%	18,52	18,04	97,44%
5. Belanja Lain-lain	9,67	8,91	92,17%	11,12	4,40	39,60%	12,88	5,09	39,49%
II Transfer ke Daerah	10.310,47	12.902,43	125,14%	14.826,97	15.117,96	101,96%	17.162,53	17.854,76	104,03%
C Surplus/Defisit Anggaran (A-B)	(15.096,22)	(17.323,52)	114,75%	(20.442,57)	(20.386,01)	99,72%	(20.529,05)	(21.407,05)	104,28%

Sumber: Kanwil Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, 2017

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi pendapatan tidak mampu mencapai target, yang mengindikasikan bahwa penetapan target penerimaan tidak didasarkan pada potensi penerimaan negara yang dapat dipungut. Penerimaan negara tersebut lebih didominasi dari sumber penerimaan pajak yang sebenarnya masih dapat ditingkatkan lagi apabila target penerimaan negara benar-benar didasarkan pada potensi penerimaan negara yang dapat dipungut.

1. Penerimaan Perpajakan Provinsi Papua Barat

Pendapatan pemerintah pusat di Provinsi Papua Barat Tahun 2015 berupa penerimaan perpajakan merupakan pendapatan negara yang paling besar kontribusinya. Perkembangan penerimaan pajak tahun 2014 sampai dengan 2016 sebagaimana terlihat dalam Tabel 7 di bawah ini:

Tabel 7. Pagu dan Realisasi Jenis Penerimaan Pajak di Provinsi Papua Barat (dalam milyar rupiah)

Jenis Pajak	2014		2015		2016		
	Target	Real	Target	Real	Target	Real	%
PPh	833,61	722,69	1.127,82	925,15	1.589,58	981,69	61,76
PPN	1.010,14	920,58	1.483,67	1.322,39	1.466,62	1.191,13	81,22
PBB	78,20	83,85	81,49	90,32	100,00	109,08	109,08
Pajak Lainnya	2,30	12,07	20,97	14,45	37,29	15,38	41,24
Total Penerimaan Perpajakan	1.924,25	1.739,19	2.713,96	2.352,31	3.193,50	2.297,28	71,94

Sumber : Kanwil Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, 2017

Target penerimaan pajak mengalami peningkatan sedangkan realisasi penerimaan pajak berfluktuasi selama 3 tahun. Secara umum meningkatnya jumlah penerimaan pajak pada setiap tahun didorong oleh percepatan penyetoran pajak ke kas negara sehingga dapat membantu *cash flow* pemerintah. Upaya yang perlu dilakukan dalam rangka percepatan penerimaan perpajakan adalah pengawasan bendahara umum daerah untuk menyetorkan penerimaan pajak tepat pada waktunya.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Provinsi Papua Barat

Pendapatan pemerintah pusat berupa PNBP tahun 2014 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan, sebagaimana Tabel 8 di bawah ini:

.Tabel 8. Realisasi Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di Provinsi Papua Barat (dalam milyar rupiah)

PNBP	2014		2015		2016	
	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
PNBP Umum						
1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN	9,47	7,00%	5,64	5,78%	0,04	0,15%
2. Pendapatan Iuran dan Denda	3,21	2,37%	0,82	0,85%	1,13	3,97%
3. Pendapatan Lain-lain	56,18	41,50%	18,44	18,91%	25,20	88,45%
Total PNBP Umum	68,86	50,87%	24,90	25,53%	26,38	92,57%
PNBP Fungsional						
1. Jasa	44,08	32,57%	43,74	44,85%	2,01	7,07%
2. Kejaksaan dan Peradilan	1,23	0,91%	1,65	1,69%	0,10	0,35%
3. Pendidikan	20,68	15,28%	27,19	27,88%	0,00	0,02%
4. Gratifikasi dan Sitaan	0,50	0,37%	0,05	0,05%	-	0,00%
Total PNBP Fungsional	66,50	49,13%	72,63	74,47%	2,12	7,43%
	135,36	100,00%	97,52	100,00%	28,49	100,00%

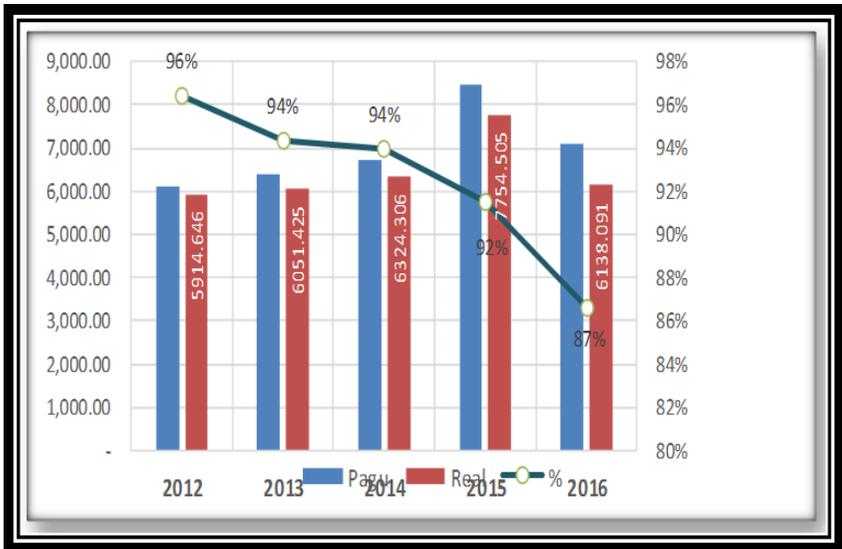
Sumber : Kanwil Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, 2017

3. Belanja Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi Papua Barat

Sejak tahun 2013 terjadi peningkatan Alokasi Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Provinsi Papua Barat. Pendapatan PNBP umum mengalami penurunan sedangkan PNBP fungsional mengalami peningkatan. Secara umum penerimaan PNBP selama 3 tahun mengalami penurunan yang mengindikasikan bahwa penyeteroran PNBP yang mengalami penurunan karena perolehan pendapatan lain-lain dan fungsional dari jaksa serta pendidikan yang

berfluktuatif. Penerimaan tersebut menunjukkan kontribusi kemampuan fiskal pemerintah melalui penerimaan pusat/daerah kepada pertumbuhan ekonomi regional.

Pagu belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Papua Barat mengalami peningkatan hingga tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami penurunan hal ini disebabkan karena realisasi belanja cenderung mengalami penurunan pada setiap tahunnya. Penurunan ini menunjukkan bahwa kemampuan menyerap anggaran mengalami penurunan.



Gambar 30. Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Papua Barat

Sumber: Kanwil Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, 2017

Belanja pemerintah pusat menurut organisasi adalah belanja pemerintah pusat yang dialokasikan kepada kementerian negara/lembaga dan bagian anggaran bendahara

umum negara. Tahun 2016 Pagu Belanja Pemerintah Pusat Provinsi Papua Barat mencapai Rp. 8.465,20 milyar dimana untuk 10 Kementerian/Lembaga yang memiliki pagu dana terbesar di Provinsi Papua Barat adalah Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kepolisian Negara RI, Kementerian Agama, Komisi Pemilihan Umum, Kementerian Pertahanan, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kehutanan.

Perbandingan realisasi belanja menurut organisasi tahun 2012 dan 2016 seperti pada Gambar 31 menunjukkan bahwa kementerian PU dan Perhubungan masih mendominasi realisasi belanja.

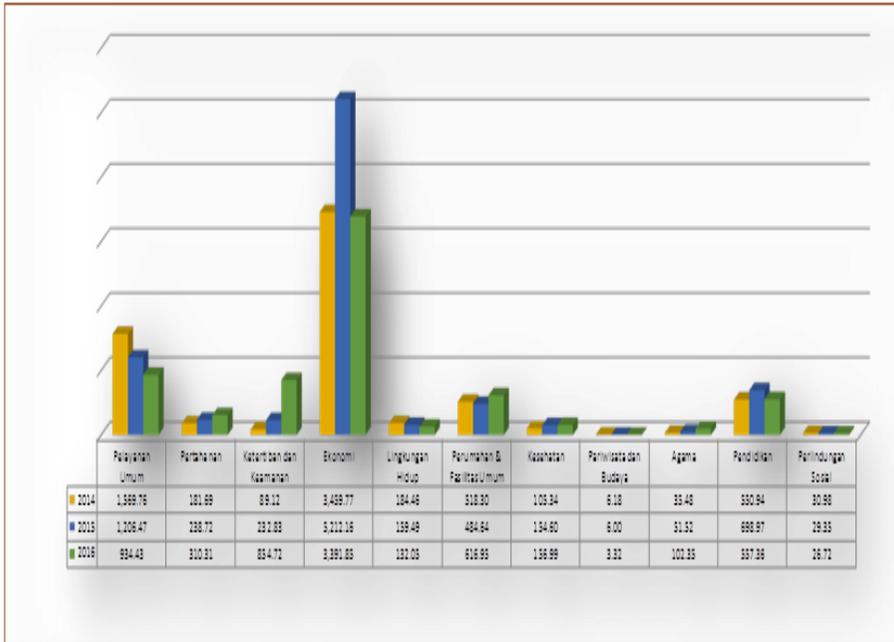


Gambar 31. Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Organisasi di Provinsi Papua Barat

Sumber: Kanwil Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, 2017

Besarnya alokasi belanja tersebut karena pemerintah pusat memfokuskan pada konektifitas antar wilayah dapat dipenuhi guna menjangkau wilayah yang memiliki tingkat kemahalan yang tinggi.

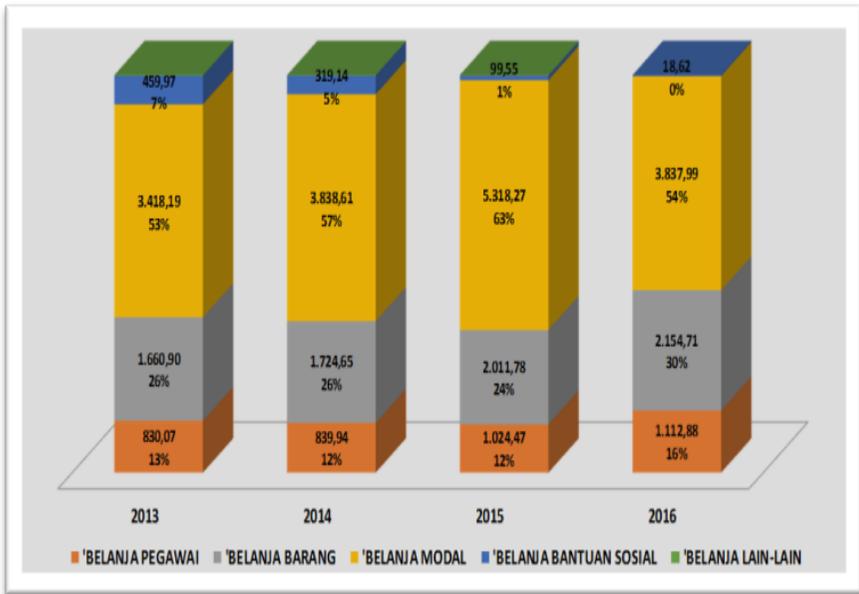
Belanja Pemerintah Pusat dapat dibagi menjadi 11 fungsi, seperti layanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan, perlindungan sosial. Perkembangan pagu dan realisasi berdasarkan fungsi diatas menunjukkan bahwa fungsi ekonomi dan pelayanan umum menjadi fokus pemerintah. Fungsi pelayanan umum sangat diperlukan karena menyangkut kepentingan orang banyak seperti rumah sakit, sekolah, pasar dan lainnya. Fungsi ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekonomi. Bidang pariwisata dan budaya belum menjadi perhatian walaupun fungsi ini dapat memberikan kontribusi bagi perolehan Pendapatan Asli Daerah. Alokasi Anggaran berdasarkan Fungsi seperti pada Gambar 32.



Gambar 32. Alokasi Anggaran Berdasarkan Fungsi Tahun 2013 s.d 2015 di Provinsi Papua Barat

Sumber: Hasil pengolahan, 2017

Perkembangan pagu dan realisasi berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada komposisi alokasi DIPA di Provinsi Papua Barat sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 menurut Jenis Belanja dapat dilihat pada Gambar 33.



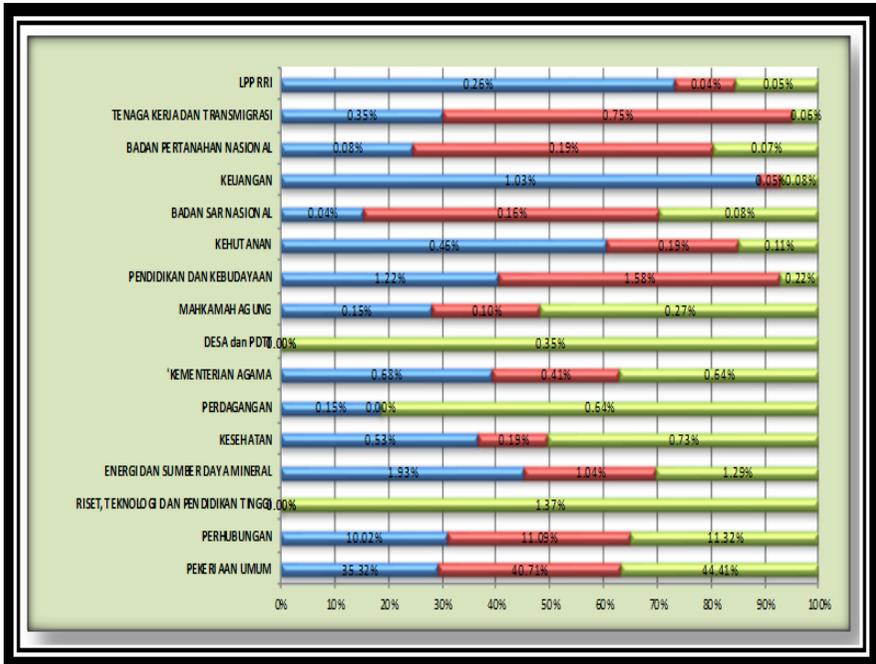
Gambar 33. Komposisi Alokasi DIPA di Provins Papua Barat T.A. 2013 s.d 2016 Per Jenis Belanja (dalam Milyar Rupiah)

Komposisi dana DIPA di Provinsi Papua Barat sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 didominasi belanja modal, yang besarnya tahun 2013 sebesar 53%, tahun 2014 sebesar 57%, tahun 2015 sebesar 63%, dan tahun 2016 sebesar 54%.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan) serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan suatu satker atau dipergunakan

oleh masyarakat umum/publik serta akan tercatat di dalam neraca satker K/L.

Dominasi Belanja Modal pada alokasi dana DIPA sejak tahun 2013 sampai dengan 2015 merupakan penjabaran dari salah satu Prioritas Pembangunan Nasional dan pelaksanaan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMN 2012-2016. Selanjutnya pelaksanaan Program Pemerintah dalam RPJMN 2012-2016 tersebut dituangkan setiap tahun dalam Rencana Kerja Pemerintah. Kebijakan alokasi anggaran belanja negara pada APBN tahun 2012 diarahkan kepada upaya mendorong pertumbuhan di daerah melalui pengembangan koridor ekonomi, membangun infrastruktur yang mendukung terwujudnya keterhubungan wilayah (*globally connected and domestically integrated*) dan mendorong percepatan pembangunan di Papua Barat.

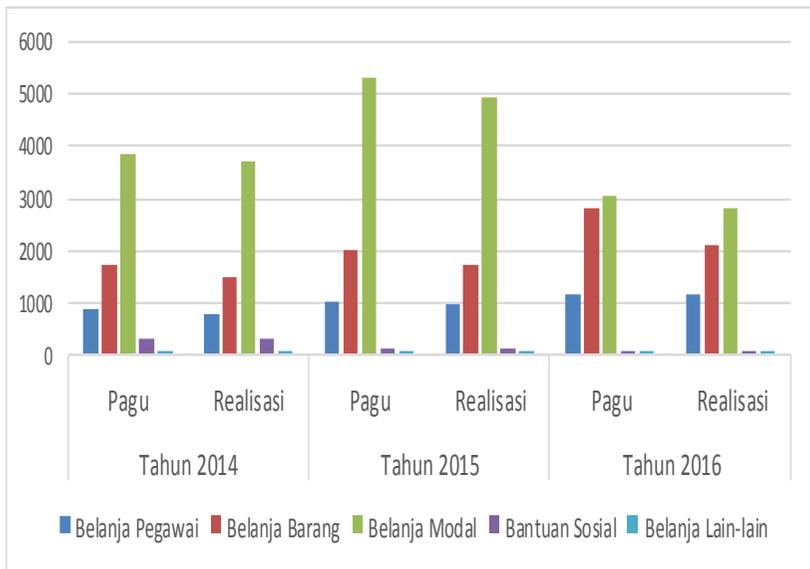


Gambar 34. Proporsi Alokasi Belanja Modal Berdasarkan Kementerian Tahun 2013-2015 di Provinsi Papua Barat

Sumber : Hasil pengolahan, 2017

Belanja barang dan belanja modal masih merupakan pagu dan realisasi tertinggi dalam belanja pemerintah pusat, hal tersebut membuktikan di Provinsi Papua Barat kebutuhan untuk belanja barang masih tinggi, sedangkan untuk belanja modal menunjukkan proses pembangunan terus dilakukan guna mencapai kesejahteraan rakyat. Pagu Bantuan Sosial walaupun tidak terlalu besar jumlahnya, bahkan pada tahun 2015 jumlahnya lebih kecil dari tahun 2014 namun pemerintah tetap berupaya dan berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alokasi Bantuan Sosial, yang

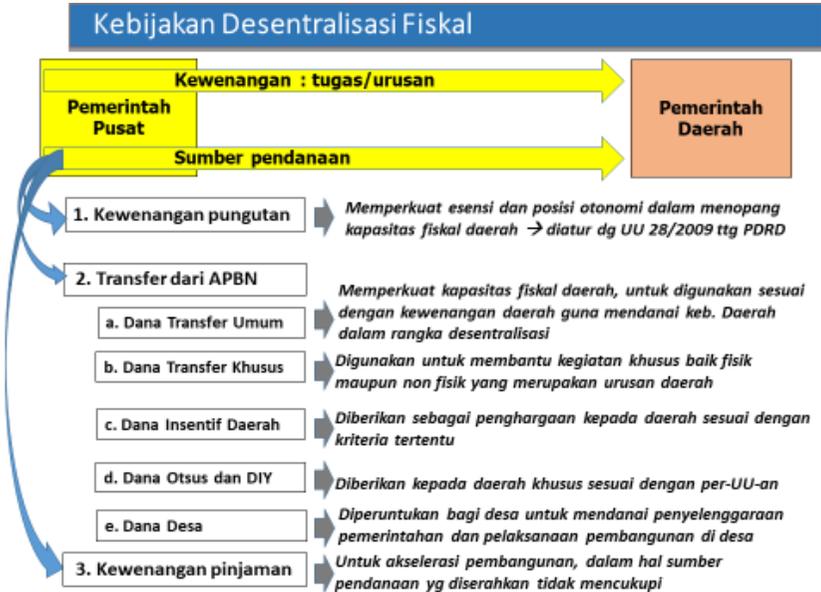
menurut sifatnya sebagai usaha pemerintah untuk mengurangi resiko sosial, diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat miskin. Peningkatan daya beli masyarakat ini diharapkan dapat pula meningkatkan konsumsi rumah tangga secara agregat di wilayah Provinsi Papua Barat yang merupakan salah satu komponen pertumbuhan ekonomi. Komposisi alokasi belanja tahun 2014 s.d 2016 seperti pada Gambar 35.



Gambar 35. Komposisi Alokasi Belanja Kementerian dan Lembaga Tahun 2014-2016 di Provinsi Papua Barat

Sumber : Hasil pengolahan, 2017

Kebijakan Desentralisasi Fiskal dari pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah menyangkut kewenangan dan sumber pendanaan secara umum seperti pada Gambar 36 berikut :



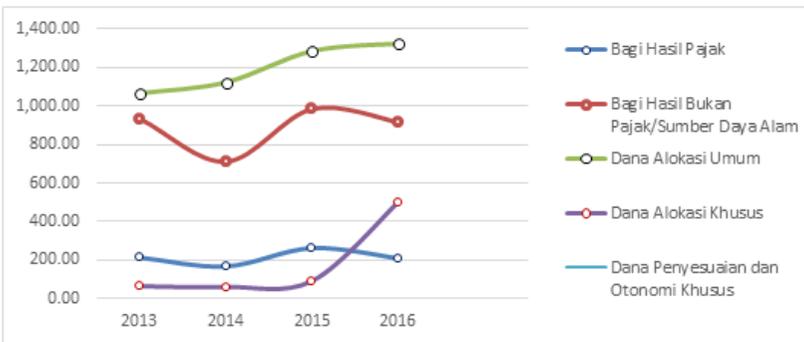
Gambar 36. Kebijakan Desentralisasi Fiskal

Kebijakan transfer ke daerah dan dana desa TA 2016 antara lain : a) meningkatkan alokasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa dalam APBN tahun 2016 mendekati anggaran Kementerian/Lembaga (Belanja K/L), b) meningkatkan besaran dan memperbaiki formula alokasi DAU guna meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (sebagai equalization grant), c) meningkatkan besaran serta memperbaiki dan memperkuat kebijakan DAK untuk mendukung implementasi nawacita dan pencapaian prioritas nasional melalui meningkatkan besaran alokasi DAK untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah guna mempercepat pembangunan/penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana publik dan meningkatkan efektifitas pelaksanaan DAK dengan meniadakan kewajiban dana

pendamping, percepatan penetapan juknis, dan perbaikan pola penyaluran, pelaporan, monitoring dan evaluasi.

Arah kebijakan dana transfer umum (dana alokasi umum) secara bertahap mengurangi bobot variabel Alokasi Dasar (AD), agar setelah RUU HKPD ditetapkan perhitungan DAU dapat dilakukan murni berdasarkan Celah Fiskal. Perbaikan bobot variabel Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal, antara lain variabel luas wilayah laut dan variabel PAD.

Perbaikan Data Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal dalam perhitungan DAU bertujuan untuk meningkatkan efektifitas DAU dalam meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan daerah. Indeks Williamson yang optimal, meningkatkan penggunaan DAU untuk belanja pelayanan publik, meningkatkan keseimbangan fiskal antar daerah dan kesinambungan fiskal daerah dan meningkatkan akurasi alokasi DAU sesuai dengan kondisi celah fiskal daerah. Alokasi transfer ke daerah seperti pada tabel berikut :



Gambar 37. Perkembangan Pagu dan Realisasi Dana Transfer Di Provinsi Papua Barat (Dalam Milyar Rupiah)

Sumber : Hasil pengolahan, 2017

Dari data di atas terlihat bahwa Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Bukan pajak masih yang terbesar untuk belanja transfer daerah kurun waktu tahun 2013 dan Tahun 2016. Sejak tahun 2015 dana transfer bertambah dengan komponen dana desa seperti pada Tabel 9.

Tabel 9. Dana Tranfer ke Papua Barat Tahun 2014 s.d 2016

Transfer Ke Papua Barat	2014			2015			2016		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
DBH	-	3.006,53	0,00	1.922,87	2.402,75	124,96	1.952	3.082,31	157,91
DAU	6.616,59	6.065,21	91,67	7.421,60	7.421,60	100,00	7.879,20	7.879,18	100,00
DAK FISIK	823,11	823,11	100,00	1.780,19	1.654,28	92,93	2.817,04	2.261,77	80,29
OTSUS, DID	2.547,32	2.547,32	100,00	2.867,33	2.867,33	100,00	2.947,17	3.209,70	108,91
DAK NON FISIK	323,45	460,26	142,30	385,66	322,68	83,67	492,46	347,68	70,60
DANA DESA	-	-	0,00	449,33	449,33	100,00	1.075	1.074	99,95
TOTAL	10.310,47	12.902,43	125,14	14.826,97	15.117,96	101,96	17.162,53	17.854,76	104,03

Analisis Pelaksanaan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam penyusunan RAPBD terdapat beberapa asas umum yang harus dijadikan pedoman, yaitu antara lain:

- a. APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah;
- b. Penyusunan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan

pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahunan.

- c. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.
- d. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- e. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- f. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- g. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.
- h. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- i. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.
- j. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

- k. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam perolehan atau nilai wajar APBD berdasarkan nilai wajar.
- l. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- m. Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.
- n. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Dalam penyusunan APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
- p. Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Jenis Pendapatan Dalam APBD (Struktur APBD)

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari, pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun

anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terdiri atas :Pendapatan asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan; dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah terdiri atas: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah. Lain-lain PAD yang sah mencakup antara lain: Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan bunga, Tuntutan ganti rugi, Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan Komisi, potongan, atau pun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. Pendapatan dana perimbangan meliputi, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah. Lain-lain pendapatan yang dimaksud di sini adalah pendapatan yang ditetapkan pemerintah seperti dana bagi hasil pajak dari Provinsi ke Kabupaten/Kota dan dana otonomi khusus.

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan

badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat. Dalam menerima hibah, daerah tidak boleh melakukan ikatan yang secara politis dapat mempengaruhi kebijakan daerah.

Dengan berlakunya Undang-undang yang mengatur Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap struktur APBD Provinsi Papua Barat. Sumber-sumber penerimaan Provinsi Papua Barat meliputi:

- a. Pendapatan Asli Provinsi (PAD);
- b. Dana Perimbangan;
- c. Penerimaan Provinsi dalam rangka Otonomi Khusus;
- d. Pinjaman daerah; dan
- e. Lain-lain penerimaan yang sah.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Provinsi Papua Barat terdiri dari:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dana perimbangan bagi Provinsi Papua Barat dalam rangka otonomi khusus sebagai berikut:

- 1) Bagi Hasil Pajak:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 90%.
 - b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 80%.
 - c. Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar 20%.

2) Bagi Hasil Sumber Daya Alam:

- a. Kehutanan sebesar 80%.
- b. Perikanan sebesar 80%.
- c. Pertambangan umum sebesar 80%.
- d. Pertambangan minyak bumi sebesar 70%.

Bagian Provinsi, Kabupaten/Kota dari penerimaan sumber daya alam sektor pertambangan minyak bumi sebesar 15% ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan tambahan penerimaan (setelah dikurangi pajak) sebesar 55% adalah dalam rangka Otonomi Khusus. (Berlaku selama 25 tahun, tahun ke-26 penerimaan dalam rangka otonomi khusus ini menjadi 50%).

- e. Pertambangan gas alam sebesar 70%.

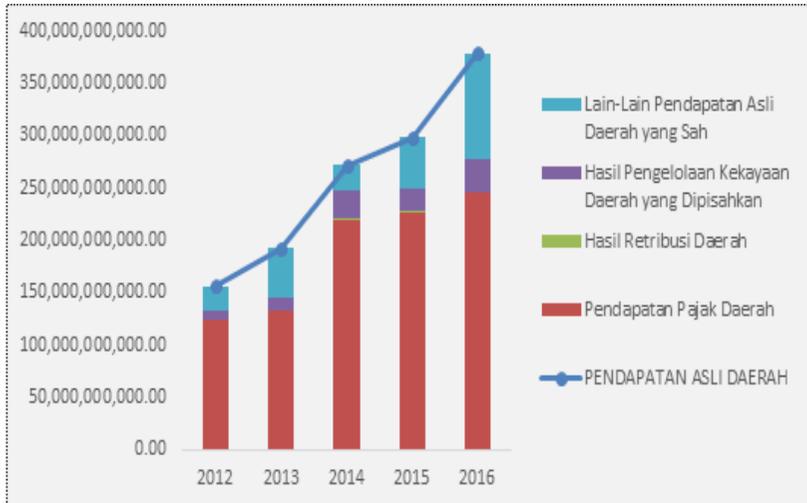
Bagian Provinsi, Kabupaten/Kota dari penerimaan sumber daya alam sektor pertambangan gas alam sebesar 30% ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan tambahan penerimaan (setelah dikurangi pajak) sebesar 40% adalah dalam rangka Otonomi Khusus (Berlaku selama 25 tahun, tahun ke-26 penerimaan dalam rangka otonomi khusus ini menjadi 50%).

3) Dana Alokasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4) Dana Alokasi Khusus yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memberikan prioritas kepada Provinsi Papua Barat.

- 5) Penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang besarnya setara dengan 2% dari plafon Dana Alokasi Umum nasional yang berlaku selama 20 tahun, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan.
- 6) Dana tambahan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang besarnya ditetapkan antara pemerintah dengan DPR berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur ini dimaksudkan agar sekurang-kurangnya dalam 25 tahun seluruh kota-kota provinsi, kabupaten/kota, distrik atau pusat-pusat penduduk lainnya terhubung dengan transportasi darat, laut, atau udara yang berkualitas sehingga Provinsi Papua Barat dapat melakukan aktifitas ekonominya secara baik dan menguntungkan sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional dan global.

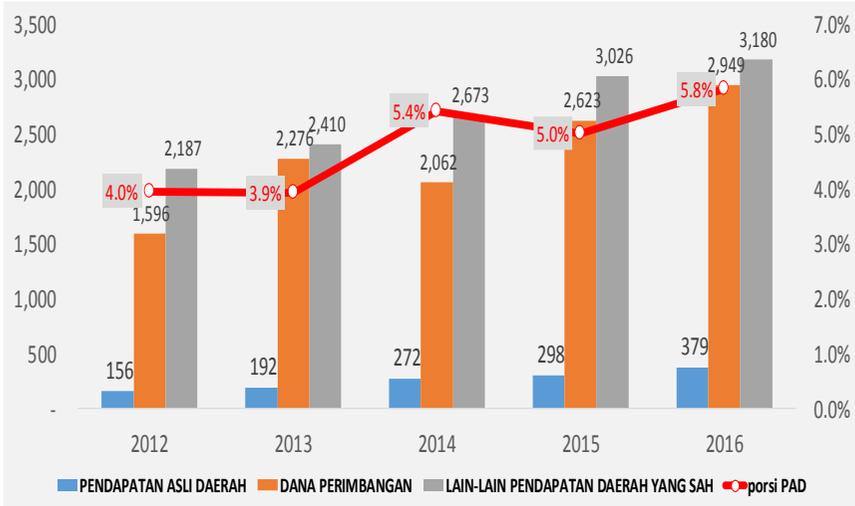
Berikut gambaran detail struktur APDB serta jumlah Pendapatan Provinsi Papua Barat dari tahun 2012-2016, sebagaimana Tabel 7. menunjukkan bahwa PAD mengalami peningkatan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengolahan kekayaan dan lain-lain pendapatan yang sah.



Gambar 38. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Papua Barat

Sumber : Hasil pengolahan, 2017

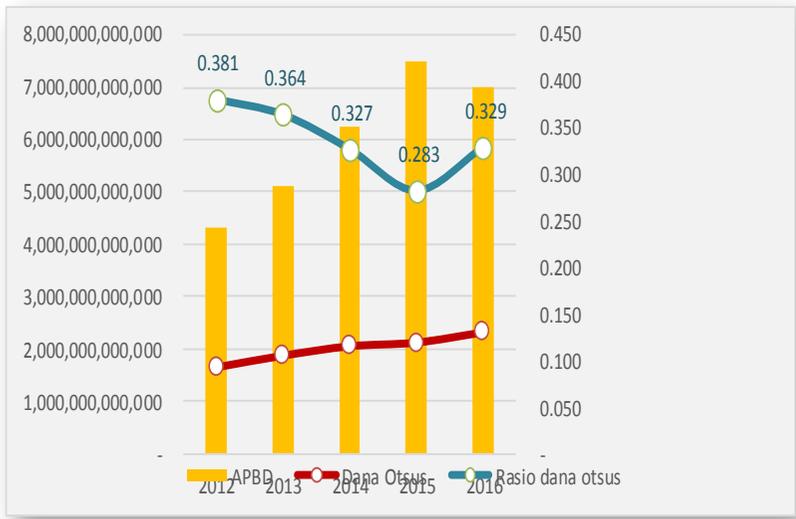
Besarnya perolehan PAD di Provinsi Papua Barat kurun waktu 2012 s.d 2016 sebesar 4 persen tahun 2012 dan tahun 2016 meningkat menjadi 5,8 persen. Porsi tersebut menunjukkan bahwa sumber PAD yang di peroleh masih perlu di tingkatkan lagi. Perolehan tranfer daerah mengalami kenaikan yang cukup berarti pada tahun 2015 dan 2016 karena adanya tambahan Dana Desa.



Gambar 39. Perkembangan Ttransfer Daerah dan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Papua Barat

Sumber : Hasil pengolahan, 2017

Dana otsus yang diterima oleh Provinsi Papua Barat selama tahun 2012 sd tahun 2016 secara nominal mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pendapatan nasional, karena alokasi tersebut bersumber dari 2 persen DAU Nasional. Porsi Dana Otsus Papua terhadap perolehan pendapatan cenderung menurun dari 3,8 % tahun 2012 menjadi 2,8 persen tahun 2015 walaupun pada tahun berikutnya mengalami peningkatan menjadi 3,2 persen, seperti pada Gambar 40, berikut:



Gambar 40. Rasio Dana Otsus terhadap Pendapatan Daerah Di Provinsi Papua Barat

Sumber: Hasil pengolahan, 2017

Jenis Belanja Dalam APBD (Struktur APBD)

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi yang terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Urusan wajib yang dimaksud disini adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh

pemerintah daerah. Sementara urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah yang bersangkutan, antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan pariwisata.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standart pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1. Rincian Belanja Daerah Menurut Klasifikasi Urusan

Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintah daerah. Klasifikasi belanja menurut fungsi terdiri dari:

- a. Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan; dan
- b. Klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara.

Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan di klasifikasi menurut kewenangan pemerintah Provinsi. Klasifikasi belanja menurut fungsi pengelolaan keuangan negara digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan

pengelolaan keuangan negara terdiri dari:

- a. Pelayanan Umum;
- b. Ketertiban dan keamanan;
- c. Ekonomi;
- d. Lingkungan hidup;
- e. Perumahan dan fasilitas umum;
- f. Kesehatan;
- g. Pariwisata dan budaya;
- h. Agama;
- i. Pendidikan; serta
- j. Perlindungan sosial.

Klasifikasi menurut fungsi sebagaimana tersebut diatas didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan pemerintah yang dimaksud adalah urusan yang bersifat wajib dan urusan yang bersifat pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi.

2. Rincian Belanja Daerah Menurut Jenis Belanja

Klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diberikan kepada DPR, dan pegawai pemerintah daerah baik yang bertugas di dalam maupun di luar daerah

sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial dan lain-lain sejenis.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa adalah digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai guna memproduksi barang dan jasa. Contoh pembelian barang dan jasa keperluan kantor, jasa pemeliharaan, dan ongkos perjalanan dinas.

c. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan, dan hewan.

d. Bunga

Pembayaran bunga utang, pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*Principal outstanding*) yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Contoh bunga utang kepada pemerintah pusat, bunga utang kepada Pemda lain, dan lembaga keuangan lainnya.

e. Subsidi

Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk

membantu biaya produksi agar jual produksi/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

f. Hibah

Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang/barang dan jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus.

g. Bantuan Sosial

Yang dimaksud disini adalah pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam bantuan sosial termasuk antara lain bantuan partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

h. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan

Belanja bagi hasil merupakan bagi hasil atas pendapatan daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Contoh: bagi hasil pajak Provinsi untuk Kabupaten/Kota, bagi hasil pajak Kabupaten/Kota ke Kabupaten/kota lainnya, bagi hasil pajak Kabupaten/Kota untuk pemerintahan desa, bagi hasil retribusi ke pemerintahan desa, dan bagi hasil lainnya.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Contoh: bantuan keuangan

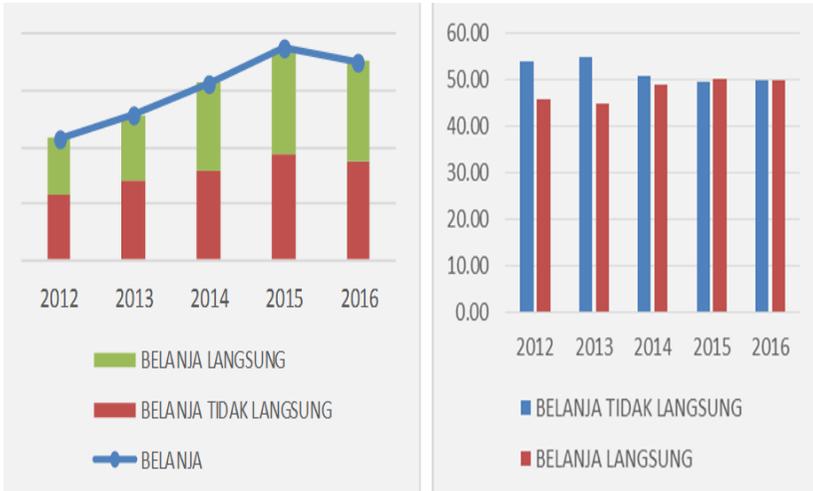
Provinsi kepada Kabupaten/Kota/Desa, bantuan keuangan Kabupaten/Kota untuk pemerintah desa.

i. Belanja tidak terduga

Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas pendapatan daerah tahun-tahun anggaran berikutnya.

3. *Rincian Belanja Dalam APBD Provinsi Papua Barat*

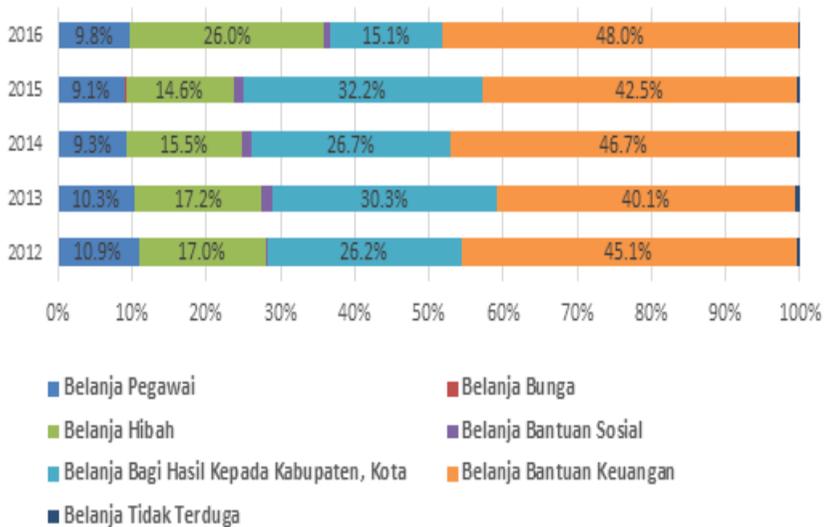
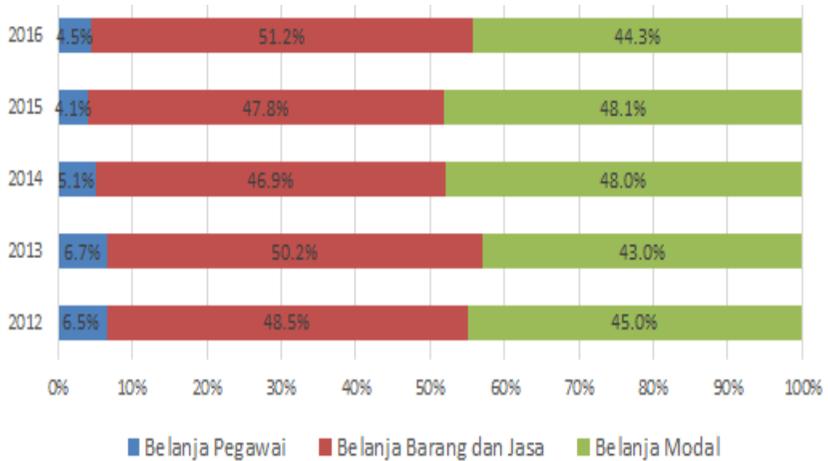
Rincian belanja dalam APBD Provinsi Papua Barat berdasarkan jenis belanja Tahun Anggaran 2012 – 2016, menunjukkan bahwa porsi alokasi Belanja langsung dan belanja tidak langsung pada tahun 2012 dan 2013 porsi belanja tidak langsung lebih mendominasi namun pada tahun berikutnya porsi belanja tersebut hampir sama walaupun terjadi kenaikan alokasi belanja pada setiap tahun kecuali tahun 2016 yang cenderung menurun, seperti pada Gambar 41.



Gambar 41. Perbandingan Belanja Langsung dan Tidak Langsung Di Provinsi Papua Barat

Sumber : Hasil pengolahan, 2017

Komposisi belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal menunjukkan bahwa porsi belanja barang dan jasa cenderung mendominasi dibandingkan dengan belanja modal sedangkan belanja pegawai mengalami penurunan dari 6,5 persen tahun 2012 menjadi 4,5 persen tahun 2016. Belanja tidak langsung lebih didominasi oleh belanja bantuan keuangan kemudian belanja bagi hasil ke kabupaten distrik dan kampung selengkapnya seperti pada Gambar 42.



Gambar 42. Perbandingan Komposisi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Di Provinsi Papua Barat

Sumber: Hasil pengolahan, 2017

Silpa dan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup hal-hal berikut ini.

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya;

SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, uang pihak ketiga yang belum diselesaikan, dan pelampauan target pendapatan daerah.

b. Pencairan dana cadangan

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berupa hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerja samakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

d. Penerimaan pinjaman

Termasuk dalam penerimaan pinjaman daerah yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Pengeluaran pembiayaan mencakup antara lain :

- a. Pembentukan dana cadangan;
- b. Penyertaan modal pemerintah daerah, termasuk investasi nirlaba pemerintah daerah;
- c. Pembayaran pokok utang; dan
- d. Pemberian pinjaman.

Pembiayaan Netto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan Netto harus dapat menutup defisit anggaran. Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam APBD Provinsi Papua Barat selama periode Tahun Anggaran 2012-2016 seluruhnya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya. Pengeluaran pembiayaan daerah Provinsi Papua Barat, sebagian besar digunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Pemerintah Daerah (Bank Papua) pada periode Tahun Anggaran 2012-2015 serta Penyertaan Modal pada BUMD PT. Papua Doberai Mandiri pada Tahun Anggaran 2015-2016. Sedangkan BUMD PT. West Papua Global Energi, sekalipun telah tercantum dalam Rincian APBD Provinsi Papua Barat Tahun 2016, tetapi Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat belum mengeluarkan pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada BUMD tersebut.

Perkembangan Surplus/Defisit APBD

Dalam hal perkembangan Surplus atau Defisit APBD, akan dibahas dalam pembahasan sebagai berikut:

- a. Penggunaan Surplus APBD

Jika APBD diperkirakan surplus, penggunaannya

ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD. Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadangan, dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

b. Pengendalian Defisit APBD

Jika APBD diperkirakan defisit, maka ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut dalam peraturan daerah tentang APBD. Defisit APBD ini ditutup dengan pembiayaan neto. Defisit terjadi apabila jumlah pendapatan tidak cukup untuk menutup jumlah belanja dalam suatu tahun anggaran.

Penetapan batas maksimal defisit APBD dilakukan oleh Menteri Keuangan setiap tahun pada bulan Agustus. Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dilakukan penundaan atas penyaluran dana perimbangan.

APBD suatu daerah dapat defisit dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Jika anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Defisit APBD dapat ditutup dari sumber pembiayaan antara lain:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) daerah tahun sebelumnya;
- b. Pencairan dana cadangan;

- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan pinjaman; dan/atau
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

Terkait dengan defisit tersebut di atas, Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.02/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Mekanisme Pemantatauan Defisit APBD dan Pinjaman Daerah. Ketentuan ini dikeluarkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan bahwa jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD tidak melebihi 3% dari proyeksi PDB tahunan yang bersangkutan. Batas maksimal defisit APBD seluruh Pemerintah Daerah untuk tahun anggaran berikutnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setiap tahun, penetapan tersebut dilakukan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

Batas maksimal defisit APBD sebagaimana tersebut diatas tidak termasuk defisit yang dibiayai dari SiLPA dan defisit yang dibiayai dengan pencairan dana cadangan. Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi defisit APBD kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri paling lambat satu bulan setelah APBD ditetapkan. Pemerintah Daerah yang melakukan perubahan APBD paling lambat satu bulan setelah APBD perubahan ditetapkan.

Menteri Keuangan memantau perkembangan posisi defisit APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemantauan perkembangan posisi defisit APBD dan pinjaman daerah meliputi :

- a. Analisis, penelaahan dan evaluasi terhadap laporan posisi defisit APBD;
- b. Penyajian, pelaporan, dan publikasi informasi posisi defisit APBD; dan
- c. Lain-lain tugas yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Menteri Keuangan dapat mengenakan sanksi berupa penundaan penyaluran dana perimbangan jika pemerintah daerah melanggar batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah. Pengenaan sanksi ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. Pengenaan sanksi dilaksanakan secara efektif pada penyaluran dana perimbangan bulan berikutnya setelah tanggal penetapan sanksi dan mengikuti mekanisme penyaluran dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan Surplus/Defisit APBD Provinsi Papua Barat

Selama periode Tahun Anggaran 2012-2016, APBD Provinsi Papua Barat mengalami Surplus APBD dan Defisit APBD. Surplus APBD terjadi pada Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2016, sementara Defisit APBD terjadi pada Tahun 2012 dan Tahun 2015. Seluruh Defisit APBD ditutup melalui pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) daerah tahun sebelumnya. Defisit APBD terbesar terjadi pada Tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 1.039.813.556.447,38. Rincian perkembangan Surplus dan

Defisit APBD Provinsi Papua Barat serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Papua Barat.

Analisis Belanja Dalam APBD

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah meningkatkan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sebagai konsekuensi tugas dan tanggung jawab tersebut, kepada daerah diserahkan sumber pendanaan, baik melalui skema transfer maupun penyerahan kewenangan perpajakan daerah dan retribusi daerah. Pengelolaan dana tersebut seharusnya dilaksanakan sebaik-baiknya sehingga mendorong peningkatan kualitas belanja daerah (*quality of spending*), dengan memastikan dana tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk program dan kegiatan yang memiliki nilai tambah besar bagi masyarakat.

Dengan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, diharapkan pemerintah daerah yang berada lebih dekat dengan masyarakat mampu secara cepat menyerap aspirasi dari bawah dan sekaligus memenuhi kebutuhan riil masyarakat lokal. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah perlu menerapkan kebijakan-kebijakan yang kondusif terhadap pembangunan ekonomi dan terus mendorong peningkatan kualitas layanan publik, baik melalui kebijakan fiskal maupun kebijakan non fiskal.

Pada dasarnya pemerintah mempunyai peran sebagai aktor sekaligus fasilitator dalam menggerakkan roda perekonomian. Peran tersebut dilakukan baik oleh pemerintah pusat selaku pengawal perekonomian nasional,

maupun pemerintah daerah dalam konteks perekonomian lokal. Peran sebagai aktor terutama akan dilakukan oleh pemerintah melalui belanja-belanja yang mampu secara langsung mendorong pergerakan roda perekonomian, baik di tingkat nasional maupun lokal, semisal melalui pembangunan infrastruktur atau pembangunan sarana layanan publik yang vital. Sementara peran sebagai fasilitator akan lebih banyak ditunjukkan melalui kebijakan-kebijakan yang kondusif terhadap pembangunan ekonomi, baik melalui kebijakan fiskal maupun kebijakan non fiskal.

Dalam konteks kebijakan fiskal, pemerintah daerah selama ini mengelola dana yang dikelolanya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang sekaligus menjadi instrument vital bagi kebijakan publik di daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan persetujuan dari DPRD menunjukkan sumber-sumber pendapatan daerah, berapa besar alokasi belanja untuk melaksanakan program/kegiatan, serta pembiayaan yang muncul bila terjadi surplus atau defisit.

Analisis Vertikal dan Horisontal

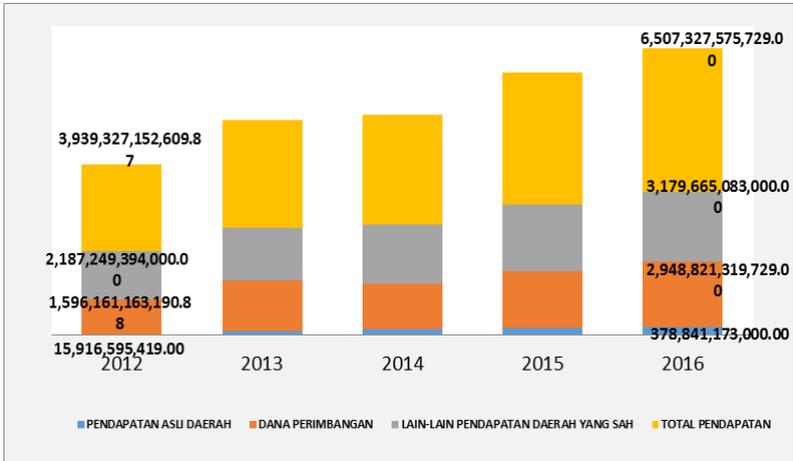
Pemerintah selayaknya responsive terhadap tuntutan publik. Dengan transparansi publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga pemerintah dapat dengan baik menggunakan informasi yang ada untuk:

1. Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi versus anggaran),

2. Menilai ada tidaknya unsur penyelewengan dan manipulasi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran,
3. Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait,
4. Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara pemerintah dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait. (Mahmudi, 2005 dalam Anggarini dan Puranto 2010).

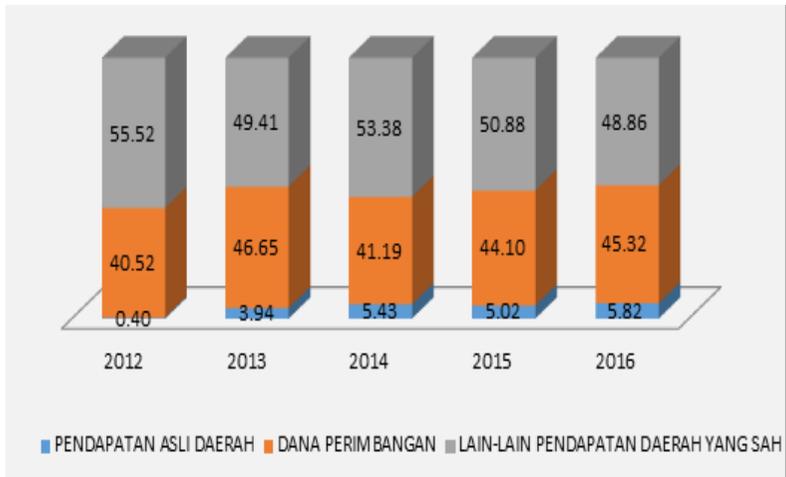
Dalam melakukan analisis pendapatan, terdapat 4 rasio yang umum digunakan, yaitu rasio pajak (*tax ratio*), rasio pajak per kapita (*tax per capita*), ruang fiskal (*fiscal space*), serta ketergantungan fiskal. Dua rasio pertama menyoroti pajak daerah sebagai sumber utama PAD yang diperbandingkan dengan PDRB dan jumlah penduduk. Sedangkan dua rasio terakhir membahas pengelolaan pendapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan belanjanya serta kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan daerah dengan tidak tergantung dari pihak eksternal.

Ruang fiskal (*fiscal space*) merupakan suatu konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Rasio ketergantungan daerah dicerminkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan, serta rasio transfer terhadap total pendapatan. Semakin tinggi rasio PAD semakin rendah ketergantungan daerah dan sebaliknya untuk rasio transfer, semakin tinggi rasio transfer semakin tinggi ketergantungan daerah.



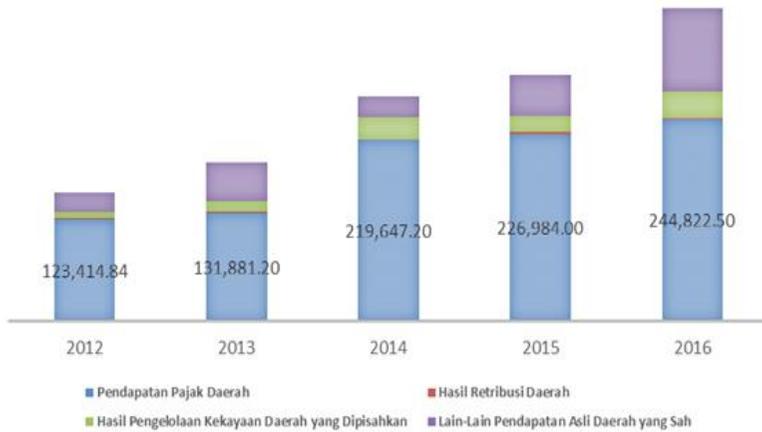
Gambar 43. Komposisi Pendapatan Daerah Tahun 2012-2016

Sumber: Hasil pengolahan, 2017



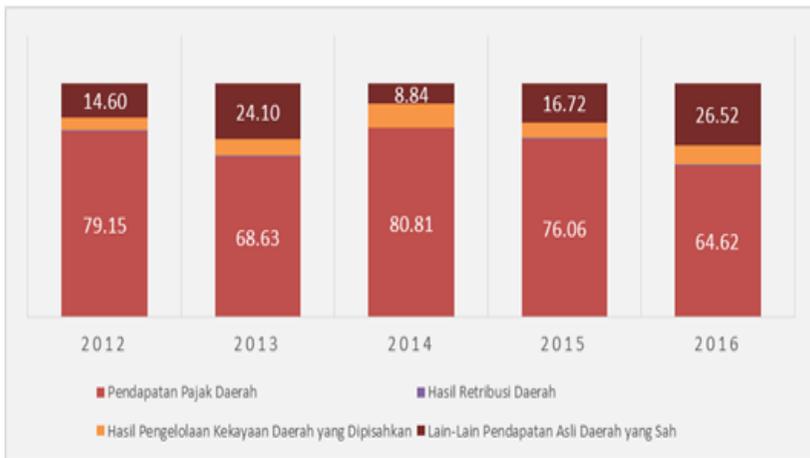
Gambar 44. Kontribusi Setiap Indikator Pendapatan Terhadap Tingkat Pendapatan Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil pengolahan 2017



Gambar 45. Komposisi PAD Tahun 2012-2016 (dalam juta rupiah)

Sumber : Hasil pengolahan, 2017



Gambar 46. Komposisi PAD Tahun 2012-2016 (persen)

Sumber : Hasil pengolahan, 2017

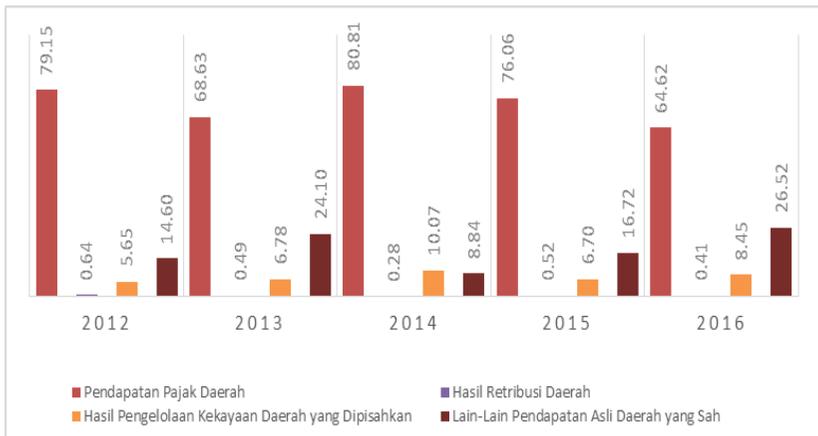
Gambar 45 dan 46 menunjukkan bahwa Pajak Daerah memberi sumbangan terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil Retribusi Daerah yang merupakan sumber daerah yang perlu digali dan dapat dikatakan belum maksimal di lakukan. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kemandirian daerah dalam pengelolaan keuangan dan penggalian potensi daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Rasio ketergantungan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Semakin tinggi nilai ketergantungan suatu daerah, semakin tinggi tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Rasio ini ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan serta rasio dana transfer terhadap total pendapatan.

Dua rasio yang mewakili tersebut, meskipun menunjukkan ketergantungan daerah, namun memiliki makna yang berbeda atas angka-angkanya. Rasio PAD terhadap total pendapatan memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio dana transfer terhadap total pendapatan. Semakin besar angka rasio PAD maka ketergantungan daerah semakin kecil. Sebaliknya, makin besar angka rasio dana transfer, maka akan semakin besar tingkat ketergantungan daerah dalam mendanai belanja daerah. Oleh karena itu, daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang rendah adalah daerah yang memiliki rasio PAD yang tinggi sekaligus rasio dana transfer yang rendah.

Analisis Kapasitas Fiskal Daerah (Ruang Fiskal/Fiscal Space)

Ruang fiskal (*fiscal space*) merupakan suatu konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Semakin besar ruang fiskal yang dimiliki suatu daerah maka akan semakin besar pula fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanjanya pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas daerah seperti pembangunan infrastruktur daerah.



Gambar 47. Komposisi PAD Tahun 2012-2016 (persen)

Gambar 47 menunjukkan bahwa Pajak Daerah memberi sumbangan terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Hasil Retribusi Daerah yang merupakan sumber daerah yang perlu digali dan dapat dikatakan belum maksimal di lakukan. Hal ini menunjukkan masih rendahnya

kemandirian daerah dalam pengelolaan keuangan dan penggalian potensi daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan atas desentralisasi, kepada daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (*tax assingnmen*) dan pemberian bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*) serta bantuan keuangan (*grant*) atau dikenal dengan dana perimbangan. Selain itu, daerah juga diberikan kewenangan untuk melakukan pinjaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pinjaman tersebut dapat berupa pinjaman jangka pendek untuk membiayai kesulitan arus kas daerah dan pinjaman jangka panjang untuk membiayai kebutuhan pengeluaran untuk penyediaan sarana dan prasarana daerah.

Analisis Pengelolaan Keuangan (Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan)

Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah menurut Anggarini dan Puranto (2010) sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan daerah di mulai dengan memperhatikan *kebijakan umum* daerah yang memuat sinkronisasi ataupun penjebaran keterkaitan dari dokumen daerah (*RPJMD/RKPD, Dokumen Perencanaan Lainnya, Penjaringan Aspirasi, Kinerja Masa Lalu, Asumsi Dasar, dan Kebijakan Pemerinatah Pusat*). Setelah Kebijakan umum tersusun, maka dilanjutkan dengan

mempertimbangkan dan menyusun *prioritas dan plafon* keuangan daerah, kemudian disusun *program kegiatan Anggaran* yang termuat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (*tolak ukur kinerja, Analisis Standar Belanja*) kemudian di tetapkan dengan *Perda APBD* sebagai dasar hukum pelaksanaan.

2. Pelaksanaan

Berdasarkan *Perda APBD* pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan *dokumen perencanaan pengelolaan anggaran daerah dan catatannya, penatausahaan dan akuntansi*, kemudian akan ditinjau dan dievaluasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, misalnya *triwulan, dan akhir tahun (LKPJ)*.

3. Pengawasan Keuangan Daerah

Setelah menyusun perencanaan pengelolaan keuangan daerah dan dilaksanakan, agar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan dan ketentuan yang ada, maka perlu dilakukan pengawasan. Pengawasan dilakukan berdasarkan *Laporan Pelaksanaan APBD*, kemudian *Evaluasi Kinerja* menghasilkan *Hasil Evaluasi* dari perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

Pengawasan merupakan hal penting dalam upaya untuk menjamin suatu kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana yang ingin dicapai. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi,

untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan (Kadarman 2001).

Pengawasan merupakan rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan. Pengawasan dilakukan untuk menjamin semua kebijakan program dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis.

Pengawasan keuangan daerah, dalam hal ini adalah pengawasan terhadap anggaran keuangan daerah/APBD. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 42 menjelaskan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah. Berdasarkan dari Undang-Undang tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh DPRD yang berfokus kepada pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.

Pengawasan yang dilakukan DPRD bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat daerah dalam melaksanakan tugas dan

kewenangannya serta mengembangkan mekanisme *checks and balances* antara DPRD dan eksekutif demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Hal yang sama dikemukakan oleh Sunarso (2005) bahwa DPRD berfungsi sebagai lembaga pengawasan politik dan sebagai struktur politik akan mewujudkan pola demokrasi, salah satunya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD wujudnya adalah dengan melihat, mendengar, dan mencermati pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh OPD, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi yang diberikan oleh konstituen, tanpa masuk ke ranah pengawasan yang bersifat teknis. Apabila ada dugaan penyimpangan, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memberitahukan kepada Kepala Daerah untuk ditindaklanjuti oleh Satuan Pengawas Internal.
- b. Membentuk pansus untuk mencari informasi yang lebih akurat.
- c. Menyampaikan adanya dugaan penyimpangan kepada instansi penyidik (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK).

Pengawasan anggaran meliputi seluruh siklus anggaran, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban. Secara sederhana pengawasan anggaran merupakan proses pengawasan terhadap kesesuaian perencanaan anggaran dan pelaksanaannya dalam melaksanakan pembangunan daerah. Pengawasan terhadap pelaksanaan perlu dilakukan, hal ini bertujuan

untuk memastikan seluruh kebijakan publik yang terkait dengan siklus anggaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berorientasi pada prioritas publik. Namun sebelum sampai pada tahap pelaksanaan, anggota dewan harus mempunyai bekal pengetahuan mengenai anggaran sehingga ketika melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, anggota dewan telah dapat mendeteksi apakah ada terjadi kebocoran atau penyimpangan alokasi anggaran.

ANALISIS KEUNGGULAN DAN POTENSI SEKTOR STRATEGIS

Sektor Unggulan

Hasil analisis dengan menggunakan metode LQ menunjukkan bahwa sektor pertanian secara keseluruhan masih merupakan sektor andalan pembangunan wilayah artinya bahwa pembentukan PDRB Papua Barat selama periode tersebut masih didominasi oleh sektor pertanian yang tersebar merata di seluruh wilayah kabupaten, kecuali Kabupaten Sorong dan Kota Sorong dengan $LQ < 1$. Sektor lainnya yang juga memberikan kontribusi adalah sektor bangunan/konstruksi, sektor jasa-jasa, sektor perdagangan hotel dan restoran, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor angkutan dan komunikasi serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

Melalui pendekatan analisis input output, dapat dilihat keseimbangan antara total permintaan dengan total penyediaan (penawaran) dari seluruh sektor ekonomi. Struktur permintaan seluruh sektor Provinsi Papua Barat pada tahun 2013 yang sebesar 107.373 milyar rupiah, terdiri dari 30,44 persen digunakan untuk memenuhi permintaan antara untuk proses produksi dalam menghasilkan barang dan jasa, dan sekitar 69,56 persen digunakan untuk memenuhi permintaan akhir. Tingginya permintaan akhir disebabkan oleh permintaan untuk konsumsi rumah tangga, pembentukan modal, dan ekspor, yang terutama disebabkan oleh tingginya ekspor.

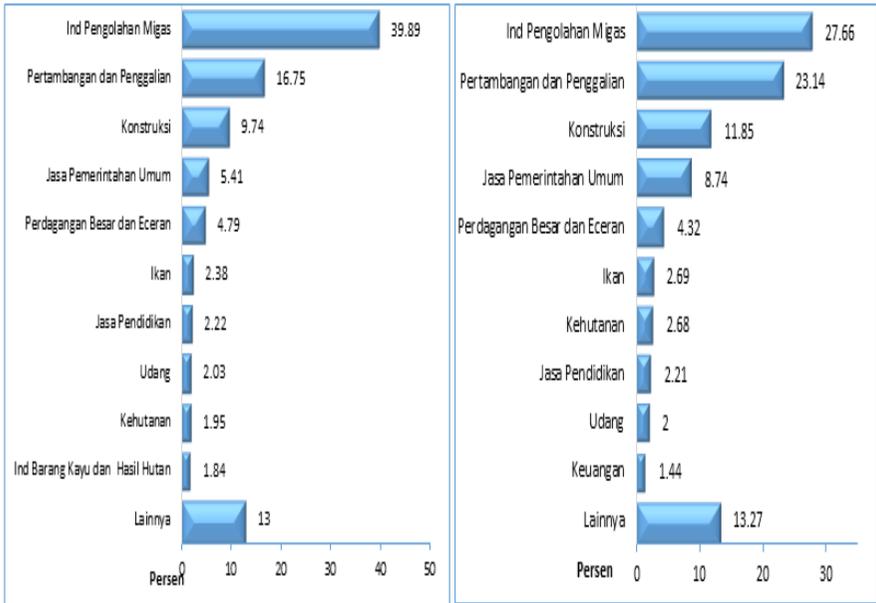
Akumulasi penawaran barang dan jasa yang mencapai 107.373 milyar rupiah dan mampu dipenuhi oleh output domestik sebesar 85.677 miliar rupiah atau sekitar 79,79 persen dan yang berasal dari impor sebesar 21.696 milyar rupiah atau sekitar 20,21 persen dari total penawaran. Kebutuhan akan produk barang dan jasa dalam perekonomian Papua Barat didominasi oleh barang dan jasa produksi lokal, dengan porsi penawaran terbesar dari industri pengolahan Migas sebesar 34,5 persen dan dari perikanan hanya 1,89 persen.

Sektor Industri Pengolahan Migas memiliki permintaan terbesar, yaitu mencapai 37.054 milyar rupiah, yang sebagian besar digunakan untuk memenuhi permintaan dari luar Provinsi Papua Barat (provinsi lain dan luar negeri) yakni sebesar 30.283 milyar rupiah (81,73 persen), sedangkan yang digunakan untuk permintaan antara sebesar 5.318 milyar rupiah (14,35 persen) dan sisanya 1.453 milyar rupiah (3,92 persen) untuk memenuhi permintaan akhir domestik dalam hal ini adalah perubahan stok. Untuk memenuhi permintaan kategori tersebut, sebagian besar (92,24 persen) berasal dari produksi domestik. Permintaan terbesar kedua adalah kategori Pertambangan dan Penggalian yang mencapai 14.354 milyar rupiah, yang sebagian besar digunakan untuk proses produksi kembali atau permintaan antara sebesar 10.784 milyar rupiah (75,13 persen) sisanya untuk permintaan domestik (-0,01 persen) dan ekspor (24,88 persen).

Output merupakan nilai produksi barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh seluruh kategori ekonomi di suatu daerah. Besarnya output yang mampu memberikan

sumbangan dalam pembentukan output secara keseluruhan dalam perekonomian Provinsi Papua Barat tahun 2013 sebesar 85.667 milyar rupiah. Lima sektor ekonomi yang dominan dalam penciptaan output tersebut adalah industri pengolahan migas, pertambangan dan penggalian, konstruksi, jasa pemerintahan umum, dan perdagangan besar dan eceran, yang mencapai 76,59 persen.

Nilai tambah bruto adalah balas jasa terhadap faktor produksi yang tercipta karena adanya kegiatan produksi, yang dirinci menurut kompensasi tenaga kerja, surplus usaha neto, konsumsi modal tetap, pajak lainnya atas produksi, dan subsidi lainnya produksi (sebagai pengurang). Besarnya nilai tambah di tiap-tiap sektor ditentukan oleh besarnya output (nilai produksi) yang dihasilkan dan jumlah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Oleh sebab itu, suatu sektor yang memiliki output besar belum tentu memiliki nilai tambah yang juga besar, karena masih tergantung pula pada seberapa besar biaya produksinya. Struktur tersebut seperti berikut:



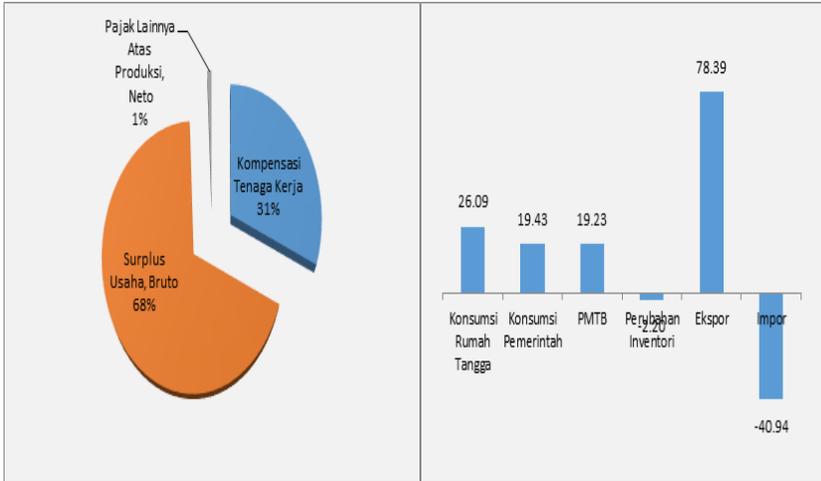
Gambar 48. Struktur Output dan Nilai Tambah Provinsi Papua Barat Tahun 2013 (Persen)

Sumber : Hasil pengolahan, 2017

Nilai tambah bruto Provinsi Papua Barat pada tahun 2013 adalah sebesar 52.998 milyar rupiah yang bersumber dari 10 sektor yang memiliki kontribusi terbesar. Sektor ekonomi yang mampu menciptakan nilai tambah bruto lebih dari separuh nilai tambah bruto total yang terbentuk di Provinsi Papua Barat adalah Industri Pengolahan Migas sebesar 14.657 milyar rupiah (27,66 persen); Pertambangan dan Penggalian sebesar 12.263 milyar rupiah (23,14 persen); dan Konstruksi sebesar 6.282 milyar rupiah (11,85 persen). Selanjutnya Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 4.634 milyar rupiah (8,74

persen) dan Perdagangan sebesar 2.290 milyar rupiah (4,32 persen) sedangkan sektor-sektor lainnya memiliki kontribusi terhadap total NTB dibawah 4 (empat) persen.

Pendekatan penghitungan PDRB dapat dilakukan secara lengkap yakni pendekatan produksi (PDRB menurut lapangan usaha), pendekatan penggunaan (PDRB menurut pengeluaran) dan pendekatan pendapatan (PDRB menurut komponen nilai tambahnya). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pendapatan, sebagian besar nilai tambah tersebut merupakan bagian dari komponen surplus usaha. Nilai surplus usaha netto dalam perekonomian Provinsi Papua Barat mencapai 36.179 milyar rupiah atau 68,27 persen dari total PDRB Papua Barat pada tahun 2013. Komponen nilai tambah terbesar kedua adalah kompensasi tenaga kerja yaitu 16.409 milyar rupiah atau sebesar 30,96 persen dari keseluruhan nilai tambah yang dihasilkan di Provinsi Papua Barat. Sedangkan komponen pajak lainnya atas produksi peranannya sangat kecil, hanya mencapai 409 milyar rupiah (0,77 persen).



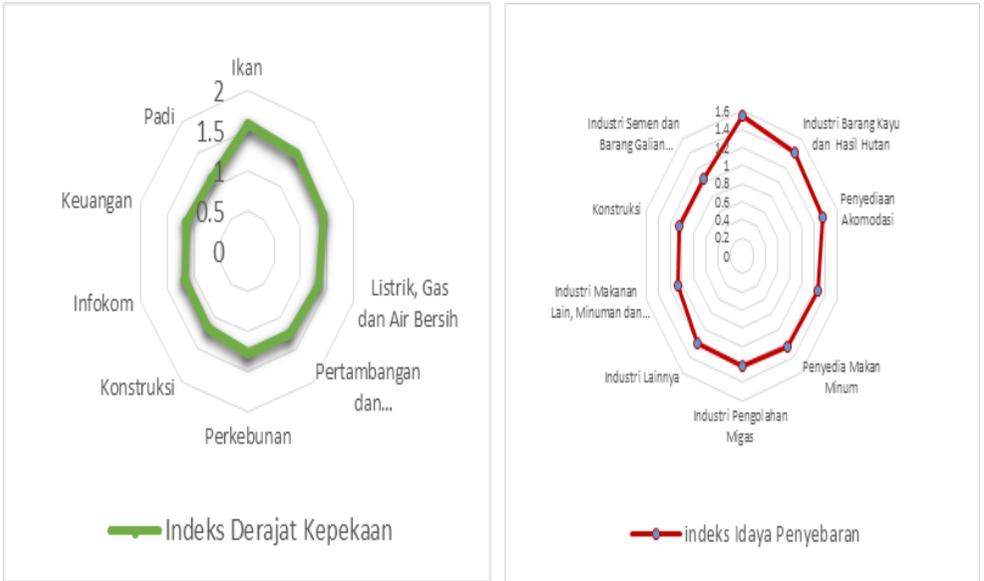
Gambar 49. Komposisi Input Primer dan Permintaan Akhir Provinsi Papua Barat Tahun 2013

Sumber : Hasil pengolahan, 2017

Identifikasi sektor yang mampu mendorong pertumbuhan sektor lain dengan cepat sering dikenal dengan istilah “sektor unggulan”. Proses identifikasi tersebut dengan analisis keterkaitan antar sektor (*industrial linkage analysis*). Keterkaitan tersebut berupa keterkaitan ke belakang (*backward linkages*) dan keterkaitan ke depan (*forward linkages*). Sektor unggulan diartikan sebagai sektor yang mempunyai tingkat keterkaitan ke depan dan ke belakang yang tinggi. Disebut sektor unggulan karena sektor tersebut mampu mendorong pertumbuhan atau perkembangan bagi sektor-sektor lainnya baik sektor yang menyuplai inputnya maupun sektor yang memanfaatkan output sektor unggulan tersebut sebagai input dalam proses produksinya.

Peningkatan kapasitas produksi di suatu sektor selalu menimbulkan dua dampak sekaligus, yaitu (i) dampak terhadap permintaan barang dan jasa yang diperlukan sebagai input dan (ii) dampak terhadap penyediaan barang dan jasa hasil produksi (output) yang dimanfaatkan sebagai input sektor lain. Dampak dari suatu kegiatan produksi terhadap permintaan barang dan jasa sebagai input yang diperoleh dari sektor lain disebut sebagai keterkaitan ke belakang (daya penyebaran), sedangkan dampak yang ditimbulkan karena penyediaan hasil produksi suatu sektor terhadap penggunaan input oleh sektor lain disebut sebagai keterkaitan ke depan (derajat kepekaan). Dari perhitungan daya penyebaran dan derajat kepekaan diperoleh suatu Indeks Daya Penyebaran (IDP) dan Indeks Derajat Kepekaan (IDK) yang digunakan untuk menentukan sektor-sektor unggulan di suatu daerah.

Sektor yang mempunyai derajat kepekaan tinggi memberi indikasi bahwa sektor tersebut mempunyai keterkaitan ke depan atau mempunyai daya dorong yang cukup kuat dibandingkan dengan sektor lain. Sebaliknya sektor yang mempunyai daya penyebaran tinggi berarti bahwa sektor tersebut mempunyai ketergantungan terhadap sektor lain. Adapun indeks daya penyebaran memberikan indikasi bahwa sektor-sektor yang mempunyai daya penyebaran lebih besar dari satu berarti daya penyebaran sektor tersebut berada di atas rata-rata daya penyebaran secara keseluruhan. Pengertian yang sama juga berlaku untuk indeks derajat kepekaan, dimana sektor yang mempunyai indeks derajat kepekaan lebih dari satu berarti derajat kepekaan sektor tersebut di atas derajat kepekaan rata-rata seluruh sektor.



Gambar 50. Indeks Derajat Kepekaan dan Daya Penyebaran

Sumber : Hasil pengolahan, 2017

Untuk mengetahui seberapa besar keterkaitan kedepan (*forward linkage*) dari sektor-sektor ekonomi Provinsi Papua Barat, dapat diketahui bahwa 10 sektor yang mempunyai indeks derajat kepekaan (IDK) tertinggi yaitu Sektor Ikan dengan Indeks Derajat Kepekaan (IDK) 1,574; disusul berturut-turut Industri Barang Kayu dan Hasil Hutan sebesar 1,481; Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor, Bukan Mobil dan Sepeda Motor 1,446; Listrik, Gas dan Air Bersih 1,347; Pertambangan dan Penggalian 1,272; Perkebunan 1,267; Konstruksi 1,184; Infokom 1,176; Keuangan dengan 1,147; dan Padi IDK 1,105.

Dengan indeks derajat kepekaan lebih besar dari satu maka sektor-sektor tersebut mempunyai potensi yang cukup tinggi untuk mendorong peningkatan output sektor-sektor lainnya yang berada di hilir sektor itu. Apabila terjadi peningkatan *final demand* pada sektor tersebut maka output sektor secara keseluruhan di Provinsi Papua Barat melalui proses kait-mengait akan meningkat pula.

Keterkaitan kebelakang yang biasa disebut daya penyebaran, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, membantu untuk menjelaskan seberapa besar dampak yang timbul dalam perekonomian secara keseluruhan apabila terjadi perubahan permintaan akhir terhadap sektor-sektor tertentu. Dampak perubahan ini tentunya dilihat dari seberapa besar sektor tersebut memerlukan input dalam proses produksinya sehubungan dengan tuntutan perubahan output sebagai akibat dari peningkatan permintaan akhir kepada sektor yang bersangkutan. Dengan tambahan input itu berarti sektor-sektor lain memperoleh peluang untuk meningkatkan output yang lebih besar guna memenuhi permintaan (sebagai input) sektor-sektor yang secara langsung terpengaruh oleh perubahan *final demand*. Sebab input bagi suatu sektor selain berasal dari output sendiri, sebagian besar berasal dari output sektor lain. Demikian seterusnya secara tidak langsung mempengaruhi sektor lain lagi, sehingga pada akhirnya secara keseluruhan mempengaruhi total output dalam perekonomian.

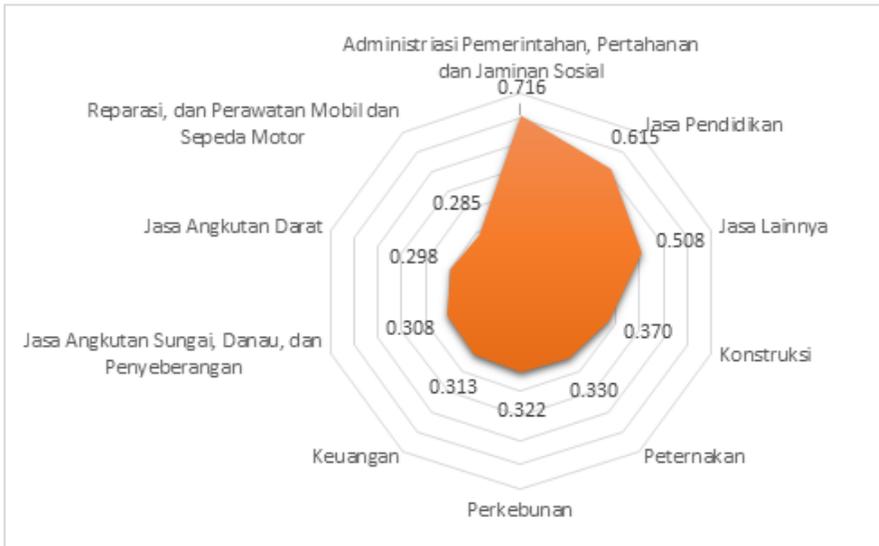
Besaran daya penyebaran (DP) dan indeks daya penyebaran (IDP) sektor-sektor ekonomi Provinsi Papua Barat, dapat diketahui bahwa 10 sektor yang mempunyai indeks daya penyebaran (IDP) tertinggi adalah: Sektor

Pergudangan, Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir dengan IDP sebesar 1,544; Industri Barang Kayu dan Hasil Hutan 1,420; Penyediaan Akomodasi 1,346; Industri Hasil Pengolahan Ikan Produk Perikanan Lain 1,264; Penyedia Makan Minum 1,246; Industri Pengolahan Migas 1,227; Industri Lainnya 1,200; Industri Makanan Lain, Minuman dan Tembakau 1,068; Konstruksi 1,055; dan Industri Semen dan Barang Galian Bukan Logam 1,041. Sektor Pergudangan, Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir dengan DP 1,923 satuan artinya setiap kenaikan satu unit output sektor tersebut sebagai akibat dari meningkatnya permintaan akhir terhadap sektor itu, maka akan menaikkan output secara keseluruhan sebesar 1,923 satuan. Demikian seterusnya penjelasan untuk sektor-sektor lain.

Analisis pengganda (*multiplier*) digunakan untuk menilai dampak perubahan variabel eksogen (permintaan akhir) suatu sektor terhadap penciptaan output, pendapatan dan kesempatan kerja. Ada dua tipe pengganda yang sering digunakan untuk analisis, yaitu pengganda tipe I dan pengganda tipe II. Pengganda tipe I diperoleh dari matriks kebalikan *leontief* model I-O terbuka sedangkan pengganda tipe II diperoleh dari matriks kebalikan *leontief* dalam model I-O tertutup dengan memberlakukan rumah tangga sebagai variabel endogen dalam model. Dalam model ini analisis pengganda yang digunakan adalah pengganda biasa (*simple multiplier*) yang dihasilkan dari model I-O terbuka.

Angka pengganda pendapatan menunjukkan bahwa bahwa sektor yang dapat memberikan efek maksimal terhadap peningkatan pendapatan penduduk di Provinsi Papua Barat tahun 2013 adalah Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yaitu sebesar 0,716. Artinya bahwa jika terjadi peningkatan permintaan akhir atas output Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 1 juta rupiah berdampak pada peningkatan pendapatan di seluruh sektor sebesar 716 ribu rupiah.



Gambar 51. Angka Pengganda Pendapatan Papua Barat

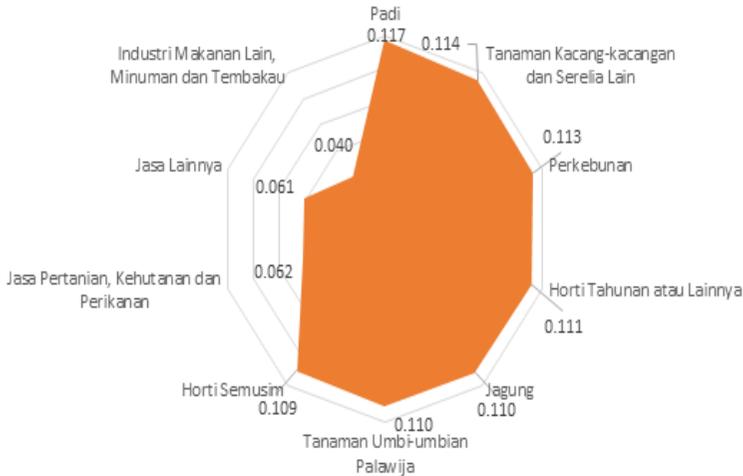
Sumber : Hasil pengolahan, 2017

Selain Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, sektor lain yang juga memberikan efek yang cukup berarti kepada peningkatan pendapatan penduduk adalah Jasa Pendidikan. Sektor ini mempunyai nilai pengganda pendapatan sebesar 0,615. Hal ini berarti apabila terjadi peningkatan permintaan akhir sebesar 1 juta rupiah pada sektor ini, sementara sektor lain diasumsikan



tetap, maka akan berdampak terhadap penciptaan pendapatan sebesar 615 ribu rupiah pada seluruh sektor ekonomi. Jika sasaran utama suatu daerah adalah mendorong peningkatan pendapatan masyarakat maka pemerintah harus mendorong pada semua stakeholder untuk mengalokasikan setiap satuan uang untuk dibelanjakan kepada output sektor yang mempunyai angka pengganda pendapatan terbesar. Hal ini dimaksudkan untuk optimalisasi peningkatan pendapatan dalam perekonomian.

Pengganda pendapatan dan pengganda tenaga kerja saling berkaitan dalam analisis, karena dampak yang ditimbulkan mempunyai kecenderungan yang sama. Apabila suatu sektor mempunyai angka pengganda tenaga kerja tinggi, maka berarti peningkatan permintaan akhir di suatu sektor tersebut akan menyebabkan peningkatan permintaan tenaga kerja dalam jumlah yang relatif besar. Berdasarkan angka pengganda tenaga kerja, sektor yang mempunyai angka pengganda terbesar adalah sektor Padi, yaitu sebesar 0,117. Hal ini menunjukkan tambahan satu miliar rupiah permintaan akhir di sektor Padi akan menyebabkan peningkatan kesempatan kerja seluruh sektor ekonomi sebanyak 111 orang. Sedangkan untuk sektor tanaman kacang-kacangan dan serelia Lain, angka pengganda tenaga kerjanya adalah sebesar 0,113. Hal ini berarti bahwa tambahan satu milyar permintaan akhir di sektor tanaman kacang-kacangan dan serelia lain, sementara sektor lain tetap, maka akan menyebabkan peningkatan kesempatan kerja seluruh sektor ekonomi sebanyak 113 orang.



Gambar 52. Angka Pengganda Tenaga Kerja Papua Barat

Sumber: Hasil pengolahan, 2017

Kenaikan permintaan akhir suatu sektor akan mempengaruhi penciptaan output di seluruh sektor ekonomi yang akan memberikan pengaruh terhadap output, nilai tambah bruto, kebutuhan tenaga kerja, maupun kebutuhan impor. Dalam bagian ini akan dianalisis dampak dari kenaikan permintaan akhir terhadap penciptaan output maupun nilai tambah bruto, yang dirinci menurut masing-masing komponen permintaan akhir. Dampak yang diakibatkan terhadap penciptaan output ataupun nilai tambah tersebut hanya disajikan secara menyeluruh.

Model I-O dapat menyatakan hubungan timbal balik antara output dengan permintaan akhir, sehingga jumlah output yang dapat di produksi tergantung dari jumlah permintaan akhirnya (hukum penyediaan dan permintaan). Output bisa juga menentukan besarnya permintaan akhir,

yang mencakup komponen: konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok dan ekspor barang maupun jasa. Dengan demikian maka dampak terhadap output akan terjadi apabila terjadi perubahan permintaan dari komponen-komponen tersebut.

Perhitungan dampak output masing-masing sektor ekonomi yang dipengaruhi oleh komponen permintaan akhir dapat diketahui bahwa sebagian besar output yang tercipta di Provinsi Papua Barat terbentuk oleh karena adanya dorongan dari Ekspor. Jika pengamatan dilakukan secara baris, dari total output domestik yang tercipta di Provinsi Papua Barat tahun 2013 sebesar 85.678 milyar rupiah, sebesar 60.060 milyar rupiah diakibatkan oleh permintaan ekspor. Dengan kata lain, peran dari ekspor dalam menciptakan output mencapai 70,10 persen dari keseluruhan output yang terbentuk di Provinsi Papua Barat. Komponen lain yang juga berpengaruh cukup besar dalam pembentukan output adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Konsumsi Pemerintah. Kedua komponen tersebut membentuk output dalam perekonomian Provinsi Papua Barat sebesar 9.151 milyar rupiah dan 7.411 milyar rupiah. Sedangkan komponen permintaan akhir lainnya yaitu Konsumsi Rumah Tangga dan Perubahan Stok (Inventori), pengaruhnya terhadap pembentukan output hanya sebesar 7.374 milyar rupiah dan 1.680 milyar rupiah.

Apabila kita telusuri dampak permintaan akhir terhadap pembentukan output menurut sektor, pengaruh terbesar dari permintaan akhir terhadap pembentukan output terjadi di sektor Industri Pengolahan Migas yang mencapai

34.181 milyar rupiah atau sebesar 39,89 persen, kemudian terbesar kedua dan ketiga adalah Pertambangan dan Penggalian sebesar 14.354 milyar rupiah (16,75 persen) dan Konstruksi sebesar 8.346 milyar rupiah (9,74 persen). Sedangkan pada Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, pengaruhnya adalah sebesar 4.634 milyar rupiah atau sebesar 5,41 persen.

Penciptaan pendapatan masyarakat di Provinsi Papua Barat sebagian besar masih dari akibat pengaruh dari komponen permintaan akhir Ekspor. Komponen ekspor mempengaruhi penciptaan NTB sebesar 34.421 milyar rupiah. Komponen ini mempengaruhi penciptaan NTB di Provinsi Papua Barat sebesar 64,95 persen disusul komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Konsumsi Pemerintah masing-masing sebesar 12,64 persen dan 10,88 persen. Sisanya sebesar 11,54 persen merupakan pengaruh dari Konsumsi Rumah Tangga dan Inventori.

Dampak permintaan akhir terhadap penciptaan NTB masyarakat terbesar terjadi di sektor Industri Pengolahan Migas sebesar 14.656 milyar rupiah (27,647 persen), terbesar kedua dan ketiga terjadi di Pertambangan dan Penggalian dan Konstruksi masing-masing sebesar 12.261 milyar rupiah dan 6.298 milyar rupiah.

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang balas jasa terhadapnya merupakan salah satu dari komponen input primer. Sehingga sesuai dengan asumsi dasar I-O, maka tenaga kerja memiliki hubungan linear dengan output. Hal ini berarti bahwa naik turunnya output di semua sektor akan berpengaruh terhadap naik turunnya jumlah tenaga kerja di sektor tersebut.

Tenaga kerja yang terbentuk terbesar berasal dari pengaruh Ekspor, yang mencapai sekitar 146 ribu orang, diikuti oleh Konsumsi Rumah Tangga sekitar 137 ribu orang, Konsumsi Pemerintah sekitar 57 ribu orang, dan PMTB mencapai sekitar 38 ribu orang. Lebih detail apabila kita lihat menurut sektornya, sektor tertinggi adalah sektor Perkebunan mencapai sekitar 54 ribu orang atau 14,43 persen dari total tenaga kerja di Provinsi Papua Barat. Terbesar kedua dan ketiga adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor yang mencapai sekitar 50 ribu orang (13,23 persen) dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mencapai sekitar 33 ribu orang (8,80 persen). Dampak permintaan akhir terhadap kesempatan kerja pada sektor Horti Semusim mencapai sekitar 30 ribu orang (8,02 persen).

Indikator Sektor Terpilih

Sektor Industri Pengolahan Migas, Pertambangan dan Penggalian, kategori Konstruksi, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Perdagangan merupakan sektor yang memberikan nilai tambah terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Papua Barat. Sektor-sektor dengan pengganda output terbesar adalah Sektor Pergudangan, Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir yang ada pada urutan pertama, Industri Barang Kayu dan Hasil Hutan; Penyediaan Akomodasi; Industri Hasil Pengolahan Ikan Produk Perikanan Lain; Penyedia Makan Minum; Industri Pengolahan Migas; Industri Lainnya; Industri Makanan Lain, Minuman dan Tembakau; Konstruksi;

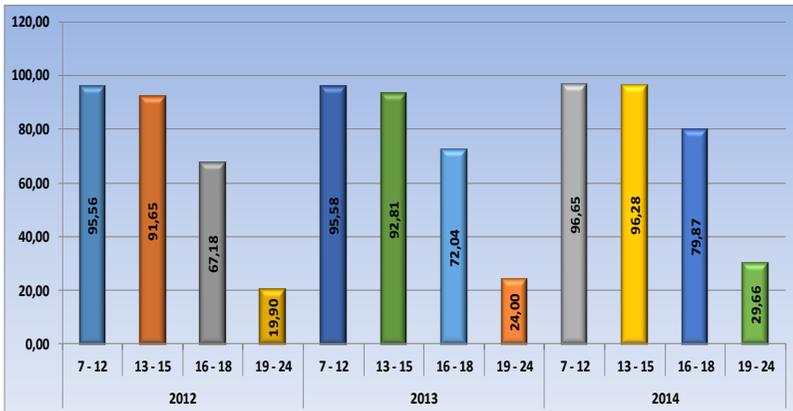
Industri Semen dan Barang Galian Bukan Logam. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, jasa pendidikan merupakan sektor yang memberikan dampak pada peningkatan pendapatan di seluruh sektor, sedangkan sektor yang memberikan permintaan teraga kerja tertinggi berada pada sektor pertanian

Alokasi belanja Provinsi Papua Barat baik yang bersumber dari APBN maupun APBD untuk membiayai pembangunan di Provinsi Papua Barat selama 5 tahun terakhir cenderung meningkat sehingga memberikan dampak terhadap penurunan jumlah penduduk miskin namun terhadap penyerapan tenaga kerja berfluktuasi dan terhadap distribusi pendapatan mamiliki kecenderungan melebar. Kondisi ini menunjukkan bahwa alokasi belanja pemerintah daerah hanya terfokus kepada pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan sedangkan penyerapan tenaga kerja dan distribusi pendapatan masyarakat kurang tersentuh dengan program-program kegiatan.

Indeks Pembangunan Manusia cenderung meningkat namun masih lebih disebabkan oleh peningkatan harapan hidup dan peningkatan daya beli masyarakat oleh sebab itu jasa pendidikan dan kesehatan perlu didorong sehingga IPM akan mengalami peningkatan pada setiap Kabupaten/kota. Terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian perlu didorong sehingga penyerapan tenaga kerja akan cepat bertambah. Sektor jasa pendidikan akan memberikan dampak terhadap pendapatan.

Jasa Pendidikan

Percepatan pembangunan sektor pendidikan yang berkategori Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) dengan program maju bersama mencerdaskan Indonesia yang diwujudkan dalam tiga program pendukung yaitu: Sarjana Mendidik di Daerah 3T, Pendidikan Profesi Guru SM3T, dan Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi (PPGT). Program percepatan afirmasi pendidikan yang digagas oleh UP4B bekerjasama dengan lintas instansi dan pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat yang bertujuan untuk mendapatkan putra-putri terbaik Papua untuk dikirim ke berbagai lembaga pendidikan di tanah air.



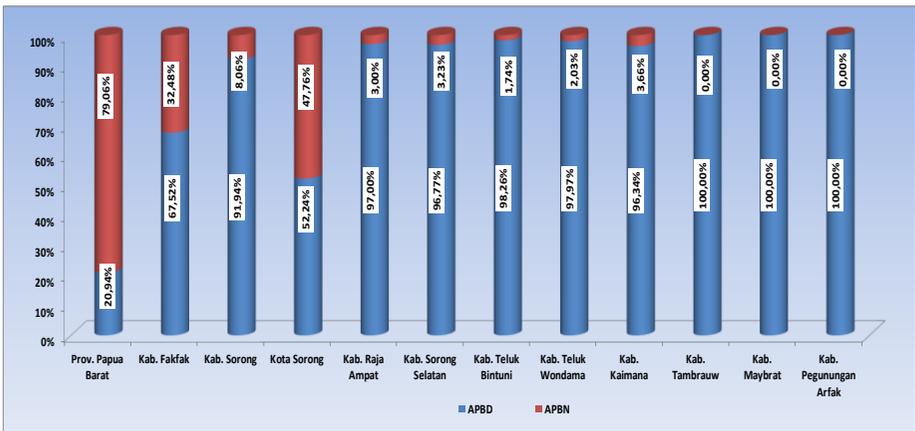
Gambar 53. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Papua Barat Tahun 2012 s.d 2016

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat (Data diolah)

Capaian Pembangunan dalam bidang pendidikan dapat dilihat dari peningkatan kualitas sarana pendidikan, peningkatan angka partisipasi sekolah (APS), dan beberapa

indikator lainnya. Selama tiga tahun terakhir, angka APS terus menunjukkan peningkatan untuk semua kelompok umur sebagaimana disajikan pada Gambar 53.

APS untuk kelompok umur 16-18 tahun dan umur 19-24 tahun pada tahun 2014 menunjukkan peningkatan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan APS mengindikasikan adanya peningkatan dari efek kenaikan belanja pemerintah di bidang pendidikan meskipun dampaknya tidak berhubungan langsung. Tren peningkatan belanja pemerintah di sektor pendidikan dapat dilihat dari grafik berikut ini:



Gambar 54. Alokasi Belanja APBN dan APBD Berdasarkan Fungsi Pendidikan Tahun 2015 Per Kabupaten/ Kota di Papua Barat

Sumber: Kanwil Perbendaharaan Papua Barat

Besarnya alokasi belanja di sektor pendidikan merupakan komitmen pemerintah untuk memenuhi Undang-Undang. Dari grafik diatas terlihat bahwa hampir sebagian besar alokasi belanja untuk pendidikan di Papua Barat

bersumber dari dana APBN sedangkan dana APBD sebagian besar beralokasi di provinsi disebabkan karena ada beberapa kabupaten yang penyelenggara pembangunan pendidikan langsung dikelola oleh provinsi. Untuk kabupaten Tambrau, Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Pegunungan Arfak terlihat tidak memiliki alokasi untuk penyelenggara pembangunan pendidikan dari dana APBD karena langsung di kelola oleh provinsi sedangkan dana APBN di kelola oleh pemerintah kabupaten.

Jasa Kesehatan

Pemerintah menetapkan prioritas peningkatan kesehatan guna mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals/MDGs*) dalam hal penanggulangan penyakit HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya. Ancaman terhadap HIV/AIDS dan malaria di tanah Papua menjadi salah satu sasaran di sektor kesehatan selain angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Dukungan sarana dan prasarana kesehatan, infrastruktur dalam bentuk kualitas dan kuantitas sangat menentukan peningkatan program kesehatan.

Tabel 10. Indikator Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2012 - 2015

Uraian	2012	2013	2014	2015
Angka Harapan Hidup	64,88	65,05	65,14	65,19
Jumlah Rumah Sakit	16	16	16	16
Jumlah Puskesmas	126	141	141	151
Jumlah Pustu	397	379	na	na
Jumlah Polindes	17	239	na	na
Jumlah Puskesmasling	212	na	na	na
Persentase Penolong Kelahiran Secara Medis	75,99	69,46	73,28	77,31

Sumber : BPS Provinsi Papua Barat (Data diolah)

Semakin besar jumlah penduduk maka semakin banyak fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang diperlukan. Menurut data BPS, pelayanan tenaga kesehatan di Papua Barat masih sangat timpang. Pada Tahun 2014 dengan jumlah penduduk sebanyak 828.293 jiwa sementara jumlah tenaga dokter 267 orang, maka dapat dikatakan bahwa tiap dokter dapat melayani sebanyak 3.102 orang penduduk sebagaimana disajikan pada Tabel 10.

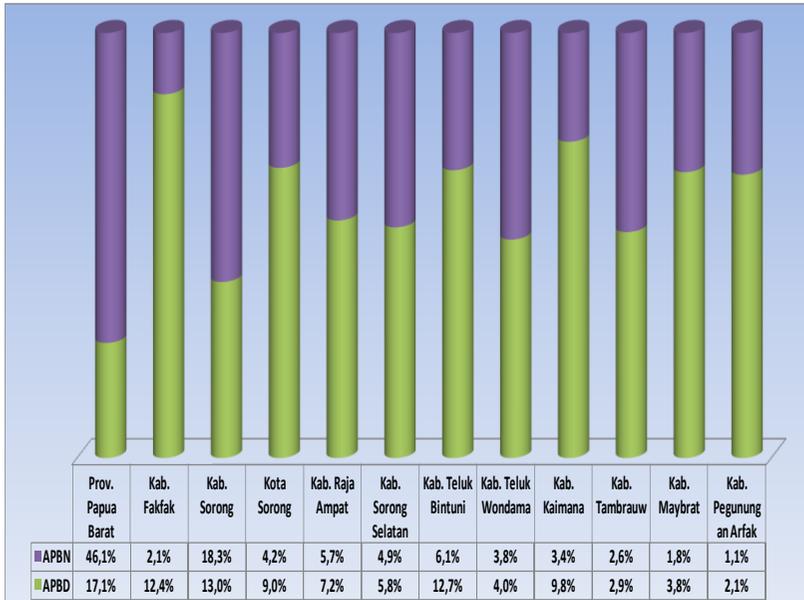
Tabel 11. Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Dokter (Orang) Tahun 2014

Kabupaten/Kota	Dokter				Rasio
	Ahli	Umum	Gigi	Jumlah	
Fakfak	1	19	5	25	2.836,1
Kaimana	0	10	2	12	4.258,3
Teluk Wondama	0	6	2	8	3.566,8
Teluk Bintuni	4	38	4	46	1.230,4
Manokwari	0	16	3	19	7.904,2
Sorong Selatan	0	0	0	0	-
Kabupaten Sorong	0	0	0	0	-
Raja Ampat	4	23	3	30	1.485,6
Tambrau	0	0	0	0	-
Maybrat	0	0	0	0	-
Manokwari Selatan	0	0	0	0	-
Pegunungan Arfak	0	0	0	0	-
Kota Sorong	58	55	14	127	1.668,0
Jumlah	67	167	33	267	3.102,2

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat (Data diolah)

Tabel 11. di atas menunjukkan bahwa Papua Barat sangat kekurangan tenaga medis. Rasio dokter terhadap jumlah penduduk sangat jauh dari jumlah yang ideal bahkan terdapat beberapa kabupaten yang tidak memiliki dokter ahli yang bertugas di daerah tersebut dalam pelayanan kesehatan, termasuk penyediaan fasilitas kesehatan dan luasnya cakupan wilayah dalam pelayanan medis.

Perkembangan indikator kesehatan masyarakat tidak lepas dari alokasi belanja di sektor kesehatan. Tingginya alokasi anggaran di tahun 2015 diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan tenaga dokter baik di kota maupun di kabupaten, seperti yang terlihat pada Gambar 55.



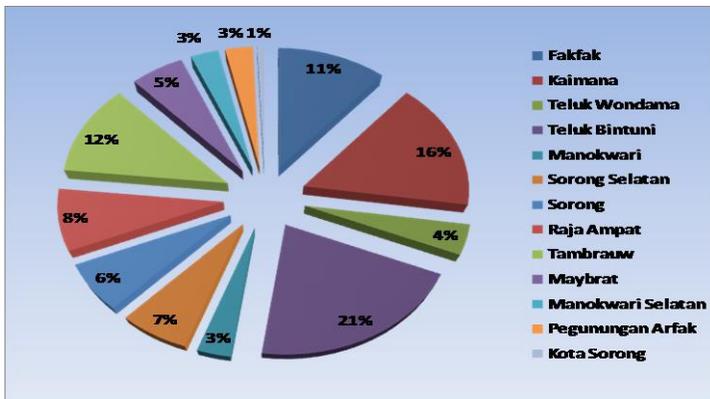
Gambar 55. Alokasi Belanja APBN dan APBD Berdasarkan Fungsi Kesehatan Tahun 2015

Sumber: Kanwil Perbendaharaan Papua Barat

Alokasi belanja tahun 2015 berdasarkan fungsi kesehatan dari APBD proporsinya lebih tinggi dibandingkan alokasi dari APBN, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sangat memperhatikan masalah kesehatan di daerahnya. Alokasi dana kesehatan terbesar berada di tingkat Provinsi karena merupakan pusat pengembangan dan memiliki fasilitas kesehatan yang lebih baik sedangkan kabupaten/kota mendapat alokasi anggaran lebih kecil disebabkan masih rendahnya pengembangan fasilitas kesehatan di daerah tersebut.

Sektor Pertanian

Pengolahan lahan pertanian yang modern akan mendorong tercapainya produktivitas yang optimal dan penyerapan tenaga kerja sehingga memberikan tambahan pendapatan bagi tenaga kerja lokal. Luas daratan yang tersedia menunjukkan besarnya potensi lahan pertanian yang dapat di garap. Masing-masing Kabupaten / Kota memiliki luas daratan yang berbeda-beda.



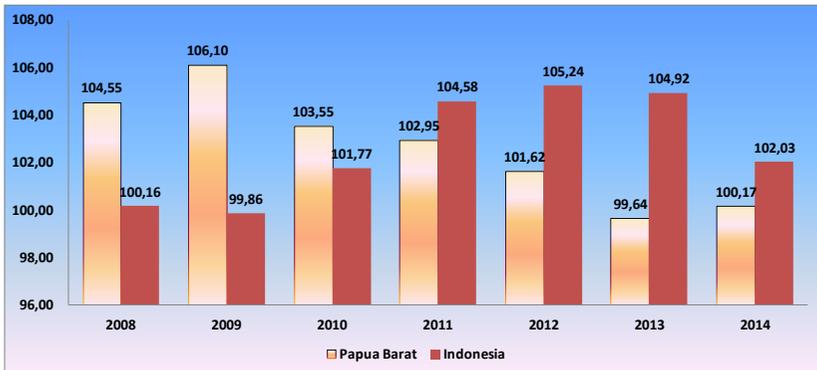
Gambar 56. Komposisi Luas Daratan di Provinsi Papua Barat

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat (Data diolah)

Daerah yang mendominasi luas wilayah daratan di Papua Barat adalah Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Tambrau. Luas bentang daratan merupakan modal utama dalam pengelolaan potensi lahan pertanian. Namun luas daratan tersebut belum menjamin ketersediaan lahan pertanian yang potensial. Meskipun jumlah tenaga kerja di sektor pertanian cenderung terus menurun, namun upaya peningkatan pengelolaan sektor

pertanian terus ditingkatkan.

Salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daya beli petani di pedesaan, digunakan Nilai Tukar Petani (NTP). NTP merupakan perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase). NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Kesimpulannya semakin tinggi NTP secara relatif tingkat kemampuan atau daya beli petani juga semakin kuat. Besaran NTP dipengaruhi oleh nilai indeks harga yang diterima (IT) petani dan indeks harga yang dibayar (IB) oleh petani. Berikut disajikan grafik perkembangan Nilai Tukar Petani di Provinsi Papua Barat.

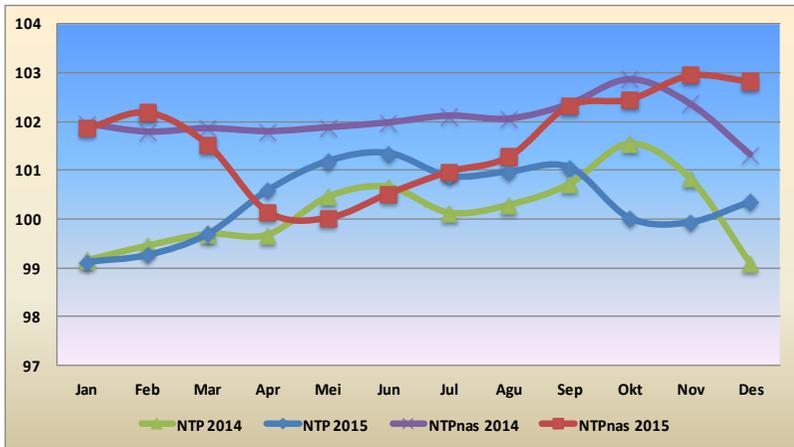


Gambar 57. Nilai Tukar Petani Provinsi Papua Barat dan Nasional Tahun 2008 s.d 2014

Sumber: BPS (Data diolah)

NTP merupakan perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib). $NTP > 100$, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya.

Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya. $NTP = 100$, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya. $NTP < 100$, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

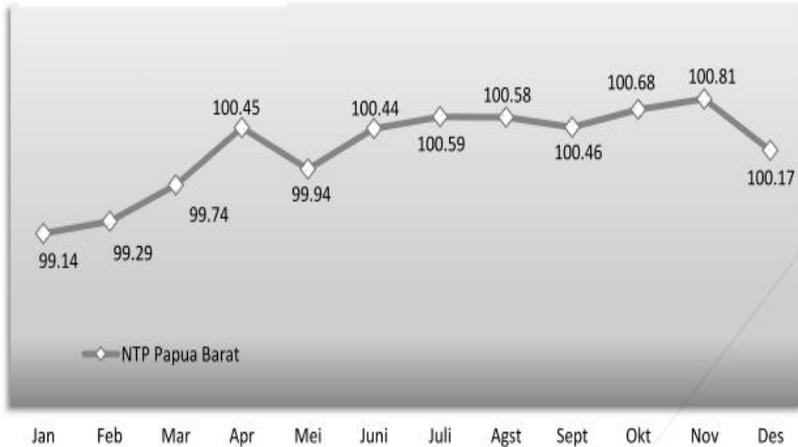


Gambar 58. Perbandingan NTP Provinsi Papua Barat dan Nasional Tahun 2014 dan 2015

Sumber: BPS (Data diolah)

Selama tahun 2015 perkembangan NTP di Papua Barat cenderung berfluktuasi (Gambar 57). NTP pada triwulan I berada di bawah 100 yang menandakan bahwa petani mengalami defisit yaitu harga barang konsumsi lebih tinggi dibandingkan dengan harga produksi. Kondisi tersebut membaik di triwulan II dan terus meningkat atau semakin

bagus. NTP mengalami pelemahan pada bulan November selanjutnya naik di bulan Desember. Tentunya keadaan ini merupakan indikasi melemahnya daya beli petani dalam mengolah hasil pertanian. Perkembangan NTP Tahun 2016 dapat diamati pada Gambar 59 berikut.



Gambar 59. Perbandingan NTP Provinsi Papua Barat Tahun 2016

Sektor Transportasi

Keterhubungan antar wilayah merupakan faktor yang fundamental dalam pembangunan ekonomi. Akses transportasi di wilayah Papua Barat masih dapat dikatakan sangat terbatas. Hubungan antar wilayah kabupaten bahkan masih tergolong sulit karena infrastruktur jalan yang kurang memadai dengan jarak tempuh yang memakan waktu lama, hal ini tentu saja memicu mahalnya biaya transportasi untuk mendukung mobilisasi orang dan penyediaan barang dan jasa. Perkembangan prasarana jalan di wilayah Provinsi

Papua Barat dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2012 terus mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut terjadi disemua tingkat pemerintahan yang berwenang antara lain jalan negara, jalan provinsi dan jalan kabupaten sebagaimana tabel berikut:

Tabel 12. Panjang Jalan di Papua Barat Menurut Tingkat Pemerintahan Yang Berwenang Tahun 2005 – 2012 (Km)

Tahun	Negara	Provinsi	Kabupaten	Jumlah
2005	237.418	350.113	916.886	1.504.417
2006	345.310	488.470	1.121.650	1.955.430
2007	615.810	686.175	3.882.222	5.184.207
2008	635.810	693.175	4.071.722	5.400.707
2009	1.168.160	973.280	3.764.834	5.906.274
2010	-	-	-	-
2011	799.891	875.220	4.728.138	6.403.249
2012	997.554	749.660	5.604.496	7.351.710

Sumber : BPS Papua Barat (Data diolah)

Bentuk realisasi program percepatan pembangunan Provinsi Papua Barat sesuai dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat dalam rangka pengembangan infrastruktur dasar. Program tersebut rencananya akan membangun dan meningkatkan prasarana jalan trans Papua dan Papua Barat. Pembangunan jalan untuk menghubungkan antara kabupaten /kota yang selama ini belum terhubung melalui jalan darat.

Tabel 13. Lalu Lintas Penerbangan di Papua Barat Tahun 2009 s.d 2013

Deskripsi	Unit	2009	2010	2011	2012	2013
1. Pesawat						
Berangkat	Unit	9.742	11.820	11.632	13.956	14.289
Datang	Unit	9.588	11.656	11.614	13.818	14.289
2. Penumpang						
Berangkat	Orang	234.531	349.183	347.505	513.301	612.397
Datang	Orang	240.699	334.727	333.428	485.541	569.770
Transit	Orang	155.854	198.831	159.992	173.913	171.930
3. Barang						
Muat	Kg	2.213.155	1.436.299	1.081.857	1.198.818	1.854.514
Bongkar	Kg	2.254.609	1.238.740	1.100.539	2.064.780	2.272.899
4. Bagasi						
Muat	Kg	1.475.230	2.919.246	3.219.020	4.288.616	5.187.661
Bongkar	Kg	1.175.659	3.300.877	3.378.214	4.729.761	5.238.606
5. Pos/Paket						
Muat	Kg	605	21.698	18.583	25.413	13.676
Bongkar	Kg	1.267	1.955	15.542	21.645	15.147

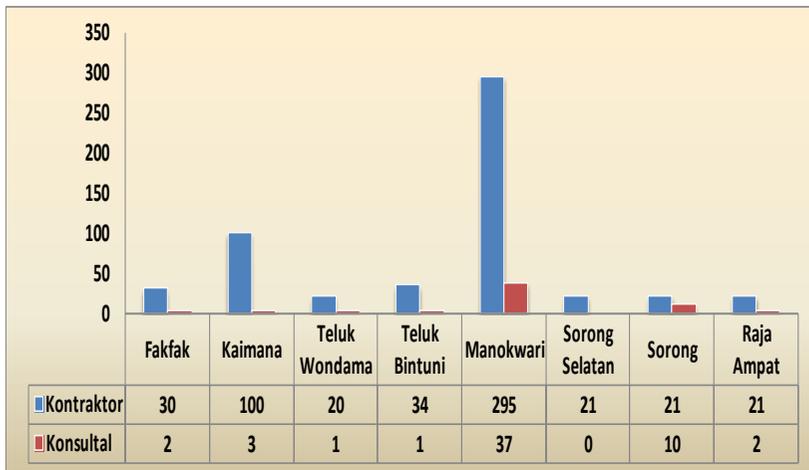
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat (Data diolah)

Berdasarkan data pada Tabel 13 terlihat bahwa perkembangan prasarana jalan di Provinsi Papua Barat cenderung berdampak pada sektor lain, salah satunya adalah perkembangan lalu lintas penerbangan di Papua Barat yang juga mengalami peningkatan. Tingginya jumlah calon penumpang maupun barang yang akan di pos/paket karena akses ke bandara lebih mudah terjangkau saat ini.

Konstruksi

Konstruksi merupakan suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya seperti gedung, jalan, jembatan, dan sebagainya. Pengembangan konstruksi di Papua Barat

dapat dikatakan berjalan dengan lambat. Salah satu faktor penyebabnya adalah permasalahan dalam pengadaan tanah. Banyak kasus terhentinya pembangunan gedung perkantoran yang disebabkan oleh permasalahan klaim tanah adat oleh masyarakat setempat. Penyebaran perusahaan konstruksi di Papua Barat relatif tersebar di semua kabupaten/kota kecuali di Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrau. Persaingan penyedia jasa konstruksi menyebabkan kondisi tambah kurang dalam eksistensinya. Dalam kaitannya dengan pekerjaan konstruksi patut untuk dicermati populasi pekerja kontraktor dan konsultan yang menggambarkan sebaran tenaga di bidang konstruksi. Berikut disajikan perkembangan sebaran kontraktor dan konsultan di wilayah Papua Barat.

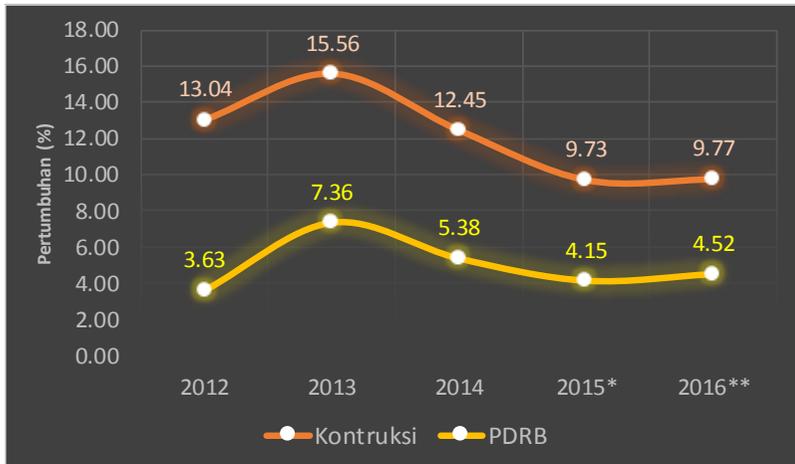


Gambar 60. Kontraktor dan Konsultan di Papua Barat Tahun 2014

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat (Data diolah)

Pada periode sampai dengan tahun 2014, perkembangan jumlah penyedia jasa konstruksi di tiap wilayah baik untuk kontraktor maupun konsultan mengalami penurunan, bahkan terdapat kabupaten/kota yang sampai saat ini belum memiliki kontraktor dan konsultan. Terlihat dari tahun 2013 jumlah kontraktor dan konsultan konstruksi sebanyak 1485 namun tahun 2014 menjadi 598 orang.

Laju pertumbuhan konstruksi Provinsi Papua Barat mengalami fluktuasi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Secara umum, pertumbuhan konstruksi di Papua Barat selalu di atas pertumbuhan ekonomi Papua Barat. Gap pertumbuhan konstruksi dan pertumbuhan ekonomi semakin mengecil pada tahun 2016



Gambar 61. Laju Pertumbuhan Konstruksi dan PDRB di Papua Barat

Keterangan: ** Angka sangat sementara; * angka sementara

Sumber : BPS Provinsi Papua Barat (2016)

Sektor Strategis Papua Barat

Sektor strategis mengandung pengertian sebagai sektor yang mampu menjadi pemicu (triger dan/atau stimulator) dan pemacu (katalisator dan/atau akselerator) percepatan peningkatan pendapatan riil masyarakat secara berkelanjutan, dan sekaligus berperan sebagai instrumen efisiensi pemanfaatan alokasi sumber-sumber pembangunan. Sektor strategis diperlukan dalam rangka penerapan visi pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat.

Guna mencapai visi, Pembangunan Provinsi Papua Barat dengan melaksanakan misi guna menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, sesuai dengan dokumen RPJMD Papua Barat tahun 2017 s.d 2022 maka sasaran makro yang akan di capai, meliputi:

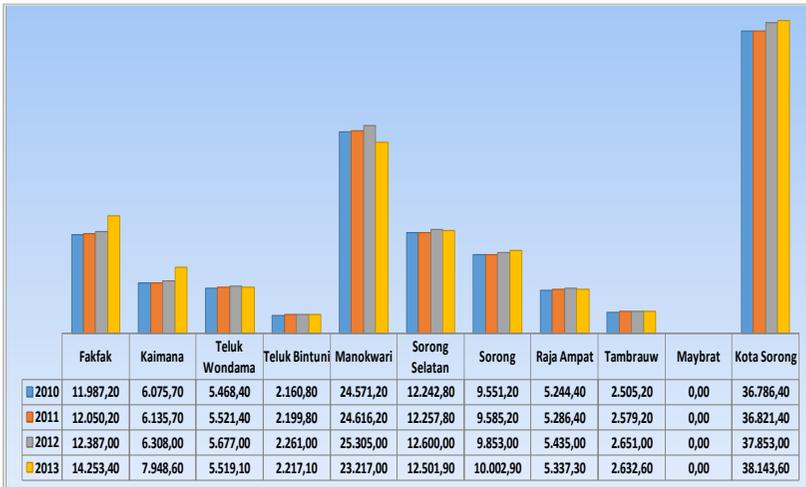
1. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi setiap tahun;
2. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas setiap tahun;
3. Mengendalikan laju inflasi setiap tahun;
4. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
5. Menurunnya Rasio Gini;
6. Menurunnya persentase tingkat kemiskinan;
7. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT);
8. Menurunnya Indeks Kesenjangan Wilayah/Indeks Williamson.

Sektor yang mempunyai derajat kepekaan tinggi memberi indikasi bahwa sektor tersebut mempunyai keterkaitan ke depan atau mempunyai daya dorong yang

cukup kuat dibandingkan dengan sektor lain. Hasil analisis menunjukkan bahwa sektor ekonomi Provinsi Papua Barat, dapat diketahui bahwa terdapat 10 sektor yang mempunyai indeks derajat kepekaan (IDK) tertinggi yaitu Sektor Ikan, Industri Barang Kayu dan Hasil Hutan, Perdagangan Besar dan Eceran, Listrik, Gas dan Air Bersih, Pertambangan dan Penggalian, Perkebunan, Konstruksi, Infokom, Keuangan; dan Padi. Dengan indeks derajat kepekaan lebih besar dari satu maka sektor-sektor tersebut mempunyai potensi yang cukup tinggi untuk mendorong peningkatan output sektor-sektor lainnya yang berada di hilir sektor itu. Apabila terjadi peningkatan *final demand* pada sektor tersebut maka output sektor secara keseluruhan di Provinsi Papua Barat melalui proses kait-mengait akan meningkat pula.

Kelautan dan Perikanan

Pengembangan sektor kelautan dan perikanan telah memberikan kontribusi dalam peningkatan aktifitas ekonomi daerah. Salah satu indikator perkembangan sektor kelautan dan perikanan adalah tingkat produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan perikanan laut. Sektor kelautan dan perikanan di Papua Barat menjadi sektor strategis yang memiliki potensi untuk terus dikembangkan.



Gambar 62. Perkembangan Kelautan dan Perikanan di Papua Barat

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat

Lebih dari 70% luas wilayah Papua Barat berbatasan dengan garis pantai yang artinya Papua Barat memiliki keunggulan zona ekonomi eksklusif perairan lain. Perkembangan ikan tangkap di Papua Barat terus meningkat terutama di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Fakfak. Berikut disajikan beberapa indikator perkembangan sektor kelautan dan perikanan.

Sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 telah mengamanatkan bahwa tujuan pengelolaan perikanan adalah untuk (1) meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil; (2) meningkatkan penerimaan dan devisa Negara; (3) mendorong perluasan kesempatan kerja; (4) meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein

ikan; (5) mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan; (6) meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing; (7) meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan; (8) mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ikan dan; (9) menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang. Pemerintah Provinsi Papua Barat telah melakukan berbagai upaya dalam peningkatan hasil perikanan baik dipasar segar atau diolah menjadi produk jadi hasil perikanan telah memberikan peningkatan, hal tersebut dapat terlihat dari gambar 62.

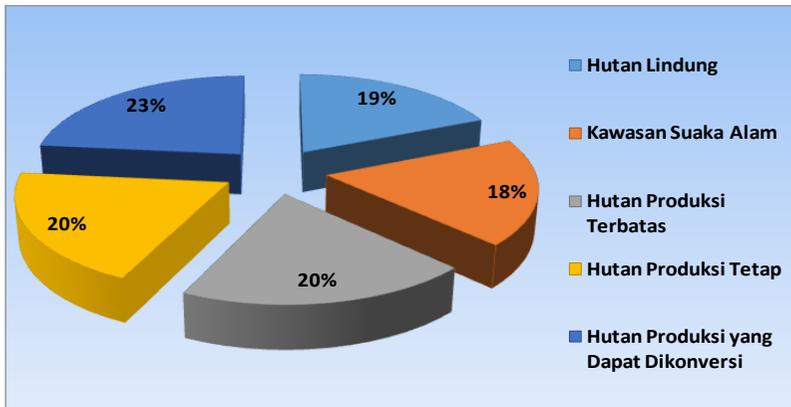
Tabel 14. Panjang Jalan di Papua Barat Menurut Tingkat Pemerintahan Yang Berwenang Tahun 2005 – 2012 (Km)

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah			
		2010	2011	2012	2013
1	Fakfak	11.987,00	12.048,00	12.386,00	14.253,40
2	Kaimana	6.075,70	6.135,70	6.308,00	7.948,60
3	Teluk Wondama	5.468,50	5.521,50	5.676,00	5.519,10
4	Teluk Bintuni	2.160,60	2.199,60	2.261,00	2.217,10
5	Manokwari	24.571,00	24.616,00	25.306,00	23.217,00
6	Sorong Selatan	12.242,80	12.257,80	12.601,00	12.501,90
7	Sorong	9.551,00	9.585,00	9.853,00	10.002,90
8	Raja Ampat	5.244,20	5.286,20	5.434,00	5.337,30
9	Tambrauw	2.505,00	2.579,00	2.652,00	2.632,60
10	Maybrat	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kota Sorong	36.786,20	36.821,20	37.852,00	38.143,60
	Papua Barat	116.592,00	117.050,00	120.329,00	121.773,50

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat

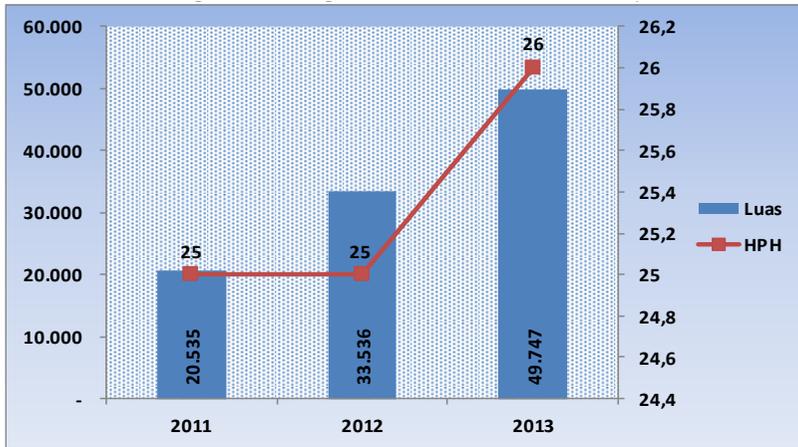
Kehutanan

Pengelolaan sumber daya kehutanan tentunya akan memberikan nilai tambah dalam peningkatan perekonomian daerah. Pembagian jenis hutan di wilayah Papua Barat dapat disajikan pada Gambar 63. Persentase jenis hutan terbesar adalah jenis hutan produksi yang dikonversi sebesar 23,34% sedangkan jenis hutan terkecil adalah areal hutan kawasan Suaka Alam sebesar 18 %. Perkembangan Hak Pengusahaan Hutan di Papua Barat dan luas pengusahaan hutan dapat disajikan pada Gambar 64.



Gambar 63. Perbandingan Jenis Hutan di Papua Barat Tahun 2013

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat (Data diolah)



Gambar 64. Perkembangan Hak Pengusahaan Hutan di Papua Barat Tahun 2011 – 2013

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat

Peternakan

Ternak dan hewan peliharaan merupakan budidaya yang mendukung pasokan daging dan menjadi komoditas perdagangan yang menopang pendapatan masyarakat. Pengelolaan peternakan yang baik tentunya akan sangat mendukung peningkatan pendapatan masyarakat. Berkembangnya sektor peternakan turut mendorong pengurangan pengangguran dan meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan karena pada umumnya yang menggeluti sektor peternakan adalah masyarakat di pedesaan. Perkembangan populasi ternak mengindikasikan adanya peningkatan nilai tambah masyarakat secara riil. Adapun tren populasi ternak di Papua Barat adalah sebagaimana tertera pada Tabel 15.

**Tabel 15. Perkembangan Populasi Ternak di Papua Barat
Tahun 2010 – 2014**

Ternak	Tahun		
	2012	2013	2014
Ayam Buras/Kampung	1.176.120	1.411.344	1.607.660
Ayam Ras Petelur	50.583	52.492	62.117
Ayam Ras Pedaging	1.395.387	645.862	1.260.053
Itik	25.190	32.223	52.119
Sapi	15.816	24.165	21.681
Kambing	5.083	12.261	12.315
Baba	7.335	22.997	30.935

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS BELANJA

Efisiensi Belanja Daerah

Pengertian efisiensi berhubungan dengan konsep produktifitas, dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Selama 5 tahun terakhir belanja di Provinsi Papua Barat di alokasikan pada urusan wajib dan urusan pilihan. Klasifikasi belanja daerah disebutkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 31 ayat (1), yang menyatakan bahwa belanja daerah dibedakan menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 32 ayat (2), klasifikasi urusan dalam APBD dikelompokkan menjadi 35 jenis urusan antara lain pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, ketahanan pangan dan sebagainya.

Porsi Alokasi Belanja terhadap masing-masing urusan selama tahun 2012 hingga tahun 2016 menunjukkan bahwa urusan administrasi pemerintahan memiliki porsi belanja yang mencapai 73.83 persen pada tahun 2012 dari total alokasi belanja sebesar Rp. 4.312.434.108.267,92 pada tahun berikutnya porsi alokasi belanja mengalami penurunan hingga mencapai 59,28 persen pada tahun 2016.

Walaupun proporsinya mengalami penurunan namun nilai nominalnya mengalami peningkatan.

Berdasarkan analisis sektoral, angka pengganda pendapatan terbesar dimiliki oleh sektor administrasi pemerintahan, pertahanan & jaminan sosial, yaitu sebesar 0,716, dan dapat diartikan apabila terjadi kenaikan permintaan akhir sektor ini sebesar 1 rupiah akan mendorong peningkatan pendapatan seluruh sektor sebesar 0,716 rupiah. Terjadinya peningkatan alokasi belanja tersebut selama 5 tahun terakhir telah memberikan dampak terhadap perolehan pendapatan masyarakat. Kondisi ini nampak pada pengeluaran perkapita penduduk Papua Barat yang mengalami pertumbuhan rata-rata 2,1 persen pertahun, dengan tren yang meningkat hingga tahun 2015 dan mengalami penurunan pada tahun berikutnya.

Sektor pertanian khususnya komoditi padi memiliki angka pengganda tenaga kerja terbesar yaitu sebesar 0,117, dapat diartikan apabila terjadi kenaikan permintaan akhir sektor ini sebesar 1 juta akan mendorong peningkatan kesempatan kerja seluruh sektor sebanyak 0,117 orang. Namun yang terjadi alokasi belanja untuk sektor tersebut sejak tahun 2012 hingga tahun 2016 hanya berkisar antara 0,85 persen hingga 1,08 persen. Kondisi inilah yang mengakibatkan tenaga kerja yang terserap berfluktuatif dan tidak mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja bahkan sejak tahun 2013 porsi tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan hingga 7 persen di tahun 2017.

Secara lengkap alokasi belanja untuk setiap urusan seperti ditunjukkan pada Tabel 16.

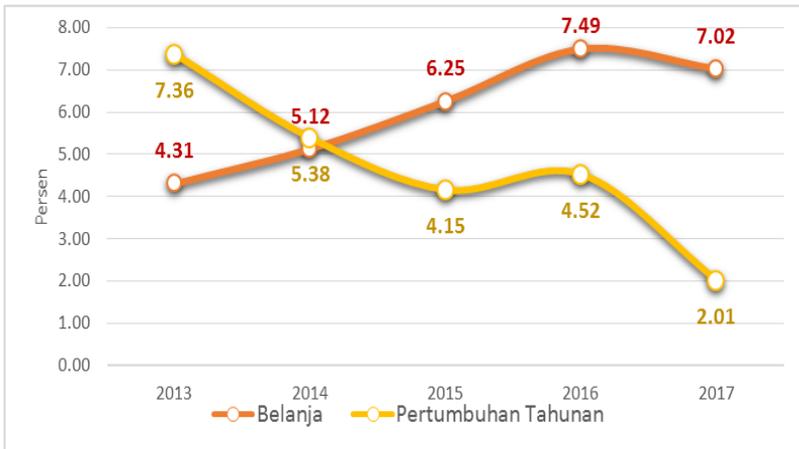
Tabel 16. Porsi Alokasi Belanja masing-masing Urusan di Provinsi Papua Barat Tahun 2012 - 2016

No	Urusan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pendidikan	2,01%	1,70%	2,01%	1,29%	2,25%
2	Kesehatan	1,69%	1,79%	2,98%	2,91%	3,04%
3	Pekerjaan Umum	10,73%	10,74%	13,67%	17,07%	18,00%
4	Perumahan	0,00%	0,09%	0,41%	0,53%	1,79%
5	Penataan Ruang	0,10%	0,22%	0,08%	0,15%	9,47%
6	Perencanaan Pembangunan	1,12%	1,02%	0,72%	0,69%	0,50%
7	Perhubungan	2,38%	2,08%	2,54%	1,19%	1,89%
8	Lingkungan Hidup	0,44%	0,51%	0,40%	0,37%	0,30%
10	Kependudukan dan Catatan Sipil	0,45%	0,35%	0,34%	0,27%	0,27%
11	Pemberdayaan Perempuan	0,53%	0,52%	0,42%	0,36%	0,33%
13	Sosial	0,79%	0,53%	0,51%	0,57%	0,52%
14	Tenaga Kerja	0,10%	0,00%	0,03%	0,06%	0,03%
15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,76%	0,42%	0,43%	0,52%	0,32%
16	Penanaman Modal	0,29%	0,25%	0,34%	0,39%	0,31%
17	Pariwisata	0,06%	0,26%	0,15%	0,00%	0,00%
18	Kebudayaan dan Pariwisata	0,00%	0,36%	0,40%	0,32%	0,39%
19	Pemuda dan Olah Raga	0,01%	0,62%	1,68%	0,39%	0,36%
20	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	0,01%	0,48%	0,33%	1,27%	1,15%
21	Pemerintahan Umum	73,83%	67,10%	61,84%	63,17%	59,28%
23	Pemberdayaan Masyarakat dan	1,71%	1,39%	0,98%	1,54%	1,33%

	Desa					
24	Kearsipan	0,09%	0,13%	0,14%	0,00%	0,00%
25	Komunikasi dan Informatika	0,29%	0,23%	0,26%	0,00%	0,24%
26	Ketahanan Pangan	0,37%	0,37%	0,28%	0,23%	0,26%
27	Perpustakaan	0,50%	0,58%	0,19%	0,27%	0,39%
28	Pertanian	0,85%	0,97%	1,02%	1,07%	1,08%
29	Kehutanan	0,87%	0,61%	0,47%	0,76%	0,87%
30	Energi dan Sumberdaya Mineral	0,68%	1,72%	1,43%	0,54%	0,41%
31	Kelautan dan Perikanan	0,97%	1,16%	2,36%	2,58%	2,45%
32	Perdagangan	0,14%	0,50%	0,20%	0,22%	0,20%
33	Perindustrian	0,33%	0,37%	0,33%	0,19%	0,25%
34	Transmigrasi	0,24%	0,00%	0,28%	0,28%	0,00%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 - 2016

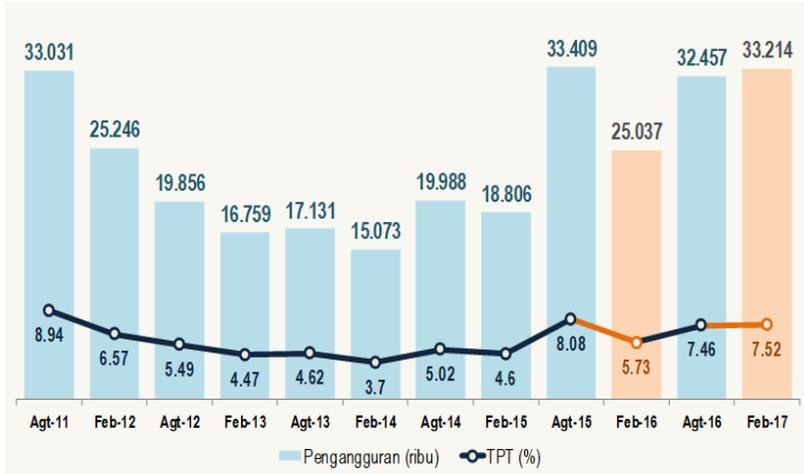
Alokasi belanja tersebut diharapkan dapat meningkatkan Pertumbuhan ekonomi, penurunan jumlah kemiskinan, peningkatan lapangan pekerjaan/ penurunan angka pengangguran penduduk serta distribusi pendapatan yang semakin sempit di Papua Barat. Berdasarkan data BPS bahwa laju pertumbuhan PDRB cenderung mengalami penurunan padahal alokasi belanja selama tahun 2012 s.d 2016 mengalami peningkatan. Dapat dikatakan bahwa alokasi belanja yang mengalami peningkatan setiap tahunnya kurang mendapat respons dari output daerah yang mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi Papua Barat mengalami perlambatan selama lima tahun terakhir, seperti nampak pada diagram berikut :



Gambar 65. Hubungan antara Belanja dan Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat

Sumber : Hasil pengolahan, 2017

Kalau dilihat dari penyerapan tenaga kerja di Provinsi Papua Barat menunjukkan bahwa jumlah pengangguran mengalami penurunan hingga tahun 2014. Meningkatnya alokasi belanja belum mampu menurunkan jumlah pengangguran hingga tahun 2016.



Gambar 66. Pengangguran dan TPT Papua Barat Tahun 2011 - 2017

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2011 - 2017

Jumlah pengangguran mengalami peningkatan sejak tahun 2014 dan mengalami fluktuasi hingga saat ini. Bertambahnya jumlah pengangguran akibat pertambahan jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan penambahan lapangan kerja baru. Serapan tenaga kerja di Papua Barat masih didominasi oleh sektor pertanian yang dicirikan oleh karakter tenaga kerja dengan pendidikan rendah, produktivitas rendah, dan umumnya penduduk kelompok umur tua. Angkatan kerja yang tidak terserap di sektor pertanian selanjutnya mencari pekerjaan di perkotaan sehingga mereka berkontribusi pada peningkatan tingkat pengangguran terbuka di perkotaan. Tingkat pengangguran terbuka di Papua Barat didominasi oleh daerah perkotaan.

Dilihat dari perkembangan distribusi pengeluaran penduduk, tampak terjadi peningkatan ketimpangan yang

ditunjukkan dengan kenaikan nilai gini ratio selama tahun 2006 hingga tahun 2017. Pada permulaan otonomi khusus Papua dan pembentukan Provinsi Papua Barat kesenjangan pengeluaran penduduk masih sangat rendah dengan nilai gini saat itu di bawah 0,3. Bertumbuhnya aktivitas ekonomi hingga saat ini, indeks gini mulai bergerak naik hingga saat ini mencapai 0,39. Kondisi ini menunjukkan bahwa alokasi belanja selama 5 tahun terakhir ini hanya memberikan dampak penurunan indeks gini pada tahun 2016 seperti pada diagram berikut:

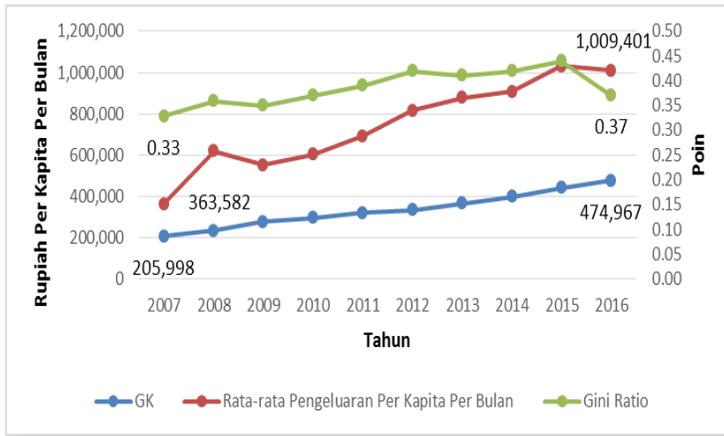


Gambar 67. Tren Gini Ratio Provinsi Papua Barat Tahun 2006 - 2017

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2006 - 2017

Di sisi lain, Persentase Penduduk Miskin Papua Barat Tahun 2007 – 2017 mengalami penurunan walaupun tidak sesuai target yang tertuang dalam RPJMD Papua Barat. Lambatnya penurunan kemiskinan di Papua Barat

disebabkan tingginya Garis Kemiskinan (GK dibentuk oleh GK makanan dan GK non Makanan). Share GK makanan masih sangat dominan, sehingga terjadinya inflasi terhadap komoditas makanan akan sangat berpengaruh terhadap kenaikan garis kemiskinan. Selama 10 tahun terakhir, GK Papua Barat tumbuh 142,61 persen, dengan rata-rata kenaikan GK setiap tahun mencapai 5,80 persen.



Gambar 68. Garis Kemiskinan, Rata-rata Pengeluaran Perkapita dan Gini Ratio Provinsi Papua Barat Tahun 2007 - 2016

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2007 - 2016

Pertumbuhan pengeluaran per kapita per bulan mencapai 177,63 persen pada periode yang sama dengan pertumbuhan per tahun sebesar 13,73 persen. Meskipun terdapat kenaikan garis kemiskinan setiap tahunnya namun selalu diimbangi oleh kenaikan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan oleh penduduk Papua Barat karena rata-rata pendapatan per kapita bertambah.

Lambannya penurunan tingkat kemiskinan di Papua Barat karena tingkat ketimpangan pendapatan yang cenderung meningkat selama kurun 2007 - 2017. Tingkat ketimpangan pengeluaran Papua Barat masuk dalam kategori sedang dalam arti kontribusi pengeluaran didominasi oleh kelompok sedang dan kelompok atas. Dapat dikatakan bahwa, hasil-hasil pembangunan di Papua Barat lebih banyak dinikmati oleh kelompok menengah dan kelompok atas.

Guna memperlancar proses pembangunan di Provinsi Papua Barat, pemerintah menyusun dan melakukan kebijakan anggaran, hal ini karena pemerintah menginginkan Provinsi Papua Barat menjadi suatu daerah yang makmur, mandiri dan rakyatnya hidup sejahtera. Dalam melaksanakan kebijakan tersebut terdapat kendala-kendala yang dianggap menjadi tantangan fiskal yang patut diperhitungkan antara lain:

1. Sumber Daya Manusia

Perkembangan kuantitas sumber daya manusia dapat menjadi pendorong maupun penghambat pembangunan. Perkembangan kuantitas penduduk yang cepat tidak disertai dengan peningkatan kualitas penduduk dapat menjadi penghambat dalam pembangunan ekonomi. Kuantitas penduduk yang tinggi dengan kualitas yang tinggi dapat meningkatkan produksi yang dihasilkan secara agregat, yang pada akhirnya menggerakkan roda perekonomian.

Peningkatan jumlah penduduk di Provinsi Papua Barat, selain dipicu dari tingginya angka kelahiran juga kondisi di Provinsi Papua Barat yang sudah kondusif sehingga menjadi

daya tarik masyarakat dari daerah lain, untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi.

Tabel 17. Tren Penduduk Papua Barat hingga Tahun 2020

KABUPATEN/KOTA	TAHUN										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
FAKFAK	66 393	68 194	69 516	70 902	72 189	73 468	74 772	76 102	77 381	78 686	79 870
KAIMANA	47 107	47 794	49 198	51 100	52 473	54 165	55 503	56 882	58 404	60 216	61 820
TELUK WONDAMA	26 425	27 104	27 820	28 534	29 098	29 791	30 490	31 072	31 769	32 521	33 234
TELUK BINTUNI	52 619	53 967	55 295	56 597	57 922	59 196	60 400	61 794	63 091	64 406	65 705
MANOKWARI	13 8184	142 128	14 6075	150 179	154 296	158 326	162 578	166 780	170 897	175 178	179 384
SORONG SELATAN	38 121	39 071	40 110	41 085	42 028	43 036	43 896	45 019	46 021	46 922	47 875
SORONG	70 866	72 816	74 780	76 669	78 698	80 695	82 784	84 906	86 994	88 927	91 134
RAJA AMPAT	42 076	43 320	43 902	44 568	45 310	45 923	46 613	47 301	47 885	48 493	49 083
TAMBRAW	12 961	13 163	13 199	13 376	13 497	13 615	13 699	13 785	13 804	13 879	14 021
MAYBRAT	33 332	34 216	35 004	35 798	36 601	37 529	38 377	39 191	40 102	40 899	41 798
MANOKWARI SELATAN	19 234	19 806	20 293	20 916	21 282	21 907	22 519	22 983	23 617	24 220	24 679
PEGUNUNGAN ARFAK	24 772	25 410	26 119	26 729	27 616	28 271	28 898	29 731	30 409	30 976	31 793
KOTA SORONG	193 168	198 990	205 684	211 840	218 799	225 588	232 833	239 815	247 084	254 294	261 426
PAPUA BARAT	765 258	785 979	806 995	828 293	849 809	871 510	893 362	915 361	937 458	959 617	981 822

Sumber: BPS, Bappenas dan UNFPA, *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010 - 2013*

Dari data yang dirilis BPS Provinsi Papua Barat, laju pertumbuhan penduduk tertinggi berada di kota Sorong sebesar 4,38% dan terendah di Kabupaten Tambrau sebesar 2,02%, sedangkan untuk Kabupaten Manokwari memiliki laju pertumbuhan penduduk kelima yaitu 3,72%. Sebaran penduduk tertinggi di Kota Sorong sebanyak 25,31% dan Kabupaten Manokwari sebanyak 24,74%. Berdasarkan latar belakang pendidikan terakhir, persentase penduduk yang bekerja sebagian besar berpendidikan rendah dan 43,53%

penduduk yang bekerja berlatar belakang pendidikan rendah sedangkan 11,21 % yang berpendidikan diploma dan sarjana.

2. Infrastruktur

Provinsi Papua Barat yang terdiri dari 13 Kabupaten/Kota dengan luas daerah 97.024,37 km² dimana infrastruktur menjadi salah satu faktor penghambat pembangunan dan juga menjadi tantangan fiskal di Provinsi Papua Barat. Terlihat bahwa kurangnya infrastruktur serta sarana dan prasarana yang baik di Provinsi Papua Barat menjadi penghambat masuknya investor untuk berinvestasi di Papua Barat. Sehingga saat ini salah satu yang dilaksanakan adalah perbaikan infrastruktur disegala bidang baik dari transportasi darat yaitu pembukaan jalan penghubung antar kabupaten, transportasi laut yaitu perbaikan dan pembuatan pelabuhan kapal yang permanen dan transportasi udara yaitu pembukaan bandar udara perintis di seluruh kabupaten baru. Diharapkan dengan perbaikan infrastruktur maka pertumbuhan ekonomi diseluruh daerah di Provinsi Papua Barat akan cepat berkembang.

Tabel 18. Kondisi Topografi Wilayah Kabupaten/Kota di Papua Barat Tahun 2014

Kabupaten/Kota	Lereng/ Puncak	Lembah	Dataran	Jumlah
Fakfak	82	4	37	123
Kaimana	29	15	42	86
Teluk Wondama	67	7	3	77
Teluk Bintuni	37	5	196	238
Manokwari	18	3	139	160
Sorong Selatan	10	13	98	121
Sorong	14	21	106	141
Raja Ampat	-	1	120	121
Tambrau	15	19	42	76
Maybrat	16	39	102	157
Manokwari Selatan	5	12	40	57
Pegunungan Arfak	142	16	21	179
Kota Sorong	6	-	25	31
Papua Barat	441	155	971	1 567

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, Podes 2014

3. Sarana Komunikasi dan Informasi Serta Jaringan Listrik

Ketersediaan sarana komunikasi dan Informasi, serta jaringan listrik sangat penting dalam perkembangan suatu daerah. Untuk saat ini salah satu kendala pembangunan di Provinsi Papua Barat adalah rendahnya ketersediaan sarana komunikasi dan informasi serta jaringan listrik. Kurangnya sarana tersebut berdampak pada lambatnya diperoleh informasi yang dapat dijadikan acuan untuk perkembangan suatu daerah. Contohnya, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Teluk Wondama sarana informasi dan jaringan listrik sangat minim, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lambat, dan daya tarik bagi investor menjadi rendah.

Tabel 19. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki/Menguasai Telepon Seluler Menurut Kabupaten/ Kota di Papua Barat, 2007-2016

Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1 Fakfak	37.88	51.58	53.52	59.80	66.39	75.33	78.36	79.10	43.63	61.02
2 Kaimana	21.27	43.94	44.21	51.20	55.23	57.20	49.04	57.45	45.12	44.96
3 Teluk Wondama	13.28	23.60	25.94	54.96	18.33	64.79	59.16	72.46	41.65	40.52
4 Teluk Bintuni	22.68	45.85	46.24	70.31	60.79	71.59	64.06	72.58	53.90	56.37
5 Manokwari	34.21	46.09	61.25	80.96	70.16	82.29	78.50	80.49	66.25	66.39
6 Sorong Selatan	6.27	21.24	21.62	27.71	27.05	33.22	20.73	63.80	43.00	36.47
7 Sorong	24.86	49.09	49.36	68.95	72.25	71.79	71.41	87.06	57.43	57.42
8 Raja Ampat	0.00	12.11	13.27	44.07	27.19	33.15	53.08	69.79	45.76	40.74
9 Tambrau	-	-	-	0.52	0.89	10.30	25.17	16.99	25.32	28.51
10 Maybrat	-	-	-	3.66	5.39	3.65	13.77	16.84	30.85	42.19
11 Manokwari Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	42.93	42.73
12 Pegunungan Arfak	-	-	-	-	-	-	-	-	11.26	4.49
71 Kota Sorong	59.31	79.95	80.92	88.92	93.00	97.43	95.33	99.01	73.06	73.30
Papua Barat	33.56	50.68	54.09	67.76	64.61	71.71	68.27	75.53	55.44	56.93

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2007 – 2016

4. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Pertumbuhan PDRB menggambarkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Selama beberapa tahun terakhir laju pertumbuhan PDRB di Provinsi Papua Barat cenderung menurun dengan disertai kesenjangan distribusi pendapatan. Hal itu disebabkan kontribusi pertumbuhan utama disumbang oleh sumber daya alam atau yang menerima manfaat pertumbuhan ekonomi adalah sebagian kecil lapisan masyarakat. Indikator pertumbuhan ekonomi (PDRB) yang

diikuti dengan tingginya kesenjangan distribusi pendapatan ditunjukkan oleh angka Gini Ratio beberapa daerah di Papua Barat.

5. Pertanian

Sebagian besar daerah di Papua Barat kontribusi lapangan usaha pertanian terhadap PDRB daerah masing-masing sangat tinggi, hal ini mengindikasikan bahwa sumber utama pendapatan sebagaimana besar masyarakat dihasilkan dari sektor pertanian. Namun daerah yang kontribusi lapangan usaha pertanian terhadap PDRB daerah masing-masing tinggi, apabila dibandingkan dengan lapangan usaha pertanian PDRB provinsi kontribusinya sangat rendah.

Kebijakan alokasi anggaran belanja negara pada APBN tahun 2012 diarahkan kepada upaya mendorong pertumbuhan di daerah melalui pengembangan koridor ekonomi, membangun infrastruktur yang mendukung terwujudnya keterhubungan wilayah (globally connected and domestically integrated) dan mendorong percepatan pembangunan di Papua Barat. Dampak dari kebijakan tersebut, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan merupakan kementerian yang alokasi Belanja Modal DIPA terbesar di Papua Barat, yaitu secara agregat pada tahun 2011 sebesar 83%, tahun 2012 sebesar 88,69%, tahun 2013 sebesar 84,55% dan tahun 2014 sebesar 91,84%.

Kebijakan terwujudnya keterhubungan wilayah sangat mendukung lapangan usaha pertanian karena petani dapat lebih mudah memasarkan hasil pertanian. Oleh karena itu perlu dipikirkan untuk meningkatkan alokasi di sektor

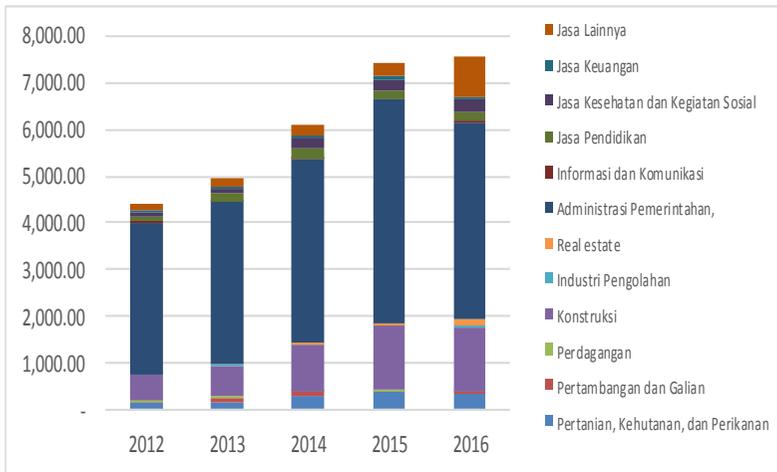
pertanian, sehingga keterhubungan antar wilayah tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat petani.

Kebijakan alokasi anggaran untuk APBD belum memberikan fokus yang berarti yang nampak dari alokasinya yang belum konsisten pada setiap tahun. Secara umum efisiensi pengalokasian belanja dan perolehan pendapatan belum dapat di penuhi hal ini nampak pada perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang memadai.

Efektifitas Belanja Daerah

Efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Indikator efektifitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program.

Alokasi belanja berdasarkan urusan yang telah dikonversi kedalam sektor ekonomi menunjukkan bahwa porsi administrasi pemerintahan lebih mendominasi yang secara nominal selama 5 tahun mengalami peningkatan.



Gambar 69. Proporsi Alokasi Belanja Berdasarkan Urusan di Provinsi Papua Barat Tahun 2012 - 2016

Sumber : Hasil pengolahan, 2017

Besarnya alokasi belanja setelah diurutkan berdasarkan 10 urusan alokasi terbesar dapat dikatakan bahwa dominasi alokasi terhadap urusan administrasi pemerintahan menunjukkan bahwa fokus alokasi belanja belum efektif terhadap perubahan indikator pembangunan karena urusan yang mampu menyentuh perolehan pendapatan masyarakat golongan menengah ke bawah kurang mendapat perhatian. Secara umum Urusan Administrasi Pemerintahan memiliki porsi yang lebih besar, yang menunjukkan bahwa fokus belanja lebih banyak terserap pada penyelenggaraan pemerintahan seperti nampak pada Tabel 19.

Tabel 20. Perbandingan Fokus Belanja Setiap Urusan di Provinsi Papua Barat Tahun 2012 - 2016

No	Ususan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,98%	3,21%	4,24%	4,68%	4,32%
2	Pertambangan dan Galian	0,67%	1,78%	1,47%	0,54%	0,38%
3	Perdagangan	0,13%	0,51%	0,21%	0,22%	0,19%
4	Konstruksi	12,81%	13,21%	16,68%	18,41%	18,47%
5	Industri Pengolahan	0,32%	0,38%	0,34%	0,19%	0,23%
6	Real estate	0,00%	0,09%	0,42%	0,53%	1,66%
7	Administrasi Pemerintahan,	73,81%	70,54%	64,60%	65,24%	56,30%
8	Informasi dan Komunikasi	0,28%	0,23%	0,27%	0,00%	0,22%
9	Jasa Pendidikan	2,47%	2,99%	4,00%	1,96%	2,78%
10	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,42%	2,40%	3,59%	3,51%	3,31%
11	Jasa Keuangan	1,02%	0,69%	0,79%	0,92%	0,58%
12	Jasa Lainnya	3,08%	3,97%	3,40%	3,79%	11,56%
Total		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber : Hasil pengolahan, 2017

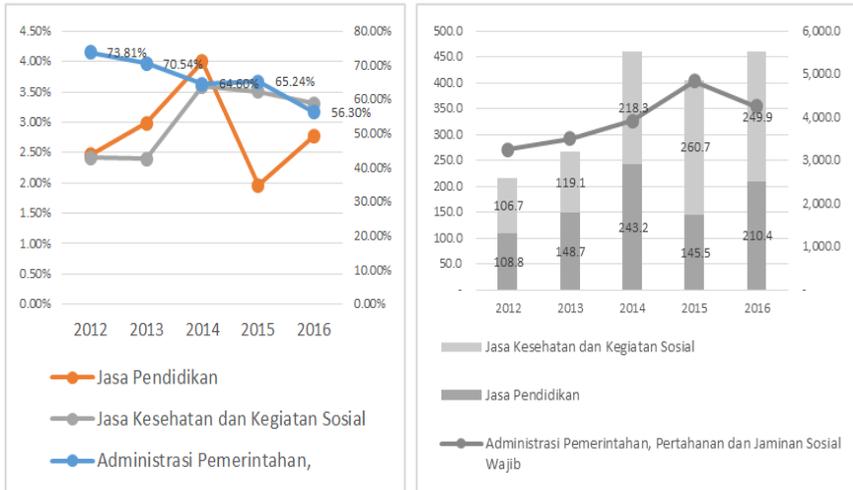
Pengalokasian belanja di Provinsi Papua Barat memiliki kriteria efektifitas yang bervariasi selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Pada tahun 2011 sampai tahun 2016 tingkat efektifitas berada dalam kriteria yang kurang efektif karena realisasi anggaran masih jauh perbedaan dengan target anggaran. Tahun 2014 sampai tahun 2015 tingkat efektifitas sudah bisa masuk dalam kriteria cukup efektif. Walau masuk dalam kriteria cukup efektif, realisasi anggaran yang di capai masih cukup jauh perbedaannya untuk memenuhi target anggaran yang

ditetapkan. Menurut para Pejabat anggaran yang cukup jauh perbedaannya dengan target yang diharapkan disebabkan oleh adanya kegiatan yang dianggarkan, tetapi tidak dapat dilaksanakan.

Alokasi belanja berdasarkan sektor ekonomi dalam PDRB menunjukkan bahwa Administrasi pemerintahan mendapatkan alokasi sampai 73,81 persen dari total belanja pada tahun 2012 sebesar Rp. 4,3 milyar. Alokasi tersebut secara nominal bertambah setiap tahunnya hingga tahun 2016 walaupun secara proporsional mengalami penurunan hingga 56,3 persen. Berdasarkan klasifikasi jenis belanja atau sifat ekonomi, belanja tidak langsung dan belanja langsung belum nampak ada pemfokusan. Alokasi Belanja modal dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur yang lebih tinggi seperti pembangunan jalan provinsi dan pembukaan jalan baru untuk mengatasi masalah konektivitas daerah. Selama lima tahun terakhir terlihat alokasi belanja modal terus melonjak tajam bila dibandingkan dengan belanja subsidi atau belanja bantuan sosial yang lebih bersifat konsumtif. Belanja modal sebagai indikator perkembangan sektor produktif terutama bertujuan agar mendorong perkembangan sektor konsumtif misalnya pembangunan pasar untuk meningkatkan jual beli barang bagi masyarakat di pedesaan maupun perkotaan.

Perkembangan alokasi lainnya untuk fungsi pendidikan, kesehatan dan pelayanan umum. selama 3 tahun terakhir alokasi tersebut terus menunjukkan meningkat dimana proporsinya alokasi belanja pendidikan tahun 2015 sebesar Rp. 1.805M naik Rp. 243M dari tahun 2013 alokasi belanja APBD. Berikut disajikan perbandingan belanja

fungsi pendidikan, fungsi kesehatan dan fungsi pelayanan umum di Provinsi Papua Barat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebagai berikut:



Gambar 70. Porsi Alokasi Belanja Fungsi Kesehatan, Pendidikan dan Pelayanan Umum di Papua Barat Tahun 2012 - 2016

Sumber : Hasil pengolahan, 2017

Perkembangan alokasi belanja fungsi kesehatan mengalami kenaikan sedangkan pendidikan mengalami peningkatan hingga tahun 2014 dan tahun berikutnya menurun. Sementara alokasi belanja pelayanan umum meningkat signifikan dibandingkan dengan alokasi fungsi kesehatan dan pendidikan. Bahkan pada tahun 2015 alokasi fungsi pelayanan umum naik dibandingkan tahun sebelumnya atau meningkat paling tinggi selama 3 tahun terakhir. Kenaikan alokasi fungsi pelayanan umum ini merupakan konsekuensi dari adanya 2 daerah pemekaran

baru yaitu Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Kedua kabupaten ini mulai mandiri menetapkan dan mengelola APBD di tahun 2015 setelah memiliki organ dan struktur pemerintahan.

Perkembangan indikator kesehatan menunjukkan bahwa belum seluruh kabupaten memiliki fasilitas rumah sakit. Saat ini terdapat 16 unit rumah sakit di Papua Barat dan sebanyak 9 unit rumah sakit berada di Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong. Berikut disajikan tabel perkembangan indikator kesehatan:

Tabel 21. Indikator Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2012 - 2015

Uraian	2012	2013	2014	2015
Angka Harapan Hidup	64,88	65,05	65,14	65,19
Jumlah Rumah Sakit	16	16	16	16
Jumlah Puskesmas	126	141	141	151
Jumlah Pustu	397	379	na	na
Jumlah Polindes	17	239	na	na
Jumlah Puskesmasling	212	na	na	na
Persentase Penolong Kelahiran Secara Medis	75,99	69,46	73,28	77,31

Sumber : BPS, 2016

Beberapa indikator kesehatan yang menjadi tolok ukur capaian belanja fungsi kesehatan. Apabila belanja fungsi kesehatan dilaksanakan sesuai dengan tujuan sebenarnya maka seharusnya ada peningkatan indikator kesehatan. Sebagai contoh peningkatan angka kelahiran mengindikasikan kebutuhan tenaga medis penolong

kelahiran yang meningkat. Angka kematian ibu dan bayi di Papua Barat masih relatif tinggi akibat kekurangan tenaga medis penolong kelahiran. Demikian juga tersedianya fasilitas kesehatan masyarakat seperti puskesmas pembantu dan polindes sangat membantu masyarakat di perkampungan yang jauh dari jangkauan rumah sakit bahkan puskesmas.

Tabel 22. Indikator Pendidikan Provinsi Papua Barat Tahun 2011 – 2014

Indikator Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
Angka Partisipasi Sekolah (%)					
7 - 12 tahun	95.56	95.58	96.65	96.74	96.95
13 - 15 tahun	91.65	92.81	96.28	96.58	96.86
16 -18 tahun	67.18	72.04	79.87	79.99	80.28
TPT (%)	5.49	4.62	5.02	8.08	7.46
Pengangguran (orang)	381,453	387,881	418,412	380,226	402,360
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	6.87	6.91	6.96	7.01	7.06

Sumber : BPS Provinsi Papua Barat (data diolah)

Alokasi belanja fungsi pendidikan mengikuti tren alokasi belanja fungsi kesehatan. Belanja fungsi pendidikan seharusnya dapat meningkatkan taraf kesehatan masyarakat yang dapat dilihat dari peningkatan indikator kesehatan. Berikut disajikan tabel perkembangan indikator pendidikan di Papua Barat.

Pertumbuhan alokasi atau realisasi belanja fungsi pendidikan diarahkan untuk mendorong peningkatan indikator pembangunan di bidang pendidikan. Sejalan

dengan perkembangan alokasi belanja fungsi kesehatan, perkembangan indikator pendidikan sudah seharusnya juga menunjukkan adanya peningkatan. Adanya peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di semua kelompok umur, menurunnya tingkat buta huruf dan meningkatnya angka melek huruf serta penurunan tingkat pengangguran terbuka membuktikan pengaruh belanja fungsi pendidikan sejalan dengan perkembangan indikator pendidikan.

Efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Alokasi belanja Pendidikan dan Kesehatan belum mampu memberikan tujuan akhir karena ketidakkonsistenan pengalokasian belanja selama 5 tahun terakhir. Indikator efektifitas atau jangkauan akibat alokasi belanja pada setiap program dalam mencapai tujuan program belum efektif.

Pengembangan Indikator Makro Daerah

Perkembangan belanja di Provinsi Papua Barat merupakan konsekuensi dari tujuan pembangunan secara nasional dimana pengeluaran pemerintah yang bersifat ekspansif bertujuan mendorong terbukanya lapangan kerja, penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan penduduk dengan indikator meningkatnya PDRB per kapita.

Alokasi belanja baik yang bersumber dari APBN maupun APBD mengalami peningkatan sejak Tahun 2012 sampai tahun 2016. Sebagai pembandingan berdasarkan fungsi untuk tahun 2014 dan tahun 2015 dapat disajikan pada Tabel 23.

Alokasi fungsi pelayanan umum, fungsi ekonomi, dan fungsi perumahan dan fasilitas umum, serta fungsi pendidikan mengambil proporsi yang dominan dari dana belanja APBD, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perekonomian Papua Barat. Pertumbuhan beberapa indikator makro regional di Papua Barat merupakan pengaruh dari kebijakan fiskal yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Tabel 23. Perbandingan Alokasi Fungsi APBN dan APBD Di Wilayah Provinsi Papua Barat (Dalam Milyar Rupiah)

No.	Struktur APBN				No.	Struktur APBD			
	Uraian Fungsi	2014	2015	%		Uraian Fungsi	2014	2015	%
1	Pelayanan Umum	1.569,76	1.204,34	-23,28%	1	Pelayanan Umum	6.747	8.227	21,94%
2	Pertahanan	181,69	238,22	31,11%	2				
3	Ketertiban dan Keamanan	89,12	231,67	159,96%	3	Ketertiban dan Keamanan	225	231	2,70%
4	Ekonomi	3.459,77	5.212,16	50,65%	4	Ekonomi	1.705	1.862	9,19%
5	Lingkungan Hidup	184,46	159,49	-13,54%	5	Lingkungan Hidup	181	192	5,78%
6	Perumahan dan Fasilitas Umum	518,30	484,64	-6,49%	6	Perumahan dan Fasilitas Umum	2.270	3.053	34,48%
7	Kesehatan	105,34	154,60	46,77%	7	Kesehatan	1.017	1.217	19,68%
8	Pariwisata dan Budaya	6,18	6,00	-2,97%	8	Pariwisata dan Budaya	148	94	-36,62%
9	Agama	35,48	51,52	45,21%	9				
10	Pendidikan	550,94	699,13	26,90%	10	Pendidikan	1.756	1.805	2,79%
11	Perlindungan Sosial	30,98	29,35	-5,25%	11	Perlindungan Sosial	346	381	10,30%
	Total	6.732,01	8.471,13			Total	14.395,50	17.062,20	
	Kenaikan			25,83%		Kenaikan			18,52%

Perkembangan indikator perekonomian di Papua Barat periode 2012 hingga 2017 disajikan pada Tabel 24.

Tabel 24. Perkembangan Indikator Makro Regional Papua Barat Periode Tahun 2012 s.d Tahun 2017

Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. Pertumbuhan Ekonomi	% (2010=100)	3.64	3.63	7.36	5.38	4.15	2,01 ¹⁾
2. PDRB (ADHB)							
(Dengan Migas)	(miliar rupiah)	47.421,09	52.997,66	58.180,96	62.889,89	66.635,51	16.775,05 ¹⁾
(Tanpa Migas)	(miliar rupiah)	23.151,73	26.637,14	30.670,16	34.900,59	38.736,57	10.329,00 ¹⁾
3. Laju Inflasi	%	4.99	7.28	6.55	5.34	3.62	1,71 ²⁾
4. Kemiskinan ⁴⁾							
(Maret)	Jumlah (ribu orang)	229.99	224.27	229.43	225.36	225.8	228.38
	%	28.20	26.67	27.13	25.82	25.43	25.10
(September)	Jumlah (ribu orang)	223.2	234.23	225.46	225.54	223.6	
	%	27.04	27.14	26.26	25.73	24.88	
5. Pengangguran ⁴⁾							
(Februari)	Jumlah (ribu orang)	252.46	167.59	150.73	188.06	250.37	332.14
	TPT (%)	6.57	4.47	3.7	4.6	5.73	7.52
(Agustus)	Jumlah (ribu orang)	198.56	171.31	199.88	334.09	324.57	
	TPT (%)	5.49	4.62	5.02	8.08	7.46	
6. Rasio Gini							
(Maret)		0.42	0.41	0.42	0.43	0.373	0.390
(September)					0.428	0.401	
7. IPM		60.30	60.91	61.28	61.73	62.21	

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, Data Sosial dan Ekonomi Strategis 2017

Berkurangnya jumlah pengangguran, menurunnya angka kemiskinan, dan meningkatnya angka partisipasi sekolah merupakan perkembangan indikator makro dari dampak belanja pemerintah melalui APBN dan APBD. Banyak faktor yang akan menentukan berapa besar pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan indikatornya misalnya faktor ketepatan sasaran program dan



kegiatan, tingkat efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan, program dan kegiatan yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat dan faktor-faktor lainnya. Sebagai contoh bantuan tunai langsung kepada masyarakat membantu perbaikan ekonomi dalam jangka pendek namun pembangunan jalan dan jembatan serta penyediaan sarana transportasi yang memadai akan membawa dampak besar dalam jangka panjang. Pencapaian indikator makro tersebut akibat alokasi belanja pada sektor-sektor ekonomi berdasarkan urusan dalam APBD Provinsi dan APBN.

PENUTUP

Selama 5 (lima) tahun terakhir pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan disebabkan ketergantungan perekonomian Papua Barat lebih didominasi oleh sektor migas dan pertambangan, yang mengalami penurunan output.

Indikator pembangunan tingkat pengangguran cenderung menurun dan berfluktuasi disebabkan oleh menurunnya jumlah ekspor pada sektor migas dan pertambangan sehingga mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada semua sektor, dan terjadi peningkatan output pada sektor pertanian, konstruksi dan administrasi pemerintah serta jasa lainnya.

Tingkat ketimpangan pendapatan yang semakin melebar hingga tahun 2015 disebabkan alokasi pendapatan lebih banyak didominasi oleh kelompok menengah keatas. Persentase penduduk miskin di Papua Barat mengalami penurunan, disebabkan oleh tingkat pendapatan yang meningkat dan persoalan ketimpangan pendapatan serta disparitas antar wilayah Kabupaten/Kota maupun antar kota dan desa.

Sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor jasa-jasa, sektor bangunan dan konstruksi serta sektor perdagangan, hotel dan restoran meskipun memberikan kontribusi terbesar dan mendominasi perkembangan perekonomian di Papua Barat selama periode 2012-2016 namun kontribusinya mengalami depresiasi selama periode tersebut. Jasa pendidikan, transportasi, perdagangan,

administrasi pemerintah dan konstruksi merupakan sektor ekonomi yang mengalami peningkatan kontribusi.

Peningkatan alokasi belanja modal selama 5 tahun terakhir tidak konsisten dan lebih banyak dialokasikan untuk pengadaan mesin, bangunan dan tanah sehingga kurang memberikan dorongan terhadap penciptaan output pada sektor-sektor yang produktif.

Alokasi belanja administrasi pemerintahan secara nominal mengalami peningkatan setiap tahunnya walaupun secara proporsional menurun, hal ini telah memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sehingga ketergantungan ekonomi terhadap sektor tersebut cukup tinggi terlebih pada daerah otonomi baru.

Alokasi belanja terhadap sektor strategis pertanian hanya 3,0 s.d 4,6 persen dari alokasi belanja selama 5 tahun yang mengakibatkan pendapatan golongan menengah kebawah mengalami stagnan. Sedangkan sektor konstruksi dan jasa lainnya mengalami peningkatan sehingga pendapatan golongan menengah keatas mengalami peningkatan yang menyebabkan distribusi pendapatan menjadi lebih lebar.

Alokasi belanja untuk jasa pendidikan dan kesehatan yang masing-masing sekitar 3 persen tidak konsisten selama 5 tahun dan tidak terfokus pada kabupaten yang memiliki IPM yang rendah. Alokasi belanja untuk mengurangi disparitas antar wilayah tidak nampak dalam alokasi belanja pada setiap program kegiatan. Alokasi belanja terhadap sektor ekonomi yang memiliki tingkat kepekaan untuk mendorong sektor ekonomi lainnya dan yang memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja namun golongan

menengah kebawah kurang mendapatkan perhatian dukungan alokasi belanja yang konsisiten.

Alokasi belanja terhadap sektor strategis sesuai dengan RPJMD Papua Barat tahun 2017-2022 kurang mendapat dukungan belanja yang konsisten. Alokasi belanja berdasarkan indicator makro maupun indicator pembangunan kurang efisien karena alokasi belanja kurang menggerakkan indikaor tersebut. Efektifitas alokasi belanja kurang sinkron dengan tujuan yang dicapai karena alokasi belanja lebih didominasi oleh belanja administrasi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Bustanul dan Didik J. Rachbini, 2001. *Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Aschauer, D., 2000. Public Capital and Economic Growth. *Issues of Quality, Finance and Efficiency, Economic Development and Cultural Change* 48(2):391-406.
- Badan Pusat Statistik, 2015. *Tabel I-O Indonesia 2010*. BPS Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2016. *Tabel I-O Papua Barat 2015*. BPS Manokwari.
- Badan Pusat Statistik, 2017. *Keadaan Angkatan Kerja Di Provinsi Papua Barat Agustus 2017*, BPS Papua Barat. Manokwari.
- Badan Pusat Statistik, 2017. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua Barat Menurut Lapangan Usaha 2013-2017*. BPS Manokwari.
- Badan Pusat Statistik, 2017. *Provinsi Papua Barat Dalam Angka 2016*. BPS Manokwari.
- Balducci, R., 2005. *Public Expenditure and Economic Growth*, Quaderno. Universita Politecnica Delle Marche.
- Bank Indonesia, 2014. *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Papua Barat Triwulan IV 2014*. Manokwari
- Bank Indonesia, 2015. *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Papua Barat Triwulan IV 2015*. Manokwari

- Bank Indonesia, 2016. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Papua Barat Triwulan IV 2016. Manokwari
- Bank Indonesia, 2017. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Papua Barat Triwulan IV 2017. Manokwari
- Blair, J. P.,1991. *Urban and Regional Economics*. Hometown. Irwin.
- Brata A. G., 2004. Komposisi Penerimaan Sektor Publik dan Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia, *Jurnal Ekonom*, Valume 13(20):59-71
- Departemen Keuangan RI., 2004. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 248 / kmk. 06 Tahun 2003. *Tentang Penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam*.
- Due John F., 1968, *Government Finance: Economics of The Public Sector*, Richard D.Irwin Inc. Homewood Illianois
- Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat. 2016. Kajian Fiskal Regional Provinsi Papua Barat Tahun 2016. Manokwari
- Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat. 2017. Kajian Fiskal Regional Provinsi Papua Barat Tahun 2017. Manokwari
- Kuncoro, Mudradjad, 2015. Mudah memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi, cetakan kedua, Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Landau, D. 1986. Government and Economic Growth in the Less Developed Countries. An Empirical Study for 1960-1980. *Economic Development and Cultural Change* Vol. 35, No. 4 (October).

- Lin, Steven A. (1994). *Government Spending and Economic Growth*. Applied Economic. 26:83-94
- Lucas. E. C. and B. K. Prim. 1979. "Identifying the J, depressed and declining industries in Indonesia. Presented at the third Biennial Meeting of the Agricultural Economic Society of South East Asia. Kuala Lumpur.
- Mankiw, N. Gregory. 2007. *Teori Makroekonomi*. Jilid Keempat. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Mankoesobroto, G. 2008. *Ekonomi Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta. BPFE.
- Mardiasmo., 2009, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: ANDI
- Mustopadidjaya, 1997. Sistem dan Proses Penyusunan APBDN, Modul pada Program Diklat TMPP-D Angkatan XV, Ujung Pandang.
- Musgrave, R.A. (1959) *The Theory of Public Finance*. McGraw Hill, New York
- Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, 2013. *Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012*.
- Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, 2014. *Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2015*.
- Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, 2015. *Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016*.
- Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, 2016. *Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2017*.

- Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2013
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua
Barat Tahun 2013-2033.
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18 Tahun
2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua
Barat Tahun 2012-2016.
- Perloff, H. S., E. S. Dunn, E. E. Lampard, R. Muth. 1960.
Region, Resources, and Economic Growth. Univ. of
Nebraska Pres, Lincoln
- Pressman, Steven. 2002. *Lima Puluh Pemikir Ekonomi
Dunia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persad.
- Stiglitz, Joseph E., The General Theory of Tax Avoidance
(March 1986). NBER Working Paper No. w1868.
Available at
SSRN: <https://ssrn.com/abstract=288467>.
- Tambunan, Tulus. 2001. *Perekonomian Indonesia: Teori dan
Temuan Empiris*. Jakarta: Ghalia Indonesia



Tentang Penulis

Ir. Totok Mei Untarto, M.Sc.

Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat

Rosa Rantetoding, S.Kom., M.Kes

Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Emalia Talaubun, S.Hut

Staf Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat

Ferdinandus Hurulean, SP.

Staf Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat

Dr. Rully Wurarah, M.Si.

Staf Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Papua

Siti Aisyah Bauw, SE, M.Sc.

Staf Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Papua

Maria Goreti Ngadji, ST, MT.

Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat

Paul Billy Tanati, S.STP

Kepala Sub Bidang Data, Statistik, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat

Ezrom Batorinding, S.Hut., M.Sc.

Kepala Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat



Implementasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Papua Barat merupakan hasil kajian yang bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan dan memberikan gambaran perkembangan ekonomi di Provinsi Papua Barat.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI PROVINSI PAPUA BARAT



Ari Koesmiadi - Kawasan Ekonomi Khusus Sorong

ISBN: 978-623-90302-0-9



9 786239 030209